



SALINAN

**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 33 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KOTA MADIUN TAHUN 2023–2027**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, efisien dan transparan, perlu adanya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan adanya Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Madiun Tahun 2023-2027;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Madiun;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOTA MADIUN TAHUN 2023-2027.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik, aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menghasilkan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi;
7. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi.
8. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu.

9. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Manajemen Sistem SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berkualitas.
10. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
13. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
14. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

15. Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Penyelenggara SPBE adalah tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibentuk oleh walikota guna meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan audit teknologi informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyusunan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Peraturan Walikota ini bertujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menerapkan SPBE.

## **BAB III**

### **PETA RENCANA SPBE**

#### **Pasal 3**

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2023-2027, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Kota Madiun dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;

- e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Peta Rencana dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE;
  - b. perubahan rencana strategis;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Walikota.

#### **BAB IV**

#### **SISTEMATIKA**

##### **Pasal 4**

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Metodologi dan Referensi Arsitektur SPBE;
  - c. Bab III : Peta Rencana SPBE; dan
  - d. Bab IV : Rencana Anggaran;
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### **BAB V**

#### **PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Peta Rencana SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan Peta Rencana SPBE dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Madiun.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 11 Juli 2022

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 11 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2022 NOMOR 33/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR : 33 TAHUN 2022  
TANGGAL : 11 Juli 2022

---

## **PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOTA MADIUN TAHUN 2023–2027**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peta rencana merupakan penjabaran dari proses perencanaan penyelenggaraan SPBE. Pada Pemerintahan Daerah melalui serangkaian program dan/atau kegiatan yang dilakukan beserta indikator pencapaian target dan penanggung jawab target tersebut sehingga penyelenggaraan SPBE menjadi terarah dan terpadu. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah. Dimana peta rencana SPBE ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Peta Rencana SPBE Nasional sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE. Dalam pelaksanaan pelaksanaan peta rencana ini perlu dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Substansi Peta Rencana SPBE terdiri atas:

1. sasaran program/kegiatan, merupakan Sasaran Program/Kegiatan dari dokumen Strategis Instansi Pusat yakni Rencana Strategis dan Pemerintah Daerah yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. inisiatif strategis arsitektur SPBE, Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sesuai dengan tematik layanan digital;
3. muatan peta rencana, yang terdiri atas 7 (tujuh) muatan yaitu:
  - a) Tata Kelola SPBE;
  - b) Manajemen SPBE;
  - c) Layanan;
  - d) Aplikasi;
  - e) Infrastruktur TIK;
  - f) Keamanan;
  - g) Audit TIK.



4. Program, merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung inisiatif strategis.
5. Kegiatan, merupakan rincian aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan.

Pelaksanaan peta rencana tidak terlepas dari penyusunan rencana strategis. Dimana rencana strategis berisi pedoman umum terhadap pelaksanaan pembangunan SPBE, yang selanjutnya perlu diuraikan lebih rinci ke dalam Peta Rencana SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah. Rencana strategis diuraikan menurut area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan SDM SPBE sebagaimana tertuang dalam Tabel Rencana Strategis.

#### 1. Tahap Pembangunan Fondasi SPBE

Tahapan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 2018-2022 dengan fokus pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini untuk Pemerintah Daerah ditandai dengan tersedianya:

- a) Sistem informasi Arsitektur SPBE, Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- b) Tim Koordinasi SPBE Nasional, tim koordinasi Instansi Pusat, dan tim koordinasi Pemerintah Daerah;
- c) Kebijakan meso dan mikro yang mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden ini;
- d) Evaluasi SPBE Nasional dan evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e) Survei kebutuhan dan kepuasan pengguna;
- f) Portal layanan publik, portal administrasi pemerintahan, dan portal data nasional;
- g) Penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
- h) Manajemen Layanan SPBE;

- i) Infrastruktur SPBE;
- j) Sistem keamanan informasi; dan
- k) Standar kompetensi teknis SPBE.

2. Tahap Pengembangan SPBE

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 2023–2025 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan penggunaan layanan SPBE. Capaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

- a) Portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan big data
- b) Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah
- c) Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna
- d) Peningkatan kualitas keamanan informasi
- e) Peningkatan kapasitas SDM SPBE
- f) Pembentukan forum kolaborasi antar PD

Sedangkan untuk inisiatif strategis berisi pedoman umum terhadap pelaksanaan pembangunan SPBE yang mana diuraikan menurut area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan SDM SPBE sebagaimana tertuang dalam Tabel Rencana Strategis yang telah disesuaikan dengan Pemerintah Daerah di Kota Madiun.

Tabel Rencana Strategis SPBE

No.	Inisiatif Strategi	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
<b>A. Tata Kelola</b>				
1	Pembangunan Arsitektur SPBE	Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	2022	Walikota
2	Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah	2022	Walikota
3	Penguatan Kebijakan SPBE	Kebijakan Mikro	2023-2027	Walikota
4	Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE	Evaluasi SPBE	2023-2026	• Walikota
		Audit TIK		• Dinas Komunikasi dan Informatika

<b>B. Layanan SPBE</b>				
5	Survei Pengguna SPBE	Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna	2022-2026	Walikota
6	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	Manajemen Layanan SPBE	2023-2027	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>a. Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>				
7	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2023-2025	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi	Manajemen Keamanan Informasi Teknologi Keamanan Informasi Budaya Keamanan Informasi	2023-2027	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>D. Sumber Daya Manusia SPBE</b>				
9	Promosi Literasi SPBE	Pelatihan dan Sosialisasi	2023-2027	Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota Madiun
10	Peningkatan ASN Penyelenggaraan SPBE	Standar Kompetensi Teknis SPBE Jabatan Fungsional yang terkait SPBE Pelatihan dan Sertifikat Kompetensi Pola Remunerasi Bidang SPBE	2023-2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>•Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>
11	Pembentukan Forum Kolaborasi antar OPD	Kegiatan pertemuan antar PD dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kebutuhan penyelenggaraan SPBE. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan secara virtual.	2023-2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Walikota</li> <li>• Sekretariat Daerah</li> <li>• Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>

## **BAB II**

### **METODOLOGI DAN REFERENSI ARSITEKTUR SPBE**

Pada bab ini menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan Peta Rencana SPBE dan Anggaran Biaya Tiap Kegiatan. Penetapan metodologi dalam rangka penyusunan Peta Rencana SPBE, bertujuan untuk memandu proses penyusunan Peta Rencana SPBE. Adapun alur proses penyusunan Peta Rencana SPBE meliputi proses sebagai berikut:

- 1) Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis;
- 2) Pengkategorian sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- 3) Pengkategorian sesuai Muatan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
- 4) Penentuan Program dan Kegiatan.

- 1) Penentuan Sasaran Program/Kegiatan Dokumen Strategis

Sasaran Program/Kegiatan bersumber dari Dokumen Strategis Perangkat Daerah yang dapat didukung dari realisasi Arsitektur SPBE melalui Inisiatif Strategis. Sehingga, sasaran program/kegiatan tersebut adalah yang berkaitan dengan SPBE. Dokumen strategis yang diacu adalah RPJMD bagi Pemerintah Daerah dan Renstra pada Perangkat Daerah. Penentuan ini mencakup indikator serta target yang telah direncanakan pada Dokumen Strategis. Pengisian indikator beserta dengan target ini diisikan sesuai dengan yang tertera pada dokumen strategis yang diacu.

- 2) Pengkategorian sesuai Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah  
Inisiatif Strategis merupakan Inisiatif strategis yang terdapat pada dokumen Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah sesuai dengan tematik layanan digital. Dalam penyusunan Peta Rencana SPBE Perangkat Daerah, Inisiatif Strategis memungkinkan terdapat lebih dari 1 (satu) di mana setiap Inisiatif Strategis memiliki 7 (tujuh) muatan SPBE yaitu, aplikasi, layanan, tata kelola, manajemen, infrastruktur TIK, keamanan dan Audit TIK.

- 3) Pengkategorian sesuai Muatan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah  
Pengkategorian sesuai muatan Peta Rencana SPBE yang selanjutnya disusun sebagai berikut:

- a) Tata Kelola SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tata Kelola penyelenggaraan SPBE seperti peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, proses bisnis, pemantauan dan evaluasi;

- b) Manajemen SPBE, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan manajemen SPBE sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - c) Layanan, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan layanan seperti penerapan layanan elektronik, integrasi layanan, transformasi layanan konvensional menjadi layanan elektronik;
  - d) Aplikasi, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan aplikasi;
  - e) Infrastruktur TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan infrastruktur;
  - f) Keamanan, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengembangan, integrasi, penerapan, dan pemeliharaan keamanan;
  - g) Audit TIK, berisikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penerapan audit TIK.
- 4) Penentuan Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE nasional. Dalam melakukan pemilihan program/kegiatan SPBE yang diprioritaskan untuk diterapkan dalam hingga Tahun 2027 sesuai dengan penyusunan arsitektur SPBE, terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Efektivitas program;
2. Kelayakan program;
3. Efisiensi program

Pemilihan program/kegiatan merupakan faktor yang penting dalam menentukan program yang akan dipilih dengan memperhatikan kriteria kelayakan dan efisiensi program. Dengan adanya faktor tersebut diharapkan akan menghasilkan prioritas yang lebih realistis, terutama di antara program-program dengan efektivitas yang serupa.

Seperti halnya, apabila terdapat dua program yang memiliki tingkat kepentingan yang sama (memiliki peringkat efektivitas yang sama), maka faktor kelayakan dan efisiensi akan menentukan suatu program memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan program yang lain. Selain itu beberapa faktor lain juga menentukan dalam pemilihan program/kegiatan SPBE, sebagaimana ilustrasi pada Gambar Ilustrasi Pemilihan Program/Kegiatan.



Gambar Ilustrasi Pemilihan Program/Kegiatan

## 2.1 Peta Rencana Tata Kelola SPBE

Peta Rencana Tata Kelola SPBE dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu dalam setiap komponen yang telah dianalisis. Pada Tata Kelola SPBE ini juga dijelaskan Penyelenggara SPBE. Peta Rencana Tata Kelola SPBE terdiri dari:

- Penguatan Kapasitas Pengelolaan SPBE
- Penguatan Kebijakan SPBE
- Penyusunan Kegiatan Tata Kelola SPBE
- Proses dan Dokumen Tata Kelola SPBE
- Peta Rencana Pelaksanaan Penyelenggara SPBE

## 2.2 Peta Rencana Manajemen SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Biokrasi Nomor 59 Tahun 2020, peta rencana Manajemen SPBE dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu dalam setiap komponen yang telah dilakukan analisis. Proses penentuan peta rencana manajemen terdiri dari:

- Analisis paket pekerjaan yang akan dilakukan.
- Analisis *framework*, kebijakan, atau pendekatan tertentu dalam pelaksanaan peta rencana.
- Analisis tahun pengembangan setiap pekerjaan.

### 2.3 Peta Rencana Layanan SPBE

Peta rencana Layanan SPBE didasarkan pada layanan SPBE yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 yang belum terlaksana. Pelaksanaan peta rencana layanan SPBE berkaitan dengan ketersediaan SOP sebagai standar pelayanan atau kegiatan operasional instansi. Sehingga, dengan adanya keterkaitan antara SOP maka hal tersebut berpengaruh pada usulan pembuatan SOP. Kisaran rencana dan anggaran yang dibutuhkan dalam pengadaan SOP layanan disusun berdasarkan kompleksitas penyusunan SOP atau proses yang terjadi dalam suatu kegiatan, sehingga dapat diklasifikasikan dari rendah sampai tinggi.

### 2.4 Peta Rencana Infrastruktur SPBE

Berdasarkan hasil analisis infrastruktur jaringan Pemerintahan Kota Madiun maka dilakukan usulan untuk pengembangan, perbaikan ataupun peremajaan infrastruktur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Usulan infrastruktur yang diberikan meliputi sebagai berikut:

- a) Peta Rencana Jaringan Intra Pemerintah.
- b) Peta Rencana Perangkat Operasional.
- c) Peta Rencana Pengadaan Server dan Pelengkapannya.
- d) Peta Rencana Infrastruktur Lainnya

### 2.5 Peta Rencana Aplikasi SPBE

Berdasarkan aplikasi yang diusulkan untuk menunjang proses bisnis pada setiap PD di Kota Madiun, maka dilakukan penyusunan peta rencana berdasarkan skala prioritas kebutuhan masing-masing PD untuk menentukan implementasi aplikasi yang akan dibangun atau diimplementasikan lebih awal dengan melakukan berbagai pertimbangan. Pada peta rencana aplikasi dilakukan penilaian terhadap masing-masing aplikasi dengan indikator penilaian untuk masing-masing aplikasi yaitu:

- a) Analisis dampak dengan memberikan penilaian atas dampak yang diberikan oleh masing-masing aplikasi terhadap PD. Dampak yang dinilai adalah dampak investasi dan layanan dasar.

- b) *Warren Mcfarlan's Strategic Matrix* merupakan metode dalam menentukan atau memetakan aplikasi atau sistem informasi pada organisasi dalam hal ini masing-masing perangkat daerah yang ada di Kota Madiun.
- c) Potensi integrasi dengan menilai apakah aplikasi yang diusulkan memiliki potensi integrasi dengan PD yang lainnya.

## 2.6 Peta Rencana Keamanan SPBE

Pemerintah Kota Madiun memiliki beberapa permasalahan terkait dengan keamanan sistem informasi seperti serangan virus, peretasan (*hacking*), hingga pencurian data secara manual. Adanya permasalahan tersebut, memberikan kewaspadaan terhadap keamanan SPBE, sehingga terdapat usulan terkait pengamanan sistem informasi pada aspek keamanan sumber daya teknologi informasi, akses kontrol, keamanan sumber daya manusia, *Confidentiality* (kerahasiaan), *Integrity* (keutuhan), *Availability* (ketersediaan akses), *Authentication* (keaslian) dan *Non-Repudiation* (kenirsangkalan).

## 2.7 Peta Rencana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Prioritas pelaksanaan audit TIK di lingkup Pemerintahan Kota Madiun disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan urutan:

- Audit aplikasi SPBE yaitu audit aplikasi sesuai dengan aplikasi pendukung layanan administrasi SPBE, kemudian aplikasi pendukung layanan publik SPBE, dan aplikasi lainnya di audit sesuai dengan urgensi tiap PD.
- Audit infrastruktur SPBE yaitu audit server, dan audit jaringan
- Audit keamanan SPBE diutamakan audit keamanan infrastruktur dan audit keamanan aplikasi khusus yang mendukung layanan publik SPBE, karena aplikasi merupakan komponen penting dalam penilaian indeks SPBE dengan menggunakan Permen PAN-RB No 59 Tahun 2020.



## 2.8 Rencana Anggaran

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah. Setiap pemerintah daerah menyusun peta rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah daerah dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. Guna keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Tujuan identifikasi rencana dan anggaran ini adalah untuk menunjukkan kisaran anggaran pada masing-masing kegiatan yang akan dilakukan:

- Analisis paket pekerjaan
- Analisis anggaran berdasarkan referensi
- Analisis anggaran masing-masing paket pekerjaan
- Analisis Anggaran masing-masing PD

### **BAB III**

#### **PETA RENCANA SPBE**

Peta Rencana SPBE setiap paket pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun disusun untuk 5 (lima) tahun mendatang dari Tahun 2023 hingga 2027. Setiap prioritas setiap domain memiliki standar masing-masing yang digunakan. Penjelasan masing-masing standar dapat dijelaskan pada sub bab di bawah ini.

#### 3.1 Peta Rencana Tata Kelola SPBE

Salah satu tujuan dari SPBE ini yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Beberapa cara dalam mencapai tujuan tersebut antara lain dengan membentuk tim koordinasi SPBE, adanya pembangunan Arsitektur SPBE, proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi, dan adanya penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu. Tata Kelola SPBE Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Tata Kelola juga didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, guna melihat sejauh mana tingkat kematangan yang diperoleh. Dari kondisi eksisting tingkat kematangan, akan menjadi usulan prioritas pertahunnya.

##### 3.1.1 Penguatan Kapasitas Pengelolaan SPBE

Penguatan kapasitas pengelolaan SPBE terdiri dari pembagian Peran dan tanggung jawab pengelola TI, pembentukan *service desk* serta peningkatan kompetensi SDM TI.

###### 1) Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Pengelola TI

Pada bagian ini akan menjelaskan hasil analisis usulan pembagian peran terhadap pengelolaan TI. Usulan ini didapatkan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 dan Peta Okupasi TIK. Dimana pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menyatakan bahwa kompetensi teknis SPBE yang diharapkan dimiliki oleh pegawai ASN yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE antara lain dalam bidang perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal, dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif dan responsif. Selanjutnya, kompetensi tersebut akan dipetakan dengan SI/ TI yang ada pada Peta Okupasi TIK. Berikut adalah hasil usulan pembagian peran terhadap pengelolaan TI yang dapat dilihat pada Tabel Hasil Pembagian Usulan Peran Pengelola TI.

Tabel Hasil Pembagian Usulan Peran Pengelola TI

Jenis SI/TI	Pembuat Sistem	Operator Sistem	Pemelihara Sistem	Pengembang Sistem
Perangkat keras dan Piranti Digital	Setiap PD	Setiap PD	Setiap PD	Setiap PD
Perangkat lunak dan pemrograman	Dinas Komunikasi dan Informatika	Setiap PD	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Jaringan LAN (internal OPD di belakang router)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Setiap PD (Dengan bantuan pihak ketiga)	Setiap PD (Dengan bantuan pihak ketiga)	PD (Wajib Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika)
Server	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

2) Membangun Sistem dan Layanan *Service Desk*

Pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif merupakan tanggung jawab setiap PD terhadap layanan yang dimiliki masing-masing. Kondisi eksisting di Kota Madiun masih banyak PD yang belum memiliki *service/help desk* guna menangani insiden dalam layanan. Untuk itu diusulkan dua jenis *service desk* yang ada di Pemerintah Kota Madiun.

1. *Service Desk* Tier 1

*Service desk tier* 1 berfungsi untuk menangani masalah yang bersifat dasar. *Service desk* ini digunakan untuk dukungan masalah tingkat dasar seperti memecahkan masalah penggunaan dan memenuhi permintaan *service desk* yang memerlukan keterlibatan TI. Jika tidak ada solusi yang tersedia, personil *tier* 1 mengeskalisasi insiden ke tingkat yang lebih tinggi. Personil yang dibutuhkan pada tier 1 adalah personil teknis tingkat bawah yang dilatih untuk memecahkan masalah yang diketahui dan untuk memenuhi permintaan layanan dengan mengikuti SOP atau panduan. *Service desk tier* 1 harus ada di setiap PD di Pemerintah Kota Madiun.

2. *Service Desk Tier 2*

*Service desk tier 2* ini berfungsi untuk dukungan teknis yang mendalam. Personil yang dibutuhkan pada tier 2 adalah teknisi yang berpengalaman dan berpengetahuan menilai masalah dan memberikan solusi untuk masalah yang tidak dapat ditangani oleh tingkat 1 serta personel dengan pengetahuan mendalam tentang produk atau layanan. *Service desk tier 2* harus diadakan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Madiun. Berikut rekomendasi pengadaan *Service Desk* untuk PD Kota Madiun. Detail data dapat dilihat pada Tabel Rekomendasi Usulan *Service Desk*.

Tabel Rekomendasi Usulan *Service Desk*

Kode PD	Nama PD	Target Pelaksanaan <i>Service Desk 1</i>
1	Bagian Organisasi	2023
2	Bagian Hukum	2023
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	2024
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2023
5	Bagian Umum	2023
6	Bagian Pemerintahan	2023
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2025
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2024
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2025
10	Badan Pendapatan Daerah	2023
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2024
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2023

13	Inspektorat Daerah	2023
14	Sekretariat DPRD	2024
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2027
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2023
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2024
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2024
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	2023
20	Dinas Pendidikan	2024
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	2023
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2023
24	Dinas Perhubungan	2023
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	2026
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2026
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	2023
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2026
29	Dinas Perdagangan	2023
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2023

31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	2027
32	Kecamatan Manguharjo	2023
33	Kecamatan Kartoharjo	2023
34	Puskesmas Manguharjo	2023
35	Puskesmas Sukosari	2026

### 3) Peningkatan Kompetensi SDM TI

Strategi peningkatan kompetensi SDM TI ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM TIK yang dimiliki dari setiap PD di Pemerintah Kota Madiun, melalui program kegiatan training dan sertifikasi bidang TI. Penjabaran secara detail akan dijelaskan secara rinci pada bagian Pengadaan SDM Penyelenggara SPBE.

#### 3.1.2 Penguatan Kebijakan SPBE

Penguatan kebijakan SPBE ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dengan tetap berlandaskan hukum yang berlaku. Rekomendasi pembuatan kebijakan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan nilai indeks pada domain kebijakan SPBE yang tertuang pada Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE Tahun 2021 Kota Madiun. Rekomendasi penguatan kebijakan SPBE di Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada Tabel Peta Rencana Penguatan Kebijakan SPBE.

Tabel Peta Rencana Penguatan Kebijakan SPBE

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun Pelaksanaan
1	Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 1 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 2. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE yang termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kedua Pasal 6, namun Pemerintah Kota Madiun masih memiliki kelemahan untuk substansi Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE dimana Peraturan untuk penyusunan arsitektur hanya sebagian domain saja sehingga hanya dapat mencapai level 2.	Saran perbaikan yang dapat dilakukan adalah melakukan reviu terkait kebijakan internal Arsitektur SPBE yaitu pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Kemudian kebijakan internal direviu dan dievaluasi secara periodik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	Segera melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pada Perwal yang telah dimiliki atau melakukan reviu pada Perwal yang ada saat ini	2023

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun Pelaksanaan
2	Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 2 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 3. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE yang termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Ketiga Pasal 7, namun Pemerintah Kota Madiun memiliki kelemahan untuk substansi Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE, dimana belum menggambarkan Peta Rencana SPBE yang mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap yaitu peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK.	Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini adalah dengan melakukan reviu atau perubahan terhadap Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK). Selanjutnya kebijakan internal tersebut juga mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional. Kemudian kebijakan internal direviu dan dievaluasi secara periodik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	Melakukan reviu terhadap perwal/perbup yang sudah berlaku sehingga dapat mengakomodir perubahan yang diperlukan. Misalnya memenuhi semua domain arsitektur SPBE	2023



No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun Pelaksanaan
3	Manajemen Data	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 3 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 2. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kebijakan internal terkait Manajemen Data yang termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Keenam Pasal 10-12, namun tingkat kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data Pemerintah Kota Madiun tidak menggambarkan adanya serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas data.	Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini adalah dengan melakukan reviu atau perubahan terhadap Kebijakan Internal Manajemen Data Pemerintah Daerah yang telah menerapkan serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas data. Selanjutnya Pemerintah Kota Madiun dapat menerapkan inovasi Satu Data Kota Madiun agar seluruh data dapat saling terintegrasi ke dalam sebuah platform	Melakukan reviu terhadap Perwal yang telah menerapkan serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas data, serta melaksanakan inovasi Satu Data Kota Madiun.	2023

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun Pelaksanaan
4	Pembangunan Aplikasi	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 4 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 3. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi yang termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kedelapan Pasal 23 dan 24, namun tingkat kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE belum menggambarkan dokumen pelaksanaan penyusunan Aplikasi lengkap dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pemeliharaan yang sesuai dengan SOP	Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini adalah dengan melakukan reuiu atau perubahan terhadap Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi Pemerintah Daerah secara lengkap mulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pemeliharaan yang sesuai dengan SOP.	Melakukan <i>review</i> terhadap perwal yang sudah berlaku sehingga dapat mengakomodir perubahan yang diperlukan. Misalnya memenuhi pelaksanaan penyusunan Aplikasi lengkap dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pemeliharaan yang sesuai dengan SOP.	2023

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun Pelaksanaan
5	Layanan Pusat Data	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 5 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 3. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Paragraf 2 Pasal 14 - 17, namun data dukung yang dilampirkan tidak ditemukan adanya dokumentasi tentang Pusat Data/Data Center fisik. data dukung yang dilampirkan adalah manajemen keamanan informasi, bukanlah penerapan layanan pusat data sehingga data dukung tidak relevan.	Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini untuk mencapai tingkat kematangan di atas 3, yaitu hal yang harus dilakukan adalah melakukan reviu kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/ perangkat daerah di Pemerintah Daerah dan interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional dan pelaksanaan evaluasi secara periodik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	Melakukan reviu terhadap perbub/perwal yang sudah berlaku sehingga dapat mengakomodir perubahan yang diperlukan. Misalnya melakukan interkoneksi layanan pusat data pemerintah daerah dengan layanan pusat data nasional	2023

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun Pelaksanaan
6	Layanan Jaringan Intra Pemerintah	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 6 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 3. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Paragraf 3 Pasal 18 - 21. Pemerintah Kota Madiun telah mengimplementasikan jaringan intra pemerintah yang disediakan terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika.	Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini untuk mencapai tingkat kematangan di atas 3, maka kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus direviu dan dievaluasi secara periodik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru sehingga di dalam kebijakan baru tersebut memuat Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah dan interkoneksi Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Pemerintah Daerah lain.	Melakukan reviu terhadap perwal yang sudah berlaku sehingga dapat mengakomodir perubahan yang diperlukan. Misalnya melakukan keterhubungan dan akses jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya	2023

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun Pelaksanaan
7	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 7 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 3. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Paragraf 4 Pasal 22. Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dimana pada bukti dukung terlampir integrasi masih belum terlihat dilakukan secara menyeluruh (hanya aplikasi dengan inaproc)	Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini untuk mencapai tingkat kematangan di atas 3, yaitu harus dilakukan integrasi secara menyeluruh dan dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan baru	Melakukan reviu terhadap perwal yang sudah berlaku sehingga dapat mengakomodir perubahan yang diperlukan. Misalnya melakukan keterhubungan antara sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah dengan sistem penghubung layanan pemerintah, mengintegrasikan secara menyeluruh aplikasi yang saling berkaitan.	2023

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun Pelaksanaan
8	Manajemen Keamanan Informasi	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 8 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 3. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi yang termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bagian Kesembilan Pasal 25 dan 26. Pemerintah Kota Madiun belum melaksanakan penerapan manajemen keamanan informasi, dimana tidak ditemukan adanya perencanaan matang yang dituangkan dalam RKPD atau Renstra terkait dengan manajemen selain itu beberapa bukti dukung yang disampaikan tidak relevan	Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini untuk mencapai tingkat kematangan di atas 3 yaitu harus melakukan revisi atau perbaikan kebijakan internal dan melakukan perencanaan yang matang yang dituangkan dalam RKPD atau Renstra terkait dengan manajemen sehingga dapat memenuhi semua cakupan manajemen keamanan informasi	Mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi) serta penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemerintah Daerah. Selanjutnya melakukan revisi atau perbaikan kebijakan internal dan melakukan perencanaan yang matang yang dituangkan dalam RKPD atau Renstra.	2023

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun Pelaksanaan
9	Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 8 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 9. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi yang termuat dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Bab VI. Pelaksanaan audit keamanan pada Pemkot Madiun dibuktikan dengan pelaksanaan internal audit untuk keamanan SPBE yang sesuai dengan sertifikat ISO 27001, namun pelaksanaan audit aplikasi SPBE dimana kegiatan audit ini belum dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti pada Renstra.	Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini untuk mencapai tingkat kematangan di atas 3, yaitu dengan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan audit aplikasi SPBE secara rinci ke dalam dokumen perencanaan seperti pada Renstra	Dokumentasikan pelaksanaan kegiatan audit aplikasi SPBE secara rinci ke dalam dokumen perencanaan seperti pada Renstra	2023

No	Domain	Indikator	Usulan	Saran Perbaikan	Tahun Pelaksanaan
10	Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah	Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada Indikator 10 ini Pemerintah Kota Madiun mencapai level nilai kematangan 3. Saat ini Pemerintah Kota Madiun telah memiliki tim koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE, yang ditunjukkan pada dokumen: 1. Keputusan Walikota No 180.45-401.021/129/2021 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Madiun 2. Keputusan Walikota Nomor 180.45 401.021/145/2021 Tahun 2021 tentang Tim Asesor Internal Pemerintah Kota Madiun. Dari hasil review didapatkan bahwa bukti dukung belum dapat menunjukkan adanya pemenuhan tugas dan fungsi yang tertera pada SK Tim Koordinasi secara menyeluruh. Selain itu berdasarkan data dukung walaupun kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Pemkot Madiun telah dilaksanakan sesuai perencanaan namun Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE tidak dibentuk secara formal.	Saran dan perbaikan yang dilakukan pada indikator ini untuk mencapai tingkat kematangan di atas 3, yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap kebijakan terkait untuk menambahkan informasi terkait tugas dan fungsi secara menyeluruh. Selain itu juga diperlukan peninjauan kembali terkait Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE yang dipaparkan dengan jelas dan dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah	Melakukan perbaikan terhadap kebijakan terkait untuk menambahkan informasi terkait tugas dan fungsi secara menyeluruh. Selain itu juga diperlukan peninjauan kembali terkait Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE yang dipaparkan dengan jelas dan dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah	2023



<b>No</b>	<b>Domain</b>	<b>Indikator</b>	<b>Usulan</b>	<b>Saran Perbaikan</b>	<b>Tahun Pelaksanaan</b>
		Belum ada bukti dukung yang menunjukkan kolaborasi oleh tim yang dibentuk secara formal. Selain itu kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE tidak/belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah (kolaborasi dibentuk berdasarkan adanya kegiatan bersama).			

### 3.1.3 Peta Rencana Penyelenggara SPBE

Setelah dilakukan analisis terhadap kompetensi SDM TIK yang dibutuhkan untuk SPBE, maka tahap selanjutnya yaitu perlu adanya pengusulan pengadaan SDM TIK yang harus ada pada setiap PD di Pemerintah Kota Madiun.

#### 1. Tim Koordinasi SPBE

Sesuai dari hasil kondisi eksisting, pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kota Madiun untuk indikator tingkat kematangan kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah mendapatkan nilai 3. Justifikasi Tim Koordinasi SPBE telah terbentuk serta adanya kolaborasi Penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun. Namun bukti dukung belum dapat menunjukkan adanya pemenuhan tugas dan fungsi yang tertera pada SK Tim Koordinasi secara menyeluruh. Sehingga untuk meningkatkan nilai kematangan tim koordinasi SPBE Pemerintah Kota Madiun perlu jelaskan berdasarkan LHE pada aspek kebijakan kematangan Tim koordinasi SPBE berapa. Kemudian untuk meningkatkan/mempertahankan nilai tersebut perlu dilakukan reviu dan inovasi terhadap kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE. Rekomendasi usulan perbaikan dalam penyusunan tim koordinasi SPBE berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

#### 2. Peta Rencana Pengadaan SDM SPBE

Setelah melakukan analisis kompetensi SDM TIK yang dibutuhkan untuk SPBE, maka selanjutnya perlu dilakukan pengusulan penanggung jawab dan pengadaan SDM TIK yang harus ada di setiap PD di lingkup Pemerintah Kota Madiun.

##### a) Kompetensi Perencanaan SPBE

Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 rencana SPBE dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penanggung jawab terkait perencanaan SPBE di Pemerintah Kota Madiun adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun. Untuk perencanaan kompetensi SDM maka dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

b) Rekeyasa Proses Bisnis Pemerintahan

Rekeyasa proses bisnis pemerintahan dikelola oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah yaitu menyusun pedoman tata naskah dinas, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja. Oleh karena itu, Kepala Sekretariat Bagian Organisasi dan Kepala Sekretariat Daerah harus memiliki kompetensi terkait rekeyasa proses bisnis pemerintahan dalam melaksanakan SPBE. Dinas Komunikasi dan Informatika juga berkoordinasi dan berperan dalam menentukan prosedur pendokumentasian terkait proses bisnis pemerintahan.

3. Pengelolaan TIK yang Terintegrasi, Aman, dan Andal

Pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal merupakan tanggung jawab dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun pelaksanaan dari pengelolaan TIK haruslah dilakukan oleh semua PD di Pemerintahan Kota Madiun. Untuk kedepannya pemenuhan kebutuhan pengelolaan sistem digital akan meningkat, maka diperlukan beberapa kompetensi tambahan dalam pengelolaan TIK. Dalam hal ini penambahan kompetensi tidak sama dengan penambahan pegawai, karena bisa saja satu pegawai menguasai beberapa kompetensi TIK yang diperlukan. Sedangkan untuk PD yang memiliki proses bisnis kompleks dan mengampu beberapa urusan pemerintahan, sehingga memiliki program atau kegiatan yang membutuhkan beberapa aplikasi dalam membantu operasional, terdapat 9 kompetensi yang harus dimiliki yaitu Teknisi Komputer, Teknisi & Admin Jaringan, *Service/Help Desk*, Admin *Website*, Admin *Database*, Analis Sistem & Desain, *Programmer*, Operator/*User* Sistem, Dan Admin Keamanan TI. Untuk usulan kompetensi lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Usulan Kompetensi SDM TIK.

Tabel Usulan Kompetensi SDM TIK

Kode OPD	Nama OPD	Usulan SDM TIK	Tahun Pelaksanaan
1	Bagian Organisasi	<i>Service/ Help Desk</i>	2024
		Operator/User Sistem	2025
		Teknisi Komputer	2026
2	Bagian Hukum	<i>Service/ Help Desk</i>	2025
		Teknisi Komputer	2026
3	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan	Teknisi Komputer	2026
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	<i>Service/ Help Desk</i>	2025
		Admin Website	2026
5	Bagian Umum	<i>Service/ Help Desk</i>	2024
		Teknisi Komputer	2025
		Admin Website	2026
6	Bagian Pemerintahan	<i>Service/ Help Desk</i>	2023
		Operator/User Sistem	2024
		Teknisi Komputer	2025
		Admin Website	2026
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak Ada Usulan SDM TIK	-
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Teknisi Komputer	2023
		Admin Database	2024
		<i>Service/ Help Desk</i>	2024
		Analisis Sistem dan Desain	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak Ada Usulan SDM TIK	-
10	Badan Pendapatan Daerah	<i>Programmer</i>	2027
		<i>Service/ Help Desk</i>	2027
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Admin Keamanan TI	2023
		Teknisi Komputer	2024
		Admin Website	2024
		Admin Database	2024

		<i>Service/ Help Desk</i>	2025
		Teknisi dan Admin Jaringan	2025
		Analisis Sistem dan Desain	2026
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<i>Service/ Help Desk</i>	2023
		Operator/ User Sistem	2024
		Teknisi Komputer	2025
		Admin Website	2026
13	Inspektorat Daerah	<i>Service/ Help Desk</i>	2024
		Teknisi Komputer	2025
		Admin Website	2026
		Prakom ( <i>programmer</i> )	2023
		(SDM APIP Existing)	2023
		(SDM APIP Existing)	2024
		(SDM APIP Existing)	2025
		(SDM APIP Existing)	2026
		(SDM APIP Existing)	2027
14	Sekretariat DPRD	<i>Service/ Help Desk</i>	2024
		Operator/ User Sistem	2025
		Teknisi Komputer	2026
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tidak Ada Usulan SDM TIK	-
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<i>Service/ Help Desk</i>	2024
		Teknisi Komputer	2025
		Admin Website	2026
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<i>Service/ Help Desk</i>	2023
		Operator/ User Sistem	2024
		Teknisi Komputer	2025
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<i>Service/ Help Desk</i>	2025
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	<i>Service/ Help Desk</i>	2025
		Teknisi Komputer	2026
20	Dinas Pendidikan	<i>Programmer</i>	2023
		Teknisi Komputer	2023

		Admin <i>Database</i>	2024
		<i>Service/ Help Desk</i>	2024
		Teknisi dan Admin Jaringan	2025
		Analisis Sistem dan Desain	2026
		Admin Keamanan TI	2027
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<i>Service/ Help Desk</i>	2025
		Operator/ <i>User Sistem</i>	2026
22	Dinas Lingkungan Hidup	<i>Service/ Help Desk</i>	2025
		Teknisi Komputer	2026
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<i>Programmer</i>	2023
		Admin Keamanan TI	2024
		Operator/ <i>User Sistem</i>	2024
		Admin <i>Database</i>	2025
		<i>Service/ Help Desk</i>	2026
		Teknisi dan Admin Jaringan	2023
		Analisis Sistem dan Desain	2027
24	Dinas Perhubungan	<i>Programmer</i>	2023
		Teknisi Komputer	2023
		Admin <i>Database</i>	2024
		<i>Service/ Help Desk</i>	2024
		Teknisi dan Admin Jaringan	2025
		Analisis Sistem dan Desain	2026
		Operator/ <i>User Sistem</i>	2027
		Admin Keamanan TI	2027
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tidak Ada Usulan SDM TIK	-
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<i>Programmer</i>	2024
		Teknisi Komputer	2024
		Teknisi dan Admin Jaringan	2025
		Analisis Sistem dan Desain	2026
		Admin Keamanan TI	2027

27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	<i>Service/ Help Desk</i>	2024
		Teknisi Komputer	2025
		Admin Website	2026
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak Ada Usulan SDM TIK	-
29	Dinas Perdagangan	<i>Service/ Help Desk</i>	2024
		Operator/User Sistem	2025
		Teknisi Komputer	2026
		Admin Website	2027
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	<i>Service/ Help Desk</i>	2026
		Teknisi Komputer	2027
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Tidak Ada Usulan SDM TIK	-
32	Kecamatan Manguharjo	<i>Service/ Help Desk</i>	2025
		Operator/User Sistem	2026
33	Kecamatan Kartoharjo	<i>Service/ Help Desk</i>	2025
		Operator/User Sistem	2026
		Teknisi Komputer	2027
		Admin dan teknisi jaringan	2023
34	Puskesmas Manguharjo	<i>Service/ Help Desk</i>	2027
		Operator/User Sistem	2027
35	Puskesmas Sukosari	Operator/User Sistem	2026
		Teknisi Komputer	2027

### 3. Analisis Kebutuhan Training SDM

Analisis kebutuhan training SDM merupakan hal yang dilakukan untuk mewujudkan SDM TIK yang berpengalaman dalam proses penyelenggaraan SPBE. Maka sangat diperlukan kegiatan guna meningkatkan kualitas SDM TIK yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kompetensi SDM TIK yang dimiliki PD. Berdasarkan kondisi eksisting yang dimiliki Pemerintah Kota Madiun, SDM TIK pada tiap PD masih sedikit yang telah mengikuti *training* sesuai dengan bidang TIK. Dari kondisi tersebut, diusulkan pengadaan training dari kompetensi SPBE. Jenis training dan target SDM TIK yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel Prioritas Usulan Kebutuhan Training SDM.



Tabel Prioritas Usulan Kebutuhan Training SDM

Kompetensi	Detail	Jenis Training	Target SDM	Tahun Pelaksanaan
Perencanaan SPBE		Sertifikasi Tata Kelola & Manajemen TI (ITIL, COBIT, CGEIT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>• Semua Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>• Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>	2023
	Manajemen Proyek TI	Sertifikasi Manajemen Proyek (PMP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>• Semua Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>• Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> </ul>	2023
	Arsitektur Teknologi Informasi dan Korporasi  Perencanaan Strategis	Sertifikasi <i>Enterprise Architecture</i> (TOGAF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>• Semua Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>• Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> </ul>	2023
	Manajemen Pengadaan Investasi TI	Sertifikasi Manajemen Investasi Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>• Kepala Badan Pendapatan Daerah</li> </ul>	2025

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah</li> <li>• Semua Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>		
	Pengukuran Kinerja TI (Monev dan Audit)	Sertifikasi Evaluasi dan Audit SI (CISA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat</li> <li>• Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik</li> </ul>	2025	
Rekayasa Proses Bisnis Pemerintahan	Manajemen Proses Bisnis	Sertifikasi <i>Business Process Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua Kepala Dinas/Bagian/Badan</li> <li>• Analisis Sistem</li> <li>• Analisis Proses Bisnis</li> </ul>	2023	
	Rekayasa Proses Bisnis	Sertifikasi <i>Business Process Re-Engineering</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua Kepala Dinas/Bagian/Badan</li> <li>• Analisis Sistem</li> <li>• Analisis Proses Bisnis</li> </ul>	2023	
	Arsitektur Teknologi Informasi dan Korporasi	Sertifikasi <i>Enterprise Architecture</i> (TOGAF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>• Semua Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>• Kepala Bagian Organisasi</li> </ul>	2024	
	Rekayasa Proses Bisnis Pemerintahan	Manajemen Proses Bisnis	Sertifikasi <i>Business Process Management</i>		2023
		Rekayasa Proses Bisnis	Sertifikasi <i>Business Process Re-Engineering</i>		2023

Pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal	Perangkat keras dan piranti digital	Sertifikasi Teknisi Komputer:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> <li>• Teknisi di setiap PD</li> </ul>	2023
		Sistem Operasi		
		Jaringan		
		<i>Hardware</i>		
		<i>Troubleshooting</i> masalah general pada komputer		
	Pemrograman	Sertifikasi <i>Programmer</i> (MCSE, MCPD, OCA, OCP)	<i>Programmer</i> pada masing-masing PD	2023
	Teknologi <i>Mobile</i>	Sertifikasi IoT	<i>Programmer</i> pada masing-masing PD	2026
	Sistem Manajemen Data	Sertifikasi Analisis dan Desain Basis Data	Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Data	2026
Sertifikasi Administrasi Basis Data (MCDBA, OCM)				
Sertifikasi <i>Big Data Analyst</i>				
Sertifikasi Pengolahan Data				

		Sertifikasi Integrasi Data	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Programmer pada masing-masing PD	2026
		Sertifikasi Ilmu Statistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Data pada masing-masing PD</li> <li>• Seksi Statistik Sektoral</li> </ul>	2025
		<i>Sertifikasi Geographic Information System</i>	• Kepala dan Anggota Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	2026
		<i>Sertifikasi Artificial Intelligence</i>	• <i>Programmer</i> dan Administrator Data pada masing-masing PD	2027
	Infrastruktur dan Jaringan	Sertifikasi Desain Jaringan Komputer (CCDA, CCDP)	Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	2024
		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer (CCNA, CCIP, CCCIE)	Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	2023

	Keamanan Teknologi Informasi dan Kepatuhan	Sertifikasi Manajemen Keamanan Informasi (Indeks KAMI, CISM, CISSP, CCSP, ISO 27001)	Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	2027
		Sertifikasi Teknis Keamanan Informasi ( <i>Hacking</i> , Enkripsi, Dekripsi, <i>Recovery</i> , dan Forensik Data)	Kepala dan Anggota Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	2023
Pengelolaan Layanan yang Inovatif, adaptif, dan responsif	Sistem Manajemen Layanan TI ( <i>Service Desk</i> )	Sertifikasi <i>Human</i> di Era Digital	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2023
		Sertifikasi <i>Service Desk</i>	<i>Service Desk</i> Tier 1	2023
			<i>Service Desk</i> Tier 2	
		Sertifikasi <i>Web Content Management and Social Media</i>	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2023
	Sertifikasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Service Desk</i> Tier 1</li> <li>• <i>Service Desk</i> Tier 2</li> </ul>	2023	
	Sistem Manajemen Fasilitas TI	Sertifikasi ITIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>• Kepala Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik</li> <li>• Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</li> </ul>	2025
Sertifikasi <i>Cloud Computing</i>		Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian	2026	

		Sertifikasi Administrasi <i>Server</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>	2026
		Sertifikasi <i>Data Center Technical Support</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>	2025
		Sertifikasi Administrasi Jaringan Komputer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Subkoordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>	2026
	Multimedia	Sertifikasi Desain Grafis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik</li> </ul>	2023
		Sertifikasi Multimedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>	2023

### 3.2 Peta Rencana Manajemen SPBE

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai usulan prioritas untuk setiap manajemen SPBE. Usulan tersebut berdasarkan dari analisis gap dan bertujuan untuk menjadikan kondisi manajemen SPBE yang ada saat ini mampu untuk mencapai kondisi yang ideal. Usulan-usulan diambil dari beberapa *best practice* dan peraturan-peraturan terkait.

Tabel Peta Rencana Manajemen SPBE

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
<b>A. Manajemen Risiko SPBE</b>								
<b>Referensi Hukum: Peraturan Menteri RB 5/2020, ISO 31000</b>								
1	Penyusunan Dokumen Pedoman Manajemen Risiko SPBE	Penyusunan Dokumen Pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi penetapan konteks, penilaian risiko (identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko)	Inspektorat Seluruh PD	v				
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Manajemen Risiko SPBE	Pemantauan Implementasi Kebijakan, Pedoman, Panduan, Instruksi Kerja terkait Risiko SPBE	Inspektorat		v	v	v	v
3	Penentuan struktur pelaksanaan kegiatan Manajemen Risiko SPBE	Identifikasi rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen risiko yang termuat dalam renstra/RKPD Perangkat Daerah	Inspektorat	v	v	v	v	v
4	Pelaksanaan Komunikasi dan Konsultasi	Penerapan Manajemen Risiko melalui komunikasi dan konsultasi dengan mengagendakan rapat berkala, rapat insidental, dan FGD	Inspektorat	v	v	v	v	v
5	Penetapan Konteks Risiko SPBE	Inventarisasi Informasi Umum Penerapan Manajemen Risiko (Jika terdapat perubahan ruang lingkup risiko, maka kegiatan dapat disesuaikan setiap tahunnya)	Inspektorat	v				

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
		Identifikasi Sasaran SPBE dengan menguraikan sasaran UPR SPBE, sasaran SPBE, indikator kinerja SPBE dan target kinerja SPBE (Jika terdapat perubahan ruang lingkup risiko, maka kegiatan dapat disesuaikan setiap tahunnya)	Inspektorat	v				
		Penentuan Struktur Pelaksana Manajemen Risiko SPBE dengan menguraikan unit pemilik risiko SPBE, Pemilik Risiko SPBE, Koordinator Risiko SPBE, dan Pengelola Risiko SPBE (Jika terdapat perubahan ruang lingkup risiko, maka kegiatan dapat disesuaikan setiap tahunnya)	Inspektorat	v				
		Identifikasi Pemangku Kepentingan meliputi unit kerja internal, unit kerja eksternal, instansi pemerintah atau non instansi pemerintah (Jika terdapat perubahan ruang lingkup risiko, maka kegiatan dapat disesuaikan setiap tahunnya)	Inspektorat	v				
		Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Manajemen Risiko (Jika terdapat perubahan ruang lingkup risiko, maka kegiatan dapat disesuaikan setiap tahunnya)	Inspektorat	v				
		Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE	Inspektorat	v		v		v



No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
		Penyusun dan Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko SPBE (Jika terdapat perubahan ruang lingkup risiko, maka kegiatan dapat disesuaikan setiap tahunnya)	Inspektorat	v				
6	Penilaian Risiko SPBE	Identifikasi Risiko dengan menguraikan jenis risiko SPBE, Penyebab, kategori, dampak, dan area dampak	Inspektorat	v	v	v	v	v
		Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE	Inspektorat	v	v	v	v	v
		Penetapan Kategori Risiko SPBE	Inspektorat	v	v	v	v	v
		Penetapan Area Dampak Risiko SPBE	Inspektorat	v	v	v	v	v
		Penetapan Kriteria Risiko SPBE	Inspektorat	v	v	v	v	v
		Penentuan Selera Risiko SPBE disesuaikan dengan kompleksitas Risiko SPBE serta konteks internal dan eksternal masing-masing Instansi Pusat dan Daerah	Inspektorat	v	v	v	v	v
		Analisis Risiko SPBE meliputi Sistem Pengendalian, Level Kemungkinan, Level Dampak dan Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE	Inspektorat	v	v	v	v	v
		Evaluasi Risiko SPBE (Penyusunan evaluasi risiko SPBE)	Inspektorat	v	v	v	v	v

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
7	Evaluasi Risiko SPBE	Penyusunan evaluasi risiko SPBE (Pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko SPBE lebih lanjut, serta penentuan prioritas penanganannya)	Inspektorat	v	v	v	v	v
8	Penanganan Risiko SPBE	Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya	Inspektorat	v	v	v	v	v
9	Pemantauan dan Reviu	Pengukuran perubahan tingkat dukungan, kesadaran, dan pemahaman dan pemangku kepentingan terhadap Manajemen Risiko SPBE	Inspektorat	v	v	v	v	v
		Pemutakhiran rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE	Inspektorat	v	v	v	v	v
		Pelaksanaan perbaikan berkelanjutan	Inspektorat	v	v	v	v	v
10	Pencatatan dan Pelaporan	Penyusunan laporan manajemen resiko SPBE secara periodik dan insidental	Inspektorat	v	v	v	v	v
<b>B. Manajemen Keamanan Informasi</b>								
<b>Referensi Hukum: BSSN 4/2020, BSSN 10/2019, ISO 27001, Indeks KAMI</b>								
1	Penyusunan Dokumen Manajemen Keamanan Informasi	Penyusunan dokumen pedoman keamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	v				

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan					
				2023	2024	2025	2026	2027	
2	Pembuatan Kerangka Kerja Keamanan Informasi	Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang meliputi 6 proses aktivitas manajemen keamanan informasi yaitu:	Dinas Komunikasi dan Informatika	v					
		- Penetapan Ruang Lingkup							
		- Penetapan Penanggung jawab							
		- Perencanaan							
		- Dukungan Pengoperasian							
		- Evaluasi Kinerja							
		- Perbaikan berkelanjutan							
Dimana proses tersebut akan ditetapkan oleh Walikota dengan dokumen Surat Keputusan (SK) yang telah dikomunikasikan dan didokumentasikan oleh Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika									
3	Penetapan Ruang Lingkup	Pelaksanaan program kerja SPBE menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan risiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v	v	v

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
4	Penetapan Penanggung Jawab	- Penanggung Jawab Proses Manajemen Keamanan Informasi adalah SEKDA sebagai Koordinator SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	v				
		- Sekda menetapkan menetapkan pelaksana teknis Keamanan SPBE, terdiri atas:						
		1) pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing; dan						
		2) pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.						
5	Perencanaan dan Pelaksanaan	Program Kerja keamanan SPBE dibuat oleh Tim Pelaksana Teknis Keamanan SPBE yaitu:	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v	v
		- Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE dengan melakukan Sosialisasi atau Pelatihan						

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
	Perencanaan dan Pelaksanaan	- Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE dengan melakukan menginventarisasi seluruh aset SPBE, mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v	v
	Perencanaan dan Pelaksanaan	- Peningkatan Keamanan SPBE dengan melakukan menerapkan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, menguji fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v	v
	Perencanaan dan Pelaksanaan	- Penanganan Insiden dengan melakukan mengidentifikasi sumber serangan, menganalisis informasi, memprioritaskan penanganan insiden, mendokumentasi bukti insiden mendokumentasi bukti insiden, memitigasi atau mengurangi dampak risiko	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v	v
	Perencanaan dan Pelaksanaan	Melakukan audit keamanan informasi berdasarkan peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v	v

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
<b>C. Manajemen Data</b>								
<b>Referensi Hukum: Peraturan Bappenas Nomor 16 Tahun 2020, Perpres Nomor 39 Tahun 2019</b>								
1	Pembuatan dokumen pedoman manajemen data pada IPPD	Penyusunan dokumen pedoman manajemen data pada IPPD	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	v				
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Manajemen Data	Pemantauan Implementasi Kebijakan, Pedoman, Panduan, Instruksi Kerja terkait Manajemen Data	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v	v
3	Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah	Spesifikasi data yang terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	v				

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
4	Penyusunan Proses Manajemen Data	- Pengelolaan Arsitektur Data	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	v				
		- Pengelolaan Data Induk						
		- Pengelolaan Data Referensi						
		- Pengelolaan Basis Data						
		- Pengelolaan Kualitas Data						
5	Manajemen Data Induk dan Data Referensi	Pengumpulan data induk oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	v				
		Pemeriksaan data induk dan data referensi	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika					

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
		Penyebarluasan data induk dan data referensi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	v				
			- Dinas Komunikasi dan Informatika					
		Pembaruan Data Induk dan Data Referensi	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	v	v	v	v	v
			- Dinas Komunikasi dan Informatika					
6	Manajemen Basis Data	Penyimpanan data pada pusat data nasional	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	v	v	v	v	v
			- Dinas Komunikasi dan Informatika					



No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
7	Manajemen Kualitas Data	Perencanaan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v	v
<b>D. Manajemen Aset TIK</b>								
<b>Referensi Hukum: Perpres Nomor 95 Tahun 2018, ITIL</b>								
1	Proses Pengelolaan Aset TIK mencakup (Perencanaan, Pengadaan, perawatan dan penghapusan Aset TIK)	Menginventarisasi aset TIK yang mencakup: - perangkat lunak - perangkat keras, - data dan informasi, - infrastruktur, - SDM TIK, - lisensi, - SOP TIK, - <i>outsorce services</i> , - <i>IT asset register</i> .	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v	v

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
2	Perencanaan dokumen pedoman Aset TIK	Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	v				
			- Dinas Komunikasi dan Informatika					
3	Evaluasi dan Monitoring pedoman pengadaan aset Tik	Penyusunan laporan pengadaan aset Tik	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	v	v	v	v	v
			- Dinas Komunikasi dan Informatika					
4	Evaluasi dan Monitoring pedoman penghapusan Aset TIK	Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	v	v	v	v	v
			- Dinas Komunikasi dan Informatika					

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
<b>E. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE</b>								
<b>Referensi Hukum: Perpres Nomor 59 Tahun 2018, Permenpan Nomor 59 Tahun 2021, Permenkominfo Nomor 9 Tahun 2021</b>								
1	Perencanaan Kegiatan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	Analisis kompetensi SDM SPBE yang mencakup:	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Dinas Komunikasi dan Informatika - Bagian Organisasi	v	v	v	v	v
		- Proses Bisnis Pemerintahan						
		- Arsitektur SPBE Data dan Informasi						
		- Keamanan SPBE						
		- Aplikasi SPBE						
		- Infrastruktur SPBE						
2	Pelaksanaan Struktur berdasarkan kompetensi	Penyusunan dokumen peta jabatan	- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	v	v	v	v	v
			- Dinas Komunikasi dan Informatika					

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
			- Bagian Organisasi					
	Pengelolaan Sumber daya manusia SPBE	<p>Proses Manajemen SDM SPBE meliputi beberapa proses yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan SDM SPBE (Kebutuhan Kompetensi &amp; Analisis Jabatan)</li> <li>- Pengadaan Kompetensi SDM SPBE (Perekrutan/Seleksi/Sertifikasi/Bintek/Training)</li> <li>3) Pengelolaan Karir &amp; Evaluasi/Penilaian Kinerja SDM SPBE</li> <li>- Penghargaan/Kesejahteraan SDM SPBE</li> <li>- Hubungan Kerja (Kontrak, Penghentian)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>- Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>- Bagian Organisasi</li> </ul>	v	v	v	v	v
4	Evaluasi dan Monitoring Dokumen Pencatatan dan Pelaporan Kinerja	<p>Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK dengan tahapan pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan &amp; Strategi</li> <li>- Pengumpulan</li> <li>- Pengolahan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> </ul>	v	v	v	v	v

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
		- Penyimpanan, - Penggunaan,  - Alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Bagian Organisasi					
<b>F. Manajemen Pengetahuan</b>								
<b>Referensi Hukum: Perpres Nomor 95 Tahun 2018</b>								
1	Penyusunan Dokumen pedoman manajemen pengetahuan	Penyusunan dokumen Pedoman Manajemen pengetahuan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	v				
2	Pelaksanaan manajemen pengetahuan	Pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE yang memuat program kerja SPBE menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	v	v			

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
3	Pembinaan Manajemen Pengetahuan	Pelaksanaan pendampingan manajemen pengetahuan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	v				
4	Evaluasi dan Monitoring Manajemen Pengetahuan	Laporan pelaksanaan pengembangan manajemen pengetahuan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	v	v	v	v	v
<b>G. Manajemen Perubahan SPBE</b>								
<b>Referensi Hukum: Perpres Nomor 95 Tahun 2018</b>								
1	Penyusunan Log Manajemen perubahan	Pembuatan dokumen Kebijakan dan pedoman manajemen perubahan	Dinas Komunikasi dan Informatika	v				
2	Pelaksanaan Manajemen Perubahan	Penerapan dokumen kebijakan dan pedoman untuk seluruh proses dan dokumen yang ada diseluruh unit kerja (versi baru)	Dinas Komunikasi dan Informatika	v	v	v	v	v
3	Pembinaan Manajemen Perubahan	Sosialisasi kebijakan dan pedoman manajemen perubahan yang telah dibuat untuk seluruh unit kerja	Dinas Komunikasi dan Informatika	v				
4	Monitoring dan evaluasi manajemen perubahan	Laporan pelaksanaan manajemen perubahan	Dinas Komunikasi	v	v	v	v	v

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
			dan Informatika					
<b>H. Manajemen Layanan SPBE</b>								
<b>Referensi Hukum: Perpres Nomor 95 Tahun 2018, ITIL</b>								
1	Perencanaan Manajemen Layanan	Penyusunan Klasifikasi Sistem (d disesuaikan dengan ruang lingkup)	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD	v				
		Penetapan Target Pelayanan Pengguna (d disesuaikan dengan ruang lingkup)	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD	v				
		Penetapan Target Pengoperasional Layanan (d disesuaikan dengan ruang lingkup)	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD	v				
		Perumusan Katalog Layanan (d disesuaikan dengan ruang lingkup)	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD	v	v	v	v	v

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
2	Pelayanan Pengguna	Permintaan Layanan (bergantung kepada proses yang ada di unit kerja masing-masing)	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD	v				
		Perumusan Penanganan Gangguan	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD	v	v	v	v	v
3	Pengoperasian Layanan	Pemantauan dan Pemeliharaan Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD	v	v	v	v	v
		Pemulihan Layanan (bergantung kepada pemantauan dan pemeliharaan layanan yang telah dilakukan)	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD	v	v	v	v	v



No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC	Target Tahun Pelaksanaan				
				2023	2024	2025	2026	2027
4	Pengelolaan Layanan	Pengembangan Layanan	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD	v	v	v	v	v
		Publikasi Layanan (bergantung kepada kebutuhan yang ditinjau dari misi dan fungsi layanan tertentu)	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD	v	v	v	v	v
5	Evaluasi	Penyusunan Laporan Evaluasi	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Seluruh PD	v	v	v	v	v

### 3.3 Peta Rencana Integrasi Data

Integrasi data adalah proses untuk menggabungkan data dari beberapa sumber yang berbeda untuk memberikan tampilan tunggal yang terpadu kepada pengguna. Hal ini dilakukan untuk mengurangi duplikat atau redundansi dari data yang ada. Pada bagian ini, akan diusulkan prioritas integrasi antar data kependudukan, data kepegawaian, data keuangan dan data spasial.

#### 3.3.1 Usulan Integrasi Data Kependudukan

Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Untuk penataan data kependudukan maka diberikan usulan integrasi data-data kependudukan yang ada di Pemerintahan Kota Madiun. Pada Tabel Peta Rencana Integrasi Data Kependudukan akan menjelaskan usulan data dan aplikasi yang akan diintegrasikan dengan data kependudukan.

Tabel Peta Rencana Integrasi Data Kependudukan

Kode OPD	Nama OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung	Tahun
2	Bagian Hukum	Data Pemohon Bantuan Hukum	Aplikasi Bantuan Hukum dan HAM ( <a href="https://sidbankum.bphn.go.id/">https://sidbankum.bphn.go.id/</a> )	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data penyewa Aset Pemerintah Daerah Kota Madiun	Belum ada Aplikasi	2024
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Registrasi Pasien (NIK, Nama, Alamat, dsb)	SIST-BRO Pendaftaran Online	2023
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Ibu Hamil	PWS Imunisasi	2024
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Balita	KOHORT	2024

Kode OPD	Nama OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung	Tahun
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Usia Produktif, dan Data Lansia	ASIK	2025
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Jiwa Dan Data Napza	SIMKESWA , SEHAT Jiwa	2026
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Keluarga, Data Kegiatan Kampung KB	PK21, KAMPUNG KB & RUMAH DATAKU	2027
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	NIK Dukcapil dan NIK peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID)	Aplikasi Pemadanan NIK Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID)	2027
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	informasi data PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan sosial)	MADIUN MONITORING (dinsosapp.madiun.kota.go.id)	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Data kependudukan masyarakat miskin	Aplikasi SIKSDROID	2024
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Data lembaga pelatihan, Data TKW, Data Pencari Kerja, Tingkat Pengangguran, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Data TKA, Data Pekerja Anak, Jumlah Pencari Kerja Yang diterima, Jumlah Lowongan Pekerjaan,	Si Caker	2023

Kode OPD	Nama OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung	Tahun
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Data calon pekerja migran	SISKOTKLN ( <a href="http://siskotkln.bn.p2tki.go.id/">http://siskotkln.bn.p2tki.go.id/</a> )	2024
20	Dinas Pendidikan	Data beasiswa BBM (Data diri dari isian form)	Be SMART Kota Madiun ( <a href="https://beasiswa.madiunkota.go.id/">https://beasiswa.madiunkota.go.id/</a> )	2023
20	Dinas Pendidikan	Data calon peserta didik	PPDB ( <a href="https://ppdb.madiunkota.go.id/">https://ppdb.madiunkota.go.id/</a> )	2024
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Kependudukan terkait Perceraian (NIK, Putusan Pengadilan dll)	SILANDEP (SISTEM INFORMASI LAYANAN DUKCAPIL DAN PA)	2023
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data pembuatan e-KTP (KK, foto identitas, biodata kependudukan)	BCARD	2024
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data perekaman e-KTP (KK, foto identitas, biodata kependudukan)	BENROLLER	2025
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data NIK Pelaku Usaha	MASS Madiun dan OSS	2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Data Kepemudaan, Data pelatihan dan pendampingan	Sistem Informasi Kepemudaan Kota Madiun	2023
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data pustakawan	Pengembangan iMadiun	2024
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pembuatan Kartu anggota: NIK, Pendidikan, Gender, Alamat. Layanan Pengembalian dan Peminjaman Bahan Pustaka: nomor kartu anggota, Pengolahan bahan pustaka : ISBN, dan nomor induk bahan pustaka.	INLIS.LITE (Inlislite.madiunkota.go.id)	2023

Kode OPD	Nama OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung	Tahun
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Data Pasien	SIM RS	2023
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Nomor Rekam Medis, Nama, Jadwal Kontrol dan Nomor HP Pasien dari database SIM-RS Kota Madiun	Pendekar Hati	2024
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Data Kematian dan Kelahiran	E- Monas (Mortalitas dan Natalitas)	2025
32	Kecamatan Manguharjo	Data pendukung pelayanan	Aplikasi Mall Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	2023
33	Kecamatan Kartoharjo	Surat pernyataan ahli waris, KK, KTP, buku nikah, akta kematian, akta kelahiran dan berkas pendukung lainnya	E-Surprais (Elektronik Surat Pernyataan Ahli Waris)	2023

Pada Tabel Peta Rencana Integrasi Data Kependudukan terdapat total 27 (dua puluh tujuh) data yang berkaitan dengan data kependudukan yang tersebar pada 13 OPD. Data kependudukan yang disebutkan merupakan data yang memiliki keterkaitan dengan NIK. Pada tahun 2023 diusulkan 12 (dua belas) integrasi data, tahun 2024 diusulkan 9 (sembilan) integrasi data, pada tahun 2025 diusulkan 3 (tiga) integrasi data, pada tahun 2026 diusulkan 1 (satu) integrasi data dan pada tahun 2027 diusulkan 2 (dua) integrasi data.

### 3.3.2 Usulan Integrasi Data Kepegawaian

Data kepegawaian merupakan data yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk penataan data kepegawaian maka diberikan usulan integrasi data-data kepegawaian yang ada di Pemerintahan Kota Madiun. Pada Tabel Peta Rencana Integrasi Data Kepegawaian akan menjelaskan usulan data dan aplikasi yang akan diintegrasikan dengan data kepegawaian.

Tabel Peta Rencana Integrasi Data Kepegawaian

Kode OPD	Nama OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung	Tahun
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data Pegawai berdasarkan sasaran kinerja pegawai	E-KAK	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data InforMasi Semua Pegawai PNS dan Non PNS Pemkot Madiun (untuk menentukan besaran gaji )	SIM GAJI	2023
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Kepegawaian, data penilaian kinerja pegawai	M-SKP	2023
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	data kepegawaian, data penilaian kinerja pegawai	E-Kinerja ( <a href="https://ekin.erja.madiun.kota.go.id/">https://ekin.erja.madiun.kota.go.id/</a> )	2026
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rekonsiliasi Data Kepegawaian	SIASN	2024
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	data riwayat jabatan	Aplikasi Seleksi Terbuka	2025
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM	Aplikasi Pengembangan an ASN	2025
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Kepegawaian Khusus Kesehatan	RENBUT	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Data gender, data perempuan kepala keluarga, data disabilitas, data pegawai seluruh OPD, data peserta kegiatan	SIDEGAN	2023
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Kepegawaian Non-ASN	Aplikasi Manajemen Kepegawaian Non ASN Internal DKPP	2023

Kode OPD	Nama OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung	Tahun
22	Dinas Lingkungan Hidup	Data Kepegawaian dan Data Perencanaan	M-SKP	2023
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Informasi Kepegawaian, Data Aset, Data Barang Milik Daerah	SIK, SIKD, SIMDA	2023
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data SDM TIK di seluruh OPD, data pembinaan dan pengembangan SDM TIK	Aplikasi SDM TIK Kota Madiun	2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Data Perencanaan (Renstra Renja, RKA) Dan Data Kepegawaian	SIPD, SIKD	2023
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Data Pegawai Dan Cuti	E-SITI	2023
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Nominal Jasa Medis dari database SIM-RS RSUD Kota Madiun, Data Pegawai dari database E-SITI	SI-JASPEL	2024
33	Kecamatan Kartoharjo	Data Pegawai	<a href="https://skp.madiunkota.go.id/">SIK dan https://skp.madiunkota.go.id/</a>	2023

Pada Tabel Peta Rencana Integrasi Data Kepegawaian terdapat total 17 (tujuh belas) data yang berkaitan dengan data kepegawaian yang tersebar pada 12 OPD. Data kepegawaian yang disebutkan merupakan data yang memiliki keterkaitan dengan NIP. Pada tahun 2023 diusulkan 12 (dua belas) integrasi data, tahun 2024 diusulkan 2 (dua) integrasi data, pada tahun 2025 diusulkan 2 (dua) integrasi data dan pada tahun 2026 diusulkan 1 (satu) integrasi data.

### 3.3.3 Usulan Integrasi Data Keuangan

Data keuangan merupakan data yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk penataan data keuangan maka diberikan usulan integrasi data-data keuangan yang ada di Pemerintahan Kota Madiun. Pada Tabel Peta Rencana Integrasi Data Keuangan akan menjelaskan usulan data dan aplikasi yang akan diintegrasikan dengan data keuangan.

Tabel Peta Rencana Integrasi Data Keuangan

Kode OPD	Nama OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung	Tahun
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Data Gaji Pegawai	SIM GAJI	2023
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Data pendapatan daerah dari BUMD	e-BUMD	2024
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data anggaran berdasarkan sasaran kinerja pegawai	E-KAK	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Anggaran Kegiatan	ASB (Analisis Standar Biaya) <a href="https://sipkd.madiunkota.go.id/asb2023">https://sipkd.madiunkota.go.id/asb2023</a>	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Pengelolaan Keuangan SKPD	SIPKD <a href="http://sipkd.madiunkota.go.id/sipkd2022">http://sipkd.madiunkota.go.id/sipkd2022</a>	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Pengelolaan Gaji Pegawai	SIM GAJI	2024
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Pelaporan DAK Fisik	OMSPAN <a href="https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/">https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/</a>	2024
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Pelaporan Dana Intensif Daerah ( DID)	DID <a href="http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/lapordjpk/">http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/lapordjpk/</a>	2025
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Pembayaran Setoran ke Kas Negara Non Pajak	SIMPONI <a href="https://www.simponi.kemenukeu.go.id/">https://www.simponi.kemenukeu.go.id/</a>	2025



Kode OPD	Nama OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung	Tahun
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data monitoring Dana Transfer Dari Pusat (kemenkeu )	SIMTRADA (Sistem Informasi Transfer ke Daerah Dan Dana Desa)	2026
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Pelaporan DAK Non Fisik	Aladin	2026
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data informasi publik Badan Keuangan dan Aset Daerah	Website BKAD ( <a href="https://bkad.madiunkota.go.id/">https://bkad.madiunkota.go.id/</a> )	2027
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	seluruh hasil kegiatan yang telah dilaksanakan setiap OPD, data anggaran	Aplikasi Verifikasi anggaran dan Laporan Keuangan secara terintegrasi	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data berkas	Aplikasi Penyimpanan Berkas untuk Laporan dan SPJ	2024
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data terkait retribusi pemakaian kekayaan daerah	E-Retribusi Daerah	2025
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data berkas	Aplikasi Pengguna /penyewa Kekayaan Daerah	2027
10	Badan Pendapatan Daerah	Data Wajib Pajak, Objek pajak	SIMPADAMA	2023
10	Badan Pendapatan Daerah	Data Pajak Daerah	SISMIOP	2024
10	Badan Pendapatan Daerah	Data informasi publik Badan	Website BAPENDA ( <a href="https://bape">https://bape</a> )	2025

Kode OPD	Nama OPD	Data yang dikelola	Aplikasi pendukung	Tahun
		Pendapatan Daerah	<a href="http://nda.madiunkota.go.id/">nda.madiunkota.go.id/</a>	
10	Badan Pendapatan Daerah	Data terkait objek PBB	Sistem Informasi PBB	2026
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Laporan Penyerapan DAK KB	MORENA	2024
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data Perencanaan Dan Keuangan OPD	SIPD	2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Data Keuangan Dan Kearsipan	SIPD, SIKD	2023
29	Dinas Perdagangan	Data pembayaran retribusi	SIM PASAR	2023
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Data Belanja Keuangan Real time (Akrual)	E-Belanja BLUD	2023

Pada Tabel Peta Rencana Integrasi Data Keuangan terdapat total 25 (dua puluh lima) data yang berkaitan dengan data keuangan yang tersebar pada 9 OPD. Data keuangan yang disebutkan merupakan data yang memiliki keterkaitan dengan anggaran dan pendapatan daerah. Pada tahun 2023 diusulkan 10 (sepuluh) integrasi data, tahun 2024 diusulkan 6 (enam) integrasi data, pada tahun 2025 diusulkan 4 (empat) integrasi data, pada tahun 2026 diusulkan 3 (tiga) integrasi data dan pada tahun 2027 diusulkan 2 (dua) integrasi data.

### 3.3.4 Usulan Integrasi Data Spasial

Data spasial adalah data yang menunjukkan lokasi letak data tersebut di permukaan bumi. Untuk penataan data spasial maka diberikan usulan integrasi data-data spasial yang ada di Pemerintahan Kota Madiun. Pada Tabel Peta Rencana Integrasi Data Spasial akan menjelaskan usulan data yang akan diintegrasikan dengan data spasial di aplikasi GIS.

Tabel Peta Rencana Integrasi Data Spasial

Kode OPD	Nama OPD	Data Eksisting	Usulan Data	Tahun
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Data Perdagangan		2023
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Data Industri		2023
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Data Kios/Ruko/Pasar		2023
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Data Sarana Keagamaan		2023
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		data bumd, data inflasi	2023
6	Bagian Pemerintahan		Peta Kondisi Umum (Data Persebaran Desa)	2023
6	Bagian Pemerintahan		Peta Kondisi Umum (Data Persebaran Kecamatan)	2023
6	Bagian Pemerintahan		Peta Kondisi Umum (Data Persebaran Kelurahan)	2023
6	Bagian Pemerintahan		Data Batas Wilayah	2023
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Data Persebaran Bencana	2023
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Fasilitas Kesehatan		2023
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Data Perkembangan Covid		2023
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Data Persebaran Jalan	2023

Kode OPD	Nama OPD	Data Eksisting	Usulan Data	Tahun
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data Gedung Pemerintah		2023
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Data Persebaran saluran lingkungan/ limbah rumah tangga	2022
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Data Rumah Susun		2023
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Data Tanah Makam		2023
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Data Tanah Ruang Terbuka Hijau		2023
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Data Permukiman Kumuh	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Data Kampung KB	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Data Lembaga Sosial	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Data Panti Asuhan	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Data Panti Jompo	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Data kemiskinan	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Data Lansia	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Data anak terlantar	2023

Kode OPD	Nama OPD	Data Eksisting	Usulan Data	Tahun
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Data anak stunting (kurang gizi)	2023
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Data UMKM		2023
20	Dinas Pendidikan	Data Sarana Pendidikan (SD)		2023
20	Dinas Pendidikan	Data Sarana Pendidikan (SMP)		2023
20	Dinas Pendidikan	Data Sarana Pendidikan (SMA)		2023
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Tanah Pertanian		2023
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Data Tanah Tegalan		2023
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Data Perikanan	2023
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2023
24	Dinas Perhubungan	Data Terminal		2023
24	Dinas Perhubungan		Data Persebaran Halte	2023
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Peta investasi		2023
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Data Peta investasi		2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Data Hotel		2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Data Kuliner		2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Data Lapangan Olahraga		2023

Kode OPD	Nama OPD	Data Eksisting	Usulan Data	Tahun
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Data Gedung Olahraga		2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Data Cagar Budaya		2023
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Data Perpustakaan	2023
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Data Fasilitas Kesehatan		2023
34	Puskesmas Manguharjo	Data Fasilitas Kesehatan		2023
35	Puskesmas Sukosari	Data Fasilitas Kesehatan		2023

Pada Tabel Peta Rencana Integrasi Data Spasial terdapat total 48 (empat puluh delapan) data yang berkaitan dengan data spasial dengan 27 (dua puluh tujuh) data eksisting dan 21 (dua puluh satu) data usulan. Prioritas diusulkan semua pada tahun 2023 mengikuti usulan pengadaan aplikasi Sistem Informasi Geospasial pada Pemerintah Kota Madiun yang diusulkan dikembangkan pada tahun 2023.

### 3.3.5 Usulan Tata Kelola Data dan Informasi

Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Hal ini tertera pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Berdasarkan kondisi eksisting Pemerintahan Kota Madiun telah memiliki manajemen data untuk pengolahan datanya yang tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Peraturan Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Madiun. Perlu adanya perbaikan dalam Tata Kelola dan Satu Data Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia agar lebih terstruktur. Detail Usulan Tata Kelola dan Satu Data Indonesia sesuai dengan Tabel Usulan Perbaikan Tata Kelola dan Satu Data Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
1	Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten	<b>Penyusunan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia</b> yang terdiri dari Pembina Data, Walidata, Wali Data Pendukung, Produsen Data	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah	Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Perencanaan Data	Penentuan daftar Data yang memuat Produsen Data untuk masing-masing Data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Penentuan daftar Data yang dijadikan Data prioritas	
		Pembahasan daftar data yang telah disusun melalui forum satu data	
		Kesepakatan daftar data yang telah disusun melalui forum satu data	
4	Pengumpulan Data	Pengumpulan data sesuai dengan Standar Data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia, dan jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data	- Seluruh PD
		Penyampaian data yang telah dikumpulkan oleh produsen dana kepada wali data	
5	Pemeriksaan Data	Pemeriksaan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia oleh wali data	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengembalian data yang tidak sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Wali Data	

No.	Program Kerja	Kegiatan	PIC
		Perbaikan data sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh produsen data	- Seluruh SKPD
6	Pengolahan data	Penyiapan data input yang telah dilengkapi dengan metadata	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Perekaman/penyimpanan data secara digital maupun manual	
7	Penyebarluasan Data	Pemberian akses data	- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah - Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pendistribusian data dalam bentuk media cetak dan elektronik	
		Pembatasan akses data tertentu oleh wali data	
		Pertukaran Data	

### 3.4 Peta Rencana Layanan SPBE

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan SPBE adalah serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE. Pada bagian ini akan membahas Peta Rencana layanan SPBE yang meliputi Peta Rencana Layanan Administrasi, Layanan Publik SPBE, dan Peta Rencana Layanan terhadap Program RPJMD.

#### 3.4.1 Peta Rencana Layanan SPBE sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dibagi menjadi dua yaitu layanan administratif dan layanan publik. Tabel Peta Rencana Layanan Publik SPBE merupakan usulan layanan yang akan dibangun oleh PD penanggung jawab berdasarkan tahun pelaksanaannya.



Tabel Peta Rencana Layanan Publik SPBE

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Aplikasi Usulan	SKPD Pemilik Layanan	Tahun Pengembangan
<b>Layanan Administrasi Berbasis Elektronik</b>					
1.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<b>Layanan Publik Berbasis Elektronik</b>					
1.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<b>Layanan Publik Sektoral</b>					
1.	Pengajaran	RAL 01.31 Pendidikan	Pengembangan Aplikasi LI	Dinas Pendidikan	2024
2.	Pariwisata	RAL 01.43 Informasi	Aplikasi Pelayanan Publik Disbudparpora (E-Disbudpora)	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	2023
3.	Pemuda dan Olahraga	RAL 01.43 Informasi	Sistem Informasi Kepemudaan Kota Madiun	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	2023
4.	Pemuda dan Olahraga	RAL 01.43 Informasi	Aplikasi Pelayanan Publik Disbudparpora (E-Disbudpora)	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	2023
5.	Perhubungan dan lalu lintas	RAL 01.19 Transportasi	Aplikasi E-Hub	Dinas Perhubungan	2024
6.	Perhubungan dan lalu lintas	RAL 01.19 Transportasi	Sistem Informasi Pelayanan Angkutan Umum dan Pelajar	Dinas Perhubungan	2025

Pada Tabel Peta Rencana Layanan Publik SPBE terdapat usulan layanan publik sectoral dengan jenis layanan berupa pengajaran, pariwisata, pemuda dan olahraga, dan perhubungan dan lalu lintas. Sebagian besar layanan tersebut memiliki target pelaksanaan pada 2023-2025.

#### 3.4.2 Peta Rencana Pembuatan Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Perlu adanya standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, hal ini guna agar penyelenggaraan aktivitas pemerintahan berjalan dengan baik.

##### 1) Usulan SOP pada Layanan Eksisting

Kondisi eksisting Layanan SPBE telah dijelaskan adalah Kondisi Eksisting dan Analisis GAP Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Madiun. Pada Pemerintah Kota Madiun dari 322 layanan terdapat 248 (dua ratus empat puluh delapan) layanan yang telah didukung SOP namun masih terdapat 74 layanan (tujuh puluh empat) layanan yang belum didukung SOP. Berdasarkan dari hasil kondisi eksisting tersebut dibutuhkan usulan SOP untuk mendukung kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan eksisting sehingga dapat memberikan arahan dengan jelas dan detail. Usulan SOP pada Layanan eksisting SPBE dapat dilihat Tabel Peta Rencana Usulan SOP pada Layanan Eksisting.

Tabel Peta Rencana Usulan SOP pada Layanan Eksisting

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan SOP	Tahun Pembuatan
1	Bagian Organisasi	Layanan Akuntabilitas OPD	SOP Layanan Akuntabilitas OPD	2023
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Layanan Pengadaan secara elektronik	SOP Layanan Pengadaan secara elektronik	2023
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	Layanan Pengadaan secara elektronik menggunakan website	SOP Layanan Pengadaan secara elektronik menggunakan website	2024
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Pelayanan Pengajuan Izin SATGAS COVID	SOP Pengajuan Izin SATGAS COVID	2023
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Pelayanan Fasilitasi Acara Keagamaan	SOP Fasilitasi Acara Keagamaan	2024
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Pelayanan Pemberian Informasi dan Data Pengembangan dan Promosi Ekonomi Daerah/Ekonomi Kreatif	SOP Pemberian Informasi dan Data Pengembangan dan Promosi Ekonomi Daerah/Ekonomi Kreatif	2025
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Pelayanan Fasilitasi Pemberangkatan dan Penjemputan Calon Jamaah Haji	SOP Fasilitasi Pemberangkatan dan Penjemputan Calon Jamaah Haji	2026
5	Bagian Umum	Pelayanan Pengajuan peminjaman ruangan	SOP Pengajuan peminjaman ruangan	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan SOP	Tahun Pembuatan
5	Bagian Umum	Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	SOP Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	2024
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	SOP Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	2024
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan Evakuasi/ Penanggulangan Bencana	SOP Layanan Evakuasi/ Penanggulangan Bencana	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pelayanan Pemakaian (sewa, kerjasama ) Kekayaan Pemerintah Daerah Kota Madiun	SOP Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah Kota Madiun	2023 /2024
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan DAK Fisik di Kota Madiun	SOP Pengelolaan DAK Fisik di Kota Madiun	2024
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan DAK Non Fisik di Kota Madiun	SOP Pengelolaan DAK Non Fisik di Kota Madiun	2025
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Keuangan Dana Insentif Daerah	SOP Layanan Keuangan Dana Insentif Daerah	2025
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Monitoring PNBP	SOP Layanan Monitoring PNBP	2026
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Keuangan Desa	SOP Layanan Keuangan Desa	2027

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan SOP	Tahun Pembuatan
10	Badan Pendapatan Daerah	Layanan Pengawasan Monitoring Capaian Kinerja Program Pencegahan Korupsi	SOP Layanan Pengawasan Monitoring Capaian Kinerja Program Pencegahan Korupsi	2023
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Legalisir	SOP Layanan Legalisir	2023
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Pelayanan Seleksi Penerimaan CPNS	SOP Layanan Seleksi Penerimaan CPNS	2024
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS	SOP Layanan Penetapan Ijin Bebas Jabatan (MPP) PNS	2024
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS	SOP Layanan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS	2025
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Sewa Gedung Diklat	SOP Layanan Sewa Gedung Diklat	2025
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Permohonan Kartu Taspen	SOP Layanan Permohonan Kartu Taspen	2026
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Permohonan Izin Keluar Negeri	SOP Permohonan Izin Keluar Negeri	2026
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Permohonan Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional Keluar daerah	SOP Permohonan Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional Keluar Daerah	2027

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan SOP	Tahun Pembuatan
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Kontrak Kerja	SOP Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Kontrak Kerja	2027
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelayanan Pemantauan dan Pengendalian Kinerja OPD	SOP Pelayanan Pemantauan dan Pengendalian Kinerja OPD	2023
14	Sekretariat DPRD	Layanan e-AR (Layanan Aspirasi Masyarakat)	SOP e-AR (Layanan Aspirasi Masyarakat)	2025
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Perencanaan Kebutuhan SDMK	SOP Layanan Perencanaan Kebutuhan SDMK	2023
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Pelaporan Jalan dan Jembatan	SOP Layanan Pelaporan Jalan dan Jembatan	2024
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Persebaran Jaringan Perpipaan	SOP Layanan Persebaran Jaringan Perpipaan	2022
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	SOP Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	2023
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Program Keluarga Harapan	SOP Program Keluarga Harapan	2024
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Pengusulan KIS PBIN	SOP Pengusulan KIS PBIN	2025
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Penonaktifan KIS PBIN	SOP Penonaktifan KIS PBIN	2026

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan SOP	Tahun Pembuatan
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar / Kartu Indonesia Pintar Kuliah	SOP Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Kuliah	2026
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Santunan Kematian	SOP Pelayanan Santunan Kematian	2026
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah	SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah	2027
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Penerbitan SPT Pendampingan Respon Kasus Anak	SOP Penerbitan SPT Pendampingan Respon Kasus Anak	2027
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Gelandangan Psikotik dan Tempat Tinggal Tidak Tetap	SOP Penerbitan Rekomendasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Gelandangan Psikotik dan Tempat Tinggal Tidak Tetap	2024
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pelayanan Lansia Terlantar	SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Pelayanan Lansia Terlantar	2025
20	Dinas Pendidikan	Layanan Be SMART Kota Madiun	SOP Be SMART Kota Madiun	2024

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan SOP	Tahun Pembuatan
20	Dinas Pendidikan	Layanan LI ( Laporan Individu Sekolah ) profil	SOP LI ( Laporan Individu Sekolah ) profil	2025
20	Dinas Pendidikan	Pelayanan pendaftaran peserta didik baru	SOP Pelayanan pendaftaran peserta didik baru	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan SILAPLING	SOP SILAPLING	2025
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan SILANDEP	SOP SILANDEP	2023
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Digi Form	SOP Digi Form	2023
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	SOP Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	2023
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Penerbitan KK	SOP Penerbitan KK	2024
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan	SOP Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan	2024
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Kelahiran	SOP Pencatatan Kelahiran	2025
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan Kematian	SOP Pencatatan Kematian	2025



Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan SOP	Tahun Pembuatan
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan Dan Pengesahan Anak	SOP Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak	2026
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama	SOP Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama	2026
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Pembetulan Dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	SOP Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	2027
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pembatalan Dokumen Administrasi Kependudukan Melalui Asas Contrarius Actus	SOP Pembatalan Dokumen Administrasi Kependudukan Melalui Asas Contrarius Actus	2027
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Penerbitan Kembali Register Dan Akta Pencatatan Sipil	SOP Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil	2027
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Permintaan Data Jumlah Penduduk	SOP Permintaan Data Jumlah Penduduk	2027
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan	SOP Permohonan Kerjasama Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan	2027
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Inovasi Baktiku Eyangku (Bawakan Akte Kelahiran Untukmu EYANGKU	SOP Inovasi Baktiku Eyangku (Bawakan Akte kelahiran untukmu Eyangku)	2023

Kode OPD	Nama OPD	Nama Layanan	Usulan SOP	Tahun Pembuatan
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Pendaftaran Penduduk (SIAK)	SOP Layanan Pendaftaran Penduduk (SIAK)	2024
24	Dinas Perhubungan	Pelayanan E-TLE	SOP Pelayanan E-TLE	2023
24	Dinas Perhubungan	Layanan pendaftaran Online Pengujian Kendaraan Bermotor dan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor	SOP Layanan pendaftaran Online Pengujian Kendaraan Bermotor dan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor	2024
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Aduan Pelayanan Publik	SOP Layanan Aduan Pelayanan Publik	2023
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Satu Data Kota Madiun	SOP Layanan Satu Data Kota Madiun	2024
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Madiun	SOP Peta Potensi dan Peluang Investasi Kota Madiun	2023
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peta Digital Perizinan	SOP Peta Digital Perizinan	2024
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pelayanan Perpustakaan	SOP Layanan Jarimu	2022
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Layanan Kearsipan Dinamis	SOP Layanan Kearsipan Dinamis	2023
32	Kecamatan Manguharjo	Layanan pelaporan realisasi kegiatan kelurahan	SOP Pelaporan Realisasi Kegiatan Kelurahan	2023
33	Kecamatan Kartoharjo	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat	SOP Survey Kepuasan Masyarakat	2024

Pada Tabel Peta Rencana Usulan SOP Pada Layanan Eksisting terdapat 73 usulan SOP Layanan Publik yang ada di Kota Madiun. Jumlah usulan SOP terbanyak adalah pada tahun 2023 sebanyak 20 (dua puluh) usulan sop. Pada tahun 2024 terdapat 18 (delapan belas) usulan sop. Pada tahun 2025 terdapat 12 (dua belas) usulan SOP dan pada tahun 2026 terdapat 9 (sembilan) usulan SOP. Serta terdapat 10 (sepuluh) usulan SOP pada tahun 2027.

2) Usulan SOP pada Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD

Usulan SOP ini digunakan sebagai mendukung kinerja terkait program yang ada. Program RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksudkan untuk jangka periode selama 5 tahun. Terdapat sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) usulan SOP untuk mendukung usulan layanan terhadap program RPJMD Pemerintah Kota Madiun.

Usulan SOP yang terintegrasi pada Usulan Layanan terhadap program RPJMD ditunjukkan pada Tabel Peta Rencana Usulan SOP pada Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD.

**Tabel Peta Rencana Usulan SOP pada Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD**

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
2	Bagian Hukum		Tidak ada		Tidak ada
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan		Tidak ada		Tidak ada

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi	Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi	SOP Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi	2024
5	Bagian Umum	Tidak ada			Tidak ada
6	Bagian pemerintahan	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Layanan Penataan Daerah Otonom Baru	SOP Layanan Penataan Daerah Otonom Baru	2023
6	Bagian pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	SOP Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2024
6	Bagian pemerintahan	Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah	Layanan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah	SOP Layanan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah	2024
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak ada			Tidak ada
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tidak ada			Tidak ada

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pelayanan Peningkatan Kemampuan Kinerja Bendahara Pengeluaran dan penerimaan semua OPD	Layanan konsultasi terkait Tupoksi Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran OPD	SOP Layanan konsultasi terkait Tupoksi Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran OPD	2023 – 2027
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pelayanan Peningkatan Kemampuan Kinerja Pengurus barang dan Penyimpan Barang semua OPD	Layanan konsultasi terkait Tupoksi Pengurus dan Penyimpan Barang	SOP Layanan konsultasi terkait Tupoksi Pengurus dan Penyimpan Barang	2023 – 2027
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Program Penyuluhan kepada masyarakat tentang tata cara Pemakaian (sewa, kerjasama ) Kekayaan Pemerintah Daerah Kota Madiun	Layanan cara memperoleh Rekomendasi Pemakaian (sewa, kerjasama ) Kekayaan Pemerintah Daerah Kota Madiun	SOP Rekomendasi Pemakaian (sewa, kerjasama ) Kekayaan Pemerintah Daerah Kota Madiun	2024
10	Badan Pendapatan Daerah	Tidak ada			Tidak ada

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tidak ada			Tidak ada
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Layanan Kemitraan Pengembangan Wawasan	SOP Layanan Kemitraan Pengembangan Wawasan	2023
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	Layanan Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	SOP Layanan Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	2023
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	Layanan Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	SOP Layanan Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	2025
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	SOP Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	2024

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Layanan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	SOP Layanan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2025
13	Inspektorat Daerah	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Layanan Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	SOP Layanan Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2024
13	Inspektorat Daerah	Program Perumusan, Penyempurnaan dan Penataan Kebijakan dan Sisdur Pembinaan dan Pengawasan	Layanan Perumusan, Penyempurnaan dan Penataan Kebijakan dan Sisdur Pembinaan dan Pengawasan	SOP Layanan Perumusan, Penyempurnaan dan Penataan Kebijakan dan Sisdur Pembinaan dan Pengawasan	2025
13	Inspektorat Daerah	Program Pendampingan dan Asistensi	Layanan Pendampingan dan Asistensi	SOP Layanan Pendampingan dan Asistensi	2026

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
14	Sekretariat DPRD	Program Layanan Perundang Undangan, Dokumentasi dan Rapat	Layanan Perundang Undangan, Dokumentasi dan Rapat	SOP Layanan Perundang Undangan, Dokumentasi dan Rapat	2023
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	SOP Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2023
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	SOP Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2024
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	SOP Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2025
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Layanan Pengendalian Penduduk	SOP Layanan Pengendalian Penduduk	2025
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Layanan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	SOP Layanan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2026



Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Layanan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	SOP Layanan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2026
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Layanan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	SOP Layanan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2027
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Layanan Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	SOP Layanan Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	2023
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan Peningkatan Pelayanan BLUD	SOP Layanan Peningkatan Pelayanan BLUD	2023
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	SOP Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	2023

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/Drainase/ Gorong-gorong	Layanan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/Drainase/ Gorong-gorong	SOP Layanan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	2023
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Banjir	Layanan Pengendalian Banjir	SOP Layanan Pengendalian Banjir	2023
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Layanan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	SOP Layanan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2024
			Layanan Persebaran Jaringan Perpipaan	SOP Layanan Persebaran Jaringan Perpipaan	2023
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	Layanan Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	SOP Layanan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2024
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	SOP Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2025
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	SOP Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2025

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Layanan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	SOP Layanan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2026
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Layanan Penyelenggaraan Jalan	SOP Layanan Penyelenggaraan Jalan	2026
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	SOP Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	2027
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	layanan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	SOP layanan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	2023
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Layanan Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	SOP Layanan Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	2024
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Sosial	Layanan Pemberdayaan Sosial	SOP Layanan Pemberdayaan Sosial	2023
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Layanan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	SOP Layanan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2023

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	SOP Layanan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	2024
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program kesempatan perluasan kerja	Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan	SOP Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan	2025
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	SOP Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	2026
20	Dinas Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Layanan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SOP Layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	2023
20	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	SOP Layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	2023
20	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	SOP Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	2024
20	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Non Formal	Layanan Pendidikan Non Formal	SOP Layanan Pendidikan Non Formal	2025

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
20	Dinas Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Layanan Pengembangan Kurikulum	SOP Layanan Pengembangan Kurikulum	2026
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Layanan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	SOP Layanan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2023
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Layanan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	SOP Layanan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2023
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Layanan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	SOP Layanan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2024
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Layanan Penanganan Kerawanan Pangan	SOP Layanan Penanganan Kerawanan Pangan	2024
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	SOP Layanan Pengawasan Keamanan Pangan	2025

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Layanan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	SOP Layanan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2025
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	SOP Layanan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	2026
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Layanan Penyuluhan Pertanian	SOP Layanan Penyuluhan Pertanian	2026
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Layanan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	SOP Layanan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Layanan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	SOP Layanan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Layanan Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	SOP Layanan Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2024

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Layanan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	SOP Layanan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2024
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup	SOP Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup	2025
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Layanan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	SOP Layanan Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2025
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	SOP Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2026
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	SOP Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	2026
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Layanan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	SOP Layanan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	2027

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Layanan Pengelolaan Persampahan	SOP Layanan Pengelolaan Persampahan	2027
23	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tidak ada			Tidak ada
24	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SOP Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2023
24	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Layanan Peningkatan Pelayanan Angkutan	SOP Layanan Peningkatan Pelayanan Angkutan	2024
24	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	SOP Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2025
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika	SOP Layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika	2023
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Aplikasi Informatika	Layanan Aplikasi Informatika	SOP Layanan Aplikasi Informatika	2023
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Sosialisasi di Bidang Cukai	Layanan Sosialisasi di Bidang Cukai	SOP Layanan Sosialisasi di Bidang Cukai	2024



Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Layanan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	SOP Layanan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2024
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Layanan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	SOP Layanan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2024
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	SOP Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2024
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Layanan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	SOP Layanan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Layanan Pengembangan Kesenian Tradisional	SOP Layanan Pengembangan Kesenian Tradisional	2023

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	SOP Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2024
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Layanan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	SOP Layanan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2024
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Layanan Pemasaran Pariwisata	SOP Layanan Pemasaran Pariwisata	2025
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata yang diselenggarakan	Layanan Peningkatan Pemasaran Pariwisata yang diselenggarakan	SOP Layanan Peningkatan Pemasaran Pariwisata yang diselenggarakan	2025
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan	Layanan Pembinaan Perpustakaan	SOP Layanan Pembinaan Perpustakaan	2023
29	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	SOP Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2024

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
29	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Layanan Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	SOP Layanan Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	2023
29	Dinas Perdagangan	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Layanan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	SOP Layanan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	2023
29	Dinas Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	SOP Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2024
29	Dinas Perdagangan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Layanan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	SOP Layanan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2025
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Layanan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	SOP Layanan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2023

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SOP Layanan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2023
32	Kecamatan Manguharjo	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Layanan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	SOP Layanan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	2023
32	Kecamatan Manguharjo	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	SOP Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2023
32	Kecamatan Manguharjo	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Layanan Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	SOP Layanan Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	2024

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
32	Kecamatan Manguharjo	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	SOP Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2024
32	Kecamatan Manguharjo	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	SOP Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2025
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Layanan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	SOP Layanan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	2025
34	Kecamatan Kartoharjo	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	SOP Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2026
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Layanan Penyelenggaraan Kelurahan	(Sudah ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan)	2023

Kode PD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Usulan SOP	Tahun Pelaksanaan
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketertarikan Ketertiban Umum	Layanan Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketertarikan Ketertiban Umum	SOP Layanan Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketertarikan Ketertiban Umum	2024

Pada Tabel Peta Rencana Usulan SOP pada Usulan Layanan Terhadap Program RPJMD terdapat 108 usulan SOP usulan layanan terhadap program RPJMD yang ada di Pemerintah Kota Madiun. Terdapat 20 PD yang belum memenuhi keseluruhan layanan terhadap program RPJMD. Pada tahun 2023 terdapat 33 (tiga puluh tiga) usulan SOP, tahun 2024 terdapat 28 (dua puluh delapan) usulan SOP, tahun 2025 terdapat 19 (sembilan belas) usulan SOP, tahun 2026 terdapat 12 (dua belas) usulan SOP. Serta terdapat 4 (empat) usulan SOP.

#### 3.4.3 Peta Rencana Usulan Layanan Berdasarkan Program

Telah diidentifikasi layanan-layanan yang ada di Pemerintah Kota Madiun, hasilnya masih terdapat beberapa program pada RPJMD yang belum didukung oleh layanan. Selanjutnya diusulkan layanan terhadap program RPJMD yang belum didukung oleh layanan.

Pada bagian ini akan dibahas prioritas pengadaan usulan layanan yang telah diberikan. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel Peta Rencana Usulan Layanan Berdasarkan Program.

Tabel Peta Rencana Usulan Layanan Berdasarkan Program

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan	Tahun Pembuatan
4	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Di Bidang Ekonomi	Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial Di Bidang Ekonomi	2024
6	Bagian Pemerintahan	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Layanan Penataan Daerah Otonom Baru	2023
6	Bagian Pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Layanan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2024
6	Bagian Pemerintahan	Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah	Layanan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah	2024
8	Badan Perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2024
9	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Program Pelayanan Peningkatan Kemampuan Kinerja Bendahara Pengeluaran Dan Penerimaan Semua OPD	Layanan Konsultasi Terkait Tupoksi Bendahara Penerimaan Dan Pengeluaran OPD	2023
9	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Program Pelayanan Peningkatan Kemampuan Kinerja Pengurus Barang Dan Penyimpan Barang Semua OPD	Layanan Konsultasi Terkait Tupoksi Pengurus Dan Penyimpan Barang	2023

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan	Tahun Pembuatan
9	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Program Penyuluhan Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Pemakaian (Sewa, Kerjasama) Kekayaan Pemerintah Daerah Kota Madiun	Layanan Cara Memperoleh Rekomendasi Pemakaian (Sewa, Kerjasama) Kekayaan Pemerintah Daerah Kota Madiun	2024
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Layanan Kemitraan Pengembangan Wawasan	2023
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Peningkatan Pemahaman Ideologi Dan HAM Serta Pencegahan Konflik Sosial	Layanan Peningkatan Pemahaman Ideologi Dan HAM Serta Pencegahan Konflik Sosial	2023
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Pendidikan Politik Masyarakat Dan Orkemas	Layanan Pendidikan Politik Masyarakat Dan Orkemas	2023
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter	2024
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Layanan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2025
13	Inspektorat Daerah	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Layanan Peningkatan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2024
13	Inspektorat Daerah	Program Perumusan, Penyempurnaan Dan Penataan Kebijakan Dan Sisdur Pembinaan Dan Pengawasan	Layanan Perumusan, Penyempurnaan Dan Penataan Kebijakan Dan Sisdur Pembinaan Dan Pengawasan	2025



Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan	Tahun Pembuatan
13	Inspektorat Daerah	Program Pendampingan Dan Asistensi	Layanan Pendampingan Dan Asistensi	2026
14	Sekretariat DPRD	Program Layanan Perundang Undangan, Dokumentasi Dan Rapat	Layanan Perundang Undangan, Dokumentasi Dan Rapat	2023
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Layanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	2023
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2024
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2025
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Layanan Pengendalian Penduduk	2025
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Layanan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2026

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan	Tahun Pembuatan
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Layanan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2026
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga	Layanan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga	2027
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-Gorong	Layanan Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-Gorong	2023
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Banjir	Layanan Pengendalian Banjir	2023
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Layanan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	2024
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Layanan Persebaran Jaringan Perpipaan	2022
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	Layanan Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA)	2024

<b>Kode OPD</b>	<b>Nama PD</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Usulan Layanan</b>	<b>Tahun Pembuatan</b>
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2025
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	2025
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Layanan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2026
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Layanan Penyelenggaraan Jalan	2026
16	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	2027
17	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	2023
17	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Layanan Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	2024
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Sosial	Layanan Pemberdayaan Sosial	2023

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan	Tahun Pembuatan
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Layanan Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2023
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	2024
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Kesempatan Perluasan Kerja	Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial Di Bidang Ketenagakerjaan	2025
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	2026
20	Dinas Pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Layanan Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2023
20	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Layanan Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	2023
20	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	2024
20	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Non Formal	Layanan Pendidikan Non Formal	2025
20	Dinas Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Layanan Pengembangan Kurikulum	2026
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Layanan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2023

<b>Kode OPD</b>	<b>Nama PD</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Usulan Layanan</b>	<b>Tahun Pembuatan</b>
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2023
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2024
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Layanan Penanganan Kerawanan Pangan	2024
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	2025
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Layanan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2025
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Layanan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	2026
21	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Layanan Penyuluhan Pertanian	2026
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Layanan Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Layanan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	2023
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penataan, Pengawasan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Layanan Penataan, Pengawasan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	2024
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Layanan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2024

<b>Kode OPD</b>	<b>Nama PD</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Usulan Layanan</b>	<b>Tahun Pembuatan</b>
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup	2025
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Layanan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2025
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2026
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	2026
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Layanan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2027
22	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Layanan Pengelolaan Persampahan	2027
24	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Layanan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2023
24	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Layanan Peningkatan Pelayanan Angkutan	2023
24	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2024
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Layanan Pengelolaan Aplikasi Informatika	2025

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan	Tahun Pembuatan
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Aplikasi Informatika	Layanan Aplikasi Informatika	2023
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Sosialisasi Di Bidang Cukai	Layanan Sosialisasi Di Bidang Cukai	2023
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Layanan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2024
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Layanan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2024
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2024
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pembinaan Pemuda Dan Olahraga	Layanan Pembinaan Pemuda Dan Olahraga	2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Layanan Pengembangan Kesenian Tradisional	2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2024

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan	Tahun Pembuatan
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Layanan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2024
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Layanan Pemasaran Pariwisata	2025
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata Yang Diselenggarakan	Layanan Peningkatan Pemasaran Pariwisata Yang Diselenggarakan	2025
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Layanan Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	2024
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan	Layanan Pembinaan Perpustakaan	2023
29	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2024
29	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan, Pengembangan Dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Layanan Peningkatan, Pengembangan Dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	2023



Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan	Tahun Pembuatan
29	Dinas Perdagangan	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Layanan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	2023
29	Dinas Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	2024
29	Dinas Perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Layanan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2025
30	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Layanan Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	2023
30	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Layanan Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2023
31	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	Layanan Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	2023
31	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan Peningkatan Pelayanan BLUD	2023
31	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Di Bidang Kesehatan	Layanan Pembinaan Lingkungan Sosial Di Bidang Kesehatan	2024

Kode OPD	Nama PD	Nama Program	Usulan Layanan	Tahun Pembuatan
32	Kecamatan Manguharjo	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Layanan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	2023
32	Kecamatan Manguharjo	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2023
32	Kecamatan Manguharjo	Program Koordinasi, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Dan Ketertarikan Ketertiban Umum	Layanan Koordinasi, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Dan Ketertarikan Ketertiban Umum	2024
32	Kecamatan Manguharjo	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2024
32	Kecamatan Manguharjo	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2025
33	Kecamatan Kartoharjo	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Layanan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	2025
34	Kecamatan Kartoharjo	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2026
34	Kecamatan Kartoharjo	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Layanan Penyelenggaraan Kelurahan	2023
34	Kecamatan Kartoharjo	Program Koordinasi, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Dan Ketertarikan Ketertiban Umum	Layanan Koordinasi, Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Dan Ketertarikan Ketertiban Umum	2024

Pada Tabel Peta Rencana Usulan Layanan Berdasarkan Program terdapat total 100 usulan layanan terhadap program RPJMD yang ada di Pemerintah Kota Madiun. Terdapat 1 usulan layanan pada tahun 2022, 35 usulan layanan tahun 2023, 30 usulan layanan tahun 2024, 18 usulan layanan tahun 2025, 12 usulan layanan tahun 2026, dan 4 usulan layanan tahun 2027.

### 3.5 Peta Rencana Aplikasi SPBE

Peta rencana aplikasi disusun dengan memperhatikan setidaknya dua faktor, yakni pola ketergantungan antar sistem dan prioritas pengembangan yang merujuk kepada Pemerintah Kota Madiun. Prioritasi ini menjadi acuan bagi masing-masing PD Pemerintah Kota Madiun dalam penerapan aplikasi. Untuk lebih detailnya, metode dan faktor-faktor yang diperhitungkan dalam prioritas usulan aplikasi adalah sebagai berikut.

#### 1. *Warrant McFarlan's Strategic Matrix*

Rekomendasi aplikasi dikelompokkan menjadi 4 jenis aplikasi berdasarkan dukungannya terhadap organisasi, yaitu:

- *Key Operational*, yaitu sifat aplikasi yang dapat membantu operasional PD sehingga PD sangat bergantung pada aplikasi tersebut.
- *Support*, yaitu sifat aplikasi yang dapat meningkatkan efisiensi kinerja PD.
- *Strategic*, yaitu sifat aplikasi yang mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan PD di masa mendatang.
- *High Potential*, yaitu sifat aplikasi yang belum terbukti dapat mendukung aktivitas dari PD.

#### 2. Analisis Potensi Integrasi Antar Aplikasi

Pertimbangan ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan tahun implementasi aplikasi dengan melihat seberapa banyak SPD yang dapat didukung dalam pembuatan suatu aplikasi. Semakin banyak suatu aplikasi dibutuhkan untuk memenuhi aktivitas beberapa PD, maka aplikasi tersebut akan diprioritaskan untuk dibangun terlebih dahulu.

#### 3. Analisis *Impact/Dampak*.

Sebuah aplikasi akan memiliki prioritas pembangunan yang tinggi apabila terkait dengan layanan dasar masyarakat dan dapat menghasilkan investasi bagi Pemerintah Kota Madiun.

- Aplikasi layanan dasar merupakan semua aplikasi yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan rakyat, dan sosial akan mendapat angka prioritas lebih tinggi.
- Aplikasi investasi merupakan semua aplikasi yang keberadaannya mendukung secara langsung maupun tidak langsung terhadap investasi pemerintah akan diberi angka prioritas yang lebih tinggi.

Daftar aplikasi yang telah dianalisis sesuai kriteria di atas dan persetujuan PD terkait selanjutnya dipetakan ke dalam rekomendasi tahun kegiatan 2023 hingga 2027. Prioritas pembangunan dan pelaksanaan aplikasi lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel Peta Rencana Usulan Aplikasi SPBE.

Tabel Peta Rencana Usulan Aplikasi SPBE

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Tahun Pelaksanaan
1	Bagian Organisasi	E-SOP	2023
2	Bagian Organisasi	Aplikasi SUKMA	2023
3	Bagian Hukum	Pengembangan JDIH	2024
4	Bagian Hukum	Aplikasi Bantuan Hukum dan HAM ( <a href="https://sidbankum.bphn.go.id/">https://sidbankum.bphn.go.id/</a> )	2025
5	Bagian Hukum	Pengembangan <i>Website</i> Bagian Hukum	2026
6	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	e-BUMD	2023
7	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Sistem Informasi Pengelolaan Hibah	2025
8	Bagian Umum	Aplikasi Pelayanan Internal Sekretariat Daerah	2024
9	Bagian Umum	<i>Website</i> Bagian Umum	2025

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Tahun Pelaksanaan
10	Bagian Pemerintahan	Sistem Informasi Kerja Sama Daerah	2024
11	Bagian Pemerintahan	Aplikasi Kewilayahan	2025
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Kebencanaan	2024
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengembangan <i>Website</i> BPBD	2025
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	2026
15	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Aplikasi penyusunan dokumen perencanaan OPD (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja)	2023
16	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan <i>Website</i> BAPEDALITBANG	2023
17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Aplikasi Pengendalian dan Informasi Pembangunan	2024
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Aplikasi E-KAK	2024
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi verifikasi anggaran dan Laporan Keuangan secara terintegrasi	2023
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Penyimpanan Berkas untuk Laporan dan SPJ	2023
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengembangan SIM GAJI	2024
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	E-Retribusi Daerah	2025
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Pengguna/Penyewa Kekayaan Daerah	2025

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Tahun Pelaksanaan
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Penerimaan Dan Pengeluaran Barang Habis Pakai	2026
25	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan SIMPADAMA	2023
26	Badan Pendapatan Daerah	Sistem Informasi PBB	2024
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Legalisir dan Keabsahan <i>Online</i>	2023
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Pengembangan ASN	2024
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Seleksi Terbuka	2025
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Permohonan/ Perizinan/ Pengajuan Kepegawaian	2025
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan <i>Website</i> Bangkesbangpol	2023
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SIORMAS (Sistem Informasi Pendataan Ormas)	2025
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aplikasi Mitigasi Konflik	2026
34	Inspektorat Daerah	Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Daerah Kota Madiun (SINAWASDA Kota Madiun)	2023
35	Sekretariat DPRD	E -risalah (Sistem Pengelola Rapat)	2023
36	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aplikasi Pemadanan NIK Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID)	2023

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Tahun Pelaksanaan
37	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	E-SIP - Surat Izin Praktek	2024
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aplikasi Layanan Publik PUPR	2023
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIMTARUBANG (Sistem Informasi Tata Ruang dan Bangunan)	2024
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIBIMA Konstruksi ( <a href="https://sibima.pu.go.id/">https://sibima.pu.go.id/</a> )	2024
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Sumber Daya Air	2025
42	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman	2023
43	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Aplikasi Identifikasi dan Pengelola Data Pemukiman	2025
44	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Puskesmas <i>Mobile</i>	2023
45	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi SIKSDROID	2023
46	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi Laporan Kebencanaan dan Penyaluran Bantuan Bencana	2024
47	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi Layanan Publik Dinsos P3A	2025

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Tahun Pelaksanaan
48	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi Rehabilitasi Sosial	2026
49	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SI ORSOS	2027
50	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Pengembangan SI-CAKER	2023
51	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Pengembangan E-Kami	2024
52	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Sistem Informasi Layanan Produktivitas Terkini (SIPRONI)	2025
53	Dinas Pendidikan	Pengembangan Aplikasi LI	2024
54	Dinas Pendidikan	Aplikasi Manajemen Tenaga Kependidikan	2025
55	Dinas Pendidikan	Sistem Informasi Lembaga Pendidikan NonFormal	2026
56	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	SIM IKAN	2024
57	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	SIM TANI	2024
58	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	SIM HEWAN	2025
59	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Aplikasi Ketahanan dan Kerawanan Pangan	2026
60	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Aplikasi Manajemen Kepegawaian Non ASN Internal DKPP	2027



No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Tahun Pelaksanaan
61	Dinas Lingkungan Hidup	Pengembangan Aplikasi SILAPLING	2024
62	Dinas Lingkungan Hidup	Aplikasi Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	2025
63	Dinas Lingkungan Hidup	Pengembangan Website DLH	2026
64	Dinas Perhubungan	Aplikasi E-Hub	2024
65	Dinas Perhubungan	Sistem Informasi Pelayanan Angkutan Umum dan Pelajar	2025
66	Dinas Perhubungan	Pengembangan E-Kir	2026
67	Dinas Komunikasi dan Informatika	Satu Data Kota Madiun	2024
68	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi Manajemen Aplikasi	2024
69	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi SDM TIK Kota Madiun	2025
70	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan WEBGIS DPMPSTP	2023
71	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembang MASS Madiun	2023
72	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Aplikasi Pelayanan Publik Disbudparpora (E-Disbudpora)	2024
73	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Sistem Informasi Kepemudaan Kota Madiun	2025
74	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan iMadiun	2024
75	Dinas Perdagangan	Pengembangan BUMU	2023
76	Dinas Perdagangan	InaExport	2024
77	Dinas Perdagangan	SIM PASAR	2025

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Tahun Pelaksanaan
78	Dinas Perdagangan	SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok)	2026
79	Dinas Perdagangan	Aplikasi Perlindungan Konsumen	2026
80	Dinas Perdagangan	SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal)	2026
81	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	SISKAMLING (Sistem Informasi Keamanan dan Ketertiban Lingkungan)	2024
82	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	pengembangan SIM SATPOL PP	2025
83	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	E-Aset	2024
84	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	E-Belanja BLUD	2024
85	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Telemedicine RSUD Kota Madiun	2025
86	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	E- Monas (Mortalitas dan Natalitas)	2026
87	Kecamatan Manguharjo	Aplikasi Mall Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	2024

### 3.5 Peta Rencana Infrastruktur SPBE

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data eksisting, kesenjangan dan usulan yang telah dijabarkan secara detail pada Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE dan Arsitektur Infrastruktur SPBE. Maka, perlu dilakukan Peta Rencana untuk Infrastruktur yang dapat diterapkan pada Pemerintah Kota Madiun. Prioritas Usulan Infrastruktur SPBE dapat dilihat pada Tabel Peta Rencana Infrastruktur SPBE.

Tabel Peta Rencana Infrastruktur SPBE

No	Usulan	Spesifikasi	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Belanja internet terpusat	Penambahan Alokasi Bandwidth untuk Jaringan Intra Pemerintah (Belanja Internet Terpusat)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2024-2025
2	Peremajaan Perangkat Jaringan	Peremajaan Perangkat Jaringan pendukung proses Integrasi Jaringan Intra Pemerintah (Router, Switch/Hub, Access Point, Repeater Wifi, Antena Outdoor Wireless) disesuaikan dengan usia perangkat yang lebih dari 5 tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023-2024
3	Pengkajian Penerapan Jaringan Intra	Melakukan Pengkajian Penerapan Jaringan Intra Pemerintah telah sesuai dan berjalan dengan baik tidaknya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023
4	Penambahan Area Demilitarized Zone (DMZ)	Penerapan DMZ (Demilitarized Zone) pada server digunakan untuk keamanan pada server yang digunakan saat terhubung dengan Jaringan luar server dan dalam server	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023
5	Dokumentasi Topologi Jaringan Fisik dan Logic	Membuat dokumentasi terkait pembuatan Topologi Jaringan Fisik dan Logic	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023
6	Surveillance ISO ke-2	Melakukan Kroscek ulang seluruh Dokumen Kebijakan dan SOP Penerapan ISO 27001	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023
7	Resertifikasi Ulang ISO 27001	Melakukan Update/Resertifikasi ulang terkait penerapan Standar ISO 27001	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023

No	Usulan	Spesifikasi	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
8	Penerapan Penetration Testing	Melakukan Penetration Testing untuk mengetahui permasalahan dan celah pada aplikasi yang digunakan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Setiap Tahun (2023-2027)
9	Pengadaan Perangkat Penyimpanan / Storage (NAS/SAN)	Melakukan Pengadaan Perangkat Keras Storage / Penyimpanan sebagai bentuk penerapan teknologi penyimpanan yang terbaru dan mempermudah akses melalui jaringan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2024-2025
10	Penerapan dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Terpusat (SPLP)	Melakukan Penerapan SPLP dengan mengikuti seluruh prosedur dan pengajuan yang sesuai	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023-2025
11	Update Kebijakan SOP yang sudah ada	Melakukan Update Kebijakan SOP pada seluruh SOP yang telah ada saat ini terutama pada Ruang Server.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023

### 3.6.1 Peta Rencana Jaringan Intra Pemerintah

Peta Rencana Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah ini telah dianalisis berdasarkan dengan dokumen hasil survei, dan dokumen eksisting yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun. Sehingga didapatkan Peta Rencana terkait infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah yang nantinya dapat dilaksanakan sesuai dengan tahun yang diusulkan. Peta Rencana Usulan Jaringan Intra Pemerintah dapat dilihat pada Tabel Usulan Jaringan Intra Pemerintah Kota Madiun.

Tabel Usulan Jaringan Intra Pemerintah Kota Madiun

No	Usulan	Spesifikasi	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Belanja internet terpusat	Penambahan Alokasi Bandwidth untuk Jaringan Intra Pemerintah (Belanja Internet Terpusat)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2024-2025
2	Peremajaan Perangkat Jaringan	Peremajaan Perangkat Jaringan pendukung proses Integrasi Jaringan Intra Pemerintah ( <i>Router, Switch/Hub, Access Point, Repeater Wifi, Antena Outdoor Wireless</i> ) disesuaikan dengan usia perangkat yang lebih dari 5 tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023-2024
3	Pengkajian Penerapan Jaringan Intra	Melakukan Pengkajian Penerapan Jaringan Intra Pemerintah telah sesuai dan berjalan dengan baik tidaknya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023
4	Dokumentasi Topologi Jaringan Fisik dan <i>Logic</i>	Membuat dokumentasi terkait pembuatan Topologi Jaringan Fisik dan <i>Logic</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023
5	Penambahan Area <i>Demilitarized Zone (DMZ)</i>	Penerapan DMZ ( <i>Demilitarized Zone</i> ) pada server digunakan untuk keamanan pada server yang digunakan saat terhubung dengan Jaringan luar server dan dalam server	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023

#### 12.6 Peta Rencana Pengadaan Pusat Data atau Ruang Server dan Perangkat Pendukungnya

Peta Rencana Ruang Server dan perangkat pendukungnya didasarkan pada kebutuhan ruang server selama 5 tahun kedepan, dibawah ini merupakan penjelasan usulan tata kelola dan manajemen ruang server, penerapan standar keamanan ruang server, dan pengujian keamanan. Berikut merupakan beberapa Usulan terkait dengan Peta Rencana Ruang server yang dapat dilihat pada Tabel Prioritas Usulan Pengaduan Pusat Data atau Ruang Server dan Perangkat dan Pendukungnya.

Tabel Prioritas Usulan Pengadaan Pusat Data atau Ruang Server dan Perangkat Pendukungnya

No	Usulan	Spesifikasi	OPD Pelaksana	Tahun Pelaksanaan
1	Penerapan Penetration Testing	Melakukan Penetration Testing untuk mengetahui permasalahan dan celah pada aplikasi yang digunakan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Setiap Tahun (2023-2027)
2	Pengadaan Perangkat Penyimpanan / Storage (NAS/SAN)	Melakukan Pengadaan Perangkat Keras Storage / Penyimpanan sebagai bentuk penerapan teknologi penyimpanan yang terbaru dan mempermudah akses melalui jaringan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2024-2025
3	Update Kebijakan SOP yang sudah ada	Melakukan <i>Update</i> Kebijakan SOP pada seluruh SOP yang telah ada saat ini terutama pada Ruang Server.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	2023

### 3.6.2 Peta Rencana Pengadaan Sistem Penghubung Layanan

Berdasarkan amanat regulasi yang digunakan sebagai pelaksanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Pada Kondisi Eksisting terkait penerapan Sistem Penghubung Layanan hingga saat ini Pemerintah Kota Madiun belum menerapkan Sistem Penghubung Layanan. Sehingga dengan adanya hal tersebut, terdapat beberapa rekomendasi terkait dengan penerapan SPLP pada Pemerintah Kota Madiun. Berikut merupakan Peta Rencana Usulan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang ditampilkan pada Tabel Usulan Sistem Penghubung Layanan.

Tabel Usulan Sistem Penghubung Layanan

No.	Nama Sistem Penghubung Layanan	Detail Usulan	Tahun Pelaksanaan
1	Melakukan Pengajuan Penggunaan SPLP	Melakukan Pengajuan terkait penggunaan Penghubung Layanan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat (Kemkominfo) melalui penyuratan secara resmi	2023-2024
2	Mengikuti Kegiatan Bimtek dan Pelatihan SPLP	Mengikuti kegiatan terkait dengan Bimtek dan Pelatihan penggunaan SPLP yang dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai arahan bagaimana tata cara penggunaannya.	2024
3	Melakukan Kajian Terkait penggunaan API	Memastikan data yang akan diintegrasikan pada SPLP dipastikan terlebih dahulu melalui proses kajian untuk penerapan API yang digunakan melalui SPLP	2024
4	Membuat Kajian untuk Konsolidasi data	Diperlukan kajian untuk mengetahui data apakah yang akan diintegrasikan melalui SPLP	2024
5	Layanan Interoperabilitas Data (LID) melalui SPLP	Melakukan Integrasi Layanan Menggunakan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh PD melalui SPLP yang telah digunakan saat ini.	2025

### 3.1.4 Peta Rencana Pengadaan Perangkat Periferal

Peta Rencana Perangkat Utama didasarkan pada kebutuhan selama 5 tahun kedepan, peta rencana dibawah ini menjelaskan mengenai usulan pc, usulan laptop dan usulan printer. Berikut merupakan beberapa usulan terkait dengan peta rencana perangkat utama yang dapat dilihat pada Tabel Peta Rencana Usulan Komputer (PC) - Tabel Peta Rencana Usulan Printer .

1) Peta Rencana Usulan PC

Pada peta rencana usulan perangkat PC yang dapat dilihat pada Tabel Peta Rencana Usulan Komputer (PC), berdasarkan dengan kondisi yang ada saat ini diperlukan untuk mengusulkan perangkat baru dikarenakan dapat mendukung operasional kantor yang mana secara ketersediaan perangkat masih tergolong kurang jumlahnya dan masih belum memadai, jika melihat pada jumlah SDM yang ada saat ini dan usulan SDM serta banyak perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun.

Tabel Peta Rencana Usulan Komputer (PC)

Kode OPD	Nama PD	Usulan PC					Jumlah PC
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Organisasi	1	1	1	0	2	<b>5</b>
2	Bagian Hukum	2	0	2	0	1	<b>5</b>
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	2	2	2	2	2	<b>10</b>
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2	1	1	0	1	<b>5</b>
5	Bagian Umum	8	8	8	7	7	<b>38</b>
6	Bagian Pemerintahan	2	1	1	2	2	<b>8</b>
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	2	1	2	2	<b>8</b>
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	2	3	2	3	<b>14</b>



Kode OPD	Nama PD	Usulan PC					Jumlah PC
		2023	2024	2025	2026	2027	
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	7	6	5	5	5	<b>28</b>
10	Badan Pendapatan Daerah	2	2	2	2	2	<b>10</b>
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	4	2	4	3	<b>15</b>
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	3	2	3	2	<b>12</b>
13	Inspektorat Daerah	4	8	7	6	6	<b>31</b>
14	Sekretariat DPRD	3	2	2	3	2	<b>12</b>
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	8	7	8	7	<b>36</b>
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	8	8	6	8	<b>36</b>
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3	3	3	3	3	<b>15</b>
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	5	4	5	3	<b>20</b>
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1	4	3	3	4	<b>15</b>
20	Dinas Pendidikan	4	5	7	5	6	<b>27</b>
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2	2	2	2	4	<b>12</b>
22	Dinas Lingkungan Hidup	3	4	5	4	4	<b>20</b>

Kode OPD	Nama PD	Usulan PC					Jumlah PC
		2023	2024	2025	2026	2027	
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	5	5	<b>25</b>
24	Dinas Perhubungan	6	9	10	9	11	<b>45</b>
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	8	9	8	9	<b>40</b>
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	2	3	4	4	<b>15</b>
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	2	2	1	3	2	<b>10</b>
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	3	2	2	2	<b>12</b>
29	Dinas Perdagangan	3	3	3	3	3	<b>15</b>
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10	10	10	10	10	<b>10</b>
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	10	8	8	10	12	<b>48</b>
32	Kecamatan Manguharjo	2	2	1	1	1	<b>7</b>
33	Kecamatan Kartoharjo	2	3	3	3	4	<b>15</b>
34	Puskesmas Manguharjo	7	7	7	7	6	<b>34</b>
35	Puskesmas Sukosari	1	5	4	5	5	<b>20</b>
<b>Total Usulan PC</b>		<b>120</b>	<b>141</b>	<b>136</b>	<b>137</b>	<b>144</b>	<b>678</b>

2) Peta Rencana Usulan Laptop

Pada peta rencana usulan perangkat Laptop yang dapat dilihat pada Tabel Prioritas Usulan Laptop, berdasarkan dengan kondisi yang ada saat ini diperlukan untuk mengusulkan perangkat baru dikarenakan dapat mendukung operasional kantor yang mana secara ketersediaan perangkat masih tergolong kurang jumlahnya dan masih belum memadai jika melihat pada jumlah SDM yang ada saat ini dan usulan SDM serta banyak perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun.

Tabel Prioritas Usulan Laptop

Kode PD	Nama PD	Usulan Laptop					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Organisasi	2	1	1	1	1	<b>6</b>
2	Bagian Hukum	2	2	2	2	1	<b>9</b>
3	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	2	3	2	3	2	<b>12</b>
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	3	3	3	2	2	<b>13</b>
5	Bagian Umum	7	7	7	7	6	<b>34</b>
6	Bagian Pemerintahan	1	1	1	0	0	<b>8</b>
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	1	1	1	<b>5</b>
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	3	3	2	2	<b>13</b>
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4	4	4	4	4	<b>20</b>

Kode PD	Nama PD	Usulan Laptop					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
10	Badan Pendapatan Daerah	3	1	1	1	1	<b>7</b>
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	2	0	0	<b>10</b>
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	0	2	0	0	<b>6</b>
13	Inspektorat Daerah	11	11	11	11	11	<b>55</b>
14	Sekretariat DPRD	3	2	2	2	2	<b>11</b>
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	4	4	4	4	<b>24</b>
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	4	2	0	0	<b>16</b>
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	2	2	2	2	<b>9</b>
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	8	8	1	1	<b>40</b>
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	3	2	2	2	1	<b>9</b>
20	Dinas Pendidikan	3	3	3	3	2	<b>15</b>
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2	2	1	2	2	<b>7</b>
22	Dinas Lingkungan Hidup	6	6	6	7	6	<b>30</b>
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2	2	2	3	<b>10</b>

Kode PD	Nama PD	Usulan Laptop					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
24	Dinas Perhubungan	2	3	3	1	1	<b>18</b>
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	6	8	2	2	<b>30</b>
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	3	2	4	4	<b>10</b>
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	2	1	3	1	1	<b>10</b>
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	2	3	2	2	<b>15</b>
29	Dinas Perdagangan	0	2	2	2	1	<b>18</b>
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	2	2	11	11	<b>10</b>
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	1	2	2	2	2	<b>8</b>
32	Kecamatan Manguharjo	2	2	2	4	4	<b>10</b>
33	Kecamatan Kartoharjo	3	3	3	4	4	<b>9</b>
34	Puskesmas Manguharjo	2	2	0	2	2	<b>6</b>
35	Puskesmas Sukosari	2	3	2	8	8	<b>14</b>
Total Perangkat (Laptop)		<b>105</b>	<b>105</b>	<b>104</b>	<b>105</b>	<b>108</b>	<b>527</b>

3) Peta Rencana Usulan Printer

Pada peta rencana usulan perangkat Printer yang dapat dilihat pada Tabel Peta Rencana Usulan Printer, berdasarkan dengan kondisi yang ada saat ini diperlukan untuk mengusulkan perangkat baru dikarenakan dapat mendukung operasional kantor yang mana secara ketersediaan perangkat masih tergolong kurang jumlahnya dan masih belum memadai jika melihat pada jumlah SDM yang ada saat ini dan usulan SDM serta banyak perangkat yang berusia lebih dari 5 tahun.

Tabel Peta Rencana Usulan Printer

Kode PD	Nama PD	Usulan Printer					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Organisasi	2	2	1	0	1	<b>6</b>
2	Bagian Hukum	2	2	0	1	1	<b>6</b>
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	1	2	2	2	2	<b>9</b>
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2	2	2	0	0	<b>6</b>
5	Bagian Umum	8	5	4	7	6	<b>30</b>
6	Bagian Pemerintahan	3	2	2	0	0	<b>7</b>
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	1	2	1	<b>6</b>
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	4	4	4	4	<b>21</b>
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8	7	7	7	7	<b>36</b>
10	Badan Pendapatan Daerah	3	2	3	2	4	<b>14</b>
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	3	4	4	5	<b>20</b>

Kode PD	Nama PD	Usulan Printer					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	3	2	2	1	<b>10</b>
13	Inspektorat Daerah	6	6	8	6	8	<b>34</b>
14	Sekretariat DPRD	8	5	5	5	5	<b>28</b>
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	6	6	6	6	<b>34</b>
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	8	8	8	8	<b>40</b>
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	2	2	1	0	<b>6</b>
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	5	5	5	5	<b>25</b>
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	3	4	3	4	6	<b>20</b>
20	Dinas Pendidikan	2	1	3	2	2	<b>10</b>
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2	3	2	2	3	<b>12</b>
22	Dinas Lingkungan Hidup	4	4	2	2	2	<b>14</b>
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	3	3	3	1	<b>13</b>
24	Dinas Perhubungan	6	8	8	5	5	<b>32</b>
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	6	6	6	6	<b>30</b>
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	3	2	2	2	<b>12</b>
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	2	0	3	3	2	<b>10</b>
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	2	2	2	2	<b>10</b>
29	Dinas Perdagangan	4	1	1	3	2	<b>11</b>

Kode PD	Nama PD	Usulan Printer					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	0	2	0	1	<b>4</b>
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	2	2	2	2	2	<b>10</b>
32	Kecamatan Manguharjo	2	1	1	0	1	<b>5</b>
33	Kecamatan Kartoharjo	3	2	3	2	2	<b>12</b>
34	Puskesmas Manguharjo	3	2	3	2	3	<b>13</b>
35	Puskesmas Sukosari	2	1	2	1	2	<b>8</b>
<b>Total Perangkat (Printer)</b>		<b>129</b>	<b>110</b>	<b>114</b>	<b>103</b>	<b>108</b>	<b>564</b>

### 3.6.6 Peta Rencana Perangkat Jaringan

Peta Rencana perangkat keras jaringan yang akan diusulkan berdasarkan dengan hasil analisis terhadap usia pakai perangkat tersebut dan kebutuhan perangkat yang digunakan, terdapat kategori yang bisa dilakukan pembaruan perangkat keras jaringan seperti umur sudah lebih dari 5 tahun. Perangkat Jaringan Intra yang digunakan di seluruh PD yang ada pada Pemerintah Kota Madiun yaitu disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dikarenakan pengadaan Internet telah terpusat maka dari itu diperlukan usulan terkait tambahan perangkat Jaringan untuk mendukung distribusi Jaringan. Berikut akan dipaparkan terkait usulan mengenai perangkat keras jaringan pada Tabel Peta Rencana Usulan Perangkat Jaringan Modem hingga Tabel Prioritas Usulan Perangkat Lunak Platform.

Tidak semua perangkat daerah perlu melakukan pengadaan perangkat jaringan dalam rangka peremajaan perangkat. Hal ini tentunya melihat dari kondisi eksisting dari seperti halnya pada Tabel Peta Rencana Usulan Perangkat Jaringan Modem untuk usulan perangkat modem diusulkan untuk 8 (delapan) PD yang terdiri dari Bagian Organisasi, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Kartoharjo, dan Puskesmas Sukosari.



Tabel Peta Rencana Usulan Perangkat Jaringan Modem

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Modem					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Organisasi	1	0	0	0	0	1
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	0	0	1	0	2
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0	1	0	0	1
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	0	0	0	0	1
22	Dinas Lingkungan Hidup	1	0	0	0	0	1
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	0	0	0	2
33	Kecamatan Kartoharjo	5	0	0	0	0	5
35	Puskesmas Sukosari	1	0	0	0	0	1
<b>Total Usulan</b>		<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

Usulan selanjutnya adalah HUB/Switch. Hub berfungsi sebagai titik koneksi umum untuk perangkat di jaringan. Sedangkan untuk jaringan switch, adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat bersama pada satu jaringan komputer. Setiap perangkat daerah diusulkan melakukan peremajaan perangkat setidaknya 1 perangkat. Peremajaan perangkat terbanyak perlu dilakukan oleh RSUD Kota Madiun dengan jumlah perangkat switch/hub sebanyak 11 unit. Detail usulan dapat dilihat pada Tabel Peta Rencana Usulan Perangkat Jaringan HUB/Switch.

Tabel Peta Rencana Usulan Perangkat Jaringan HUB/Switch

Kode OPD	Nama OPD	Usulan HUB/Switch					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Organisasi	2	0	1	0	0	<b>3</b>
2	Bagian Hukum	1	0	0	0	0	<b>1</b>
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	0	1	0	0	0	<b>1</b>
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1	0	0	0	0	<b>1</b>
5	Bagian Umum	1	0	0	0	0	<b>1</b>
6	Bagian Pemerintahan	1	0	0	0	0	<b>1</b>
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	0	0	<b>1</b>
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	1	0	0	0	<b>1</b>
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	0	0	0	0	<b>1</b>
10	Badan Pendapatan Daerah	1	0	0	0	0	<b>1</b>
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	0	0	0	0	<b>1</b>
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	0	0	0	0	<b>1</b>
13	Inspektorat Daerah	1	0	0	0	0	<b>1</b>
14	Sekretariat DPRD	1	0	0	0	0	<b>1</b>
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	2	0	2	0	<b>5</b>

Kode OPD	Nama OPD	Usulan HUB/Switch					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	0	0	0	0	<b>1</b>
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	0	0	1	0	<b>1</b>
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	0	0	0	0	<b>1</b>
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1	0	0	0	0	<b>1</b>
20	Dinas Pendidikan	0	1	0	0	0	<b>1</b>
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	0	1	0	0	<b>1</b>
22	Dinas Lingkungan Hidup	1	0	0	0	0	<b>1</b>
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	0	2	0	2	<b>5</b>
24	Dinas Perhubungan	1	0	0	0	0	<b>1</b>
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	1	1	<b>5</b>
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	0	0	0	0	<b>1</b>
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	1	0	0	0	0	<b>1</b>
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	0	0	0	0	<b>1</b>
29	Dinas Perdagangan	1	0	0	0	0	<b>1</b>
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	1	0	0	0	<b>1</b>

Kode OPD	Nama OPD	Usulan HUB/Switch					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	0	6	0	3	2	<b>11</b>
32	Kecamatan Manguharjo	1	1	0	0	0	<b>2</b>
33	Kecamatan Kartoharjo	1	1	0	0	0	<b>2</b>
34	Puskesmas Manguharjo	0	0	1	0	0	<b>1</b>
35	Puskesmas Sukosari	1	0	0	1	0	<b>2</b>
<b>Total Usulan</b>		<b>27</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>62</b>

Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau Internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai perutean atau penghalaan. Usulan Gateway Router perlu dilakukan oleh 31 perangkat daerah dimana usulan peremajaan perangkat terbanyak perlu dilakukan oleh Kecamatan Kartoharjo dengan jumlah perangkat sebanyak 5 (lima) unit. Secara detail dapat dilihat pada Tabel Peta Rencana Usulan Perangkat Jaringan Gateway Router.

Tabel Peta Rencana Usulan Perangkat Jaringan Gateway Router

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Router					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Organisasi	1	0	0	0	0	<b>1</b>
5	Bagian Umum	1	0	0	0	0	<b>1</b>
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	1	0	0	<b>1</b>

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Router					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	1	0	0	1	<b>2</b>
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	0	1	0	0	<b>2</b>
10	Badan Pendapatan Daerah	0	1	0	0	0	<b>1</b>
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	1	0	0	1	<b>2</b>
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	0	0	0	1	<b>2</b>
13	Inspektorat Daerah	1	0	1	0	0	<b>2</b>
14	Sekretariat DPRD	1	0	0	1	0	<b>2</b>
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	1	1	2	1	<b>5</b>
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	1	0	1	0	<b>2</b>
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	0	0	1	0	<b>2</b>
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	0	0	0	1	<b>2</b>
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1	0	0	1	0	<b>2</b>
20	Dinas Pendidikan	1	0	0	0	1	<b>2</b>
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	0	0	0	1	<b>2</b>
22	Dinas Lingkungan Hidup	1	0	0	0	0	<b>1</b>
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	0	0	0	0	<b>1</b>

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Router					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
24	Dinas Perhubungan	0	0	0	1	0	<b>1</b>
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1	0	0	0	<b>1</b>
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	0	0	0	0	<b>1</b>
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	0	1	0	0	0	<b>1</b>
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	0	0	0	0	<b>1</b>
29	Dinas Perdagangan	1	0	0	0	0	<b>1</b>
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	0	0	0	0	<b>1</b>
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	0	1	0	2	1	<b>4</b>
32	Kecamatan Manguharjo	1	0	0	0	0	<b>1</b>
33	Kecamatan Kartoharjo	1	1	1	1	1	<b>5</b>
34	Puskesmas Manguharjo	1	0	0	0	0	<b>1</b>
35	Puskesmas Sukosari	1	0	0	0	0	<b>1</b>
<b>Total Usulan</b>		<b>21</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>54</b>

*Access Point* adalah suatu piranti yang memungkinkan piranti nirkabel untuk terhubung ke dalam jaringan dengan menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau standar lain. Seluruh perangkat daerah direkomendasikan untuk melakukan peremajaan *access point* karena setiap perangkat yang dimiliki rata-rata sudah berusia di atas 5 tahun. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan perangkat daerah yang direkomendasikan perangkat dengan jumlah terbanyak yaitu 10 (sepuluh) Unit *access point*.

Tabel Peta Rencana Usulan Perangkat Jaringan *Access Point*

Kode OPD	Nama OPD	Usulan <i>Access Point</i>					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Organisasi	1	0	0	0	0	<b>1</b>
2	Bagian Hukum	1	0	0	0	0	<b>1</b>
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	0	0	1	0	0	<b>1</b>
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1	0	0	0	0	<b>1</b>
5	Bagian Umum	1	0	0	0	0	<b>1</b>
6	Bagian Pemerintahan	1	0	0	0	0	<b>1</b>
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	0	0	<b>1</b>
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	1	1	2	2	<b>7</b>
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	1	1	0	0	<b>3</b>
10	Badan Pendapatan Daerah	1	1		1	0	<b>3</b>
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	1	0	1	0	<b>2</b>
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	0	0	1	<b>3</b>
13	Inspektorat Daerah	2	0	1	0	1	<b>4</b>
14	Sekretariat DPRD	1	0	1	0	0	<b>2</b>
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	0	2	0	2	<b>6</b>
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	0	1	0	0	<b>3</b>

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Access Point					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2	0	1	0	0	<b>3</b>
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	0	1	0	1	<b>3</b>
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1	1	0	0	0	<b>2</b>
20	Dinas Pendidikan	1	0	1	0	0	<b>2</b>
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	0	1	0	0	<b>2</b>
22	Dinas Lingkungan Hidup	1	0	1	0	0	<b>2</b>
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	0	2	0	1	<b>5</b>
24	Dinas Perhubungan	1	0	1	0	1	<b>3</b>
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	2	2	2	2	<b>10</b>
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	0	1	0	1	<b>4</b>
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	0	1	0	0	1	<b>2</b>
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	0	1	0	1	<b>3</b>
29	Dinas Perdagangan	1	0	1	0	0	<b>2</b>
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	0	0	1	0	<b>2</b>
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	2	1	1	1	1	<b>6</b>
32	Kecamatan Manguharjo	1	0	0	1	0	<b>2</b>
33	Kecamatan Kartoharjo	1	0	0	1	0	<b>2</b>
34	Puskesmas Manguharjo	1	1	0	1	0	<b>3</b>
35	Puskesmas Sukosari	2	0	0	1	0	<b>3</b>
<b>Total Usulan</b>		<b>40</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>101</b>



Kecamatan Kartoharjo merupakan satu satunya OPD yang diusulkan untuk melakukan peremajaan perangkat *repeater wifi* karena berdasarkan kondisi eksisting perangkat yang dimiliki sudah berusia di atas 5 tahun.

Tabel Peta Rencana Usulan Perangkat Repeater Wifi

Kode OPD	Nama OPD	Usulan Repeater Wifi					Jumlah Usulan
		2023	2024	2025	2026	2027	
33	Kecamatan Kartoharjo	1	0	0	0	0	<b>1</b>

### 3.6.7 Peta Rencana Perangkat Lunak Platform

Prioritas Perangkat lunak platform adalah perangkat lunak yang digunakan dalam mendukung kinerja. Berdasarkan dengan hasil Analisa dari data eksisting yang didapatkan melalui proses survei pada Pemerintah Kota Madiun, terdapat beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam bentuk *free trial* dan masih belum berlisensi pada perangkat yang ada di setiap PD dan terdapat beberapa perangkat lunak yang terpasang serta digunakan bersifat *Crack*. Penggunaan perangkat trial juga tidak boleh dilakukan proses *crack* yang merupakan bentuk kegiatan ilegal dan perangkat lunak dengan lisensi *trial* akan bergantung pada masa trial yang normalnya relatif pendek. Jika sudah berakhir masa trial maka perangkat tersebut tidak dapat digunakan atau fitur yang tersedia akan dibatasi penggunaannya. Berikut merupakan Detail Prioritas Usulan terkait penggunaan Perangkat Lunak Platform yang disarankan dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Prioritas Usulan Perangkat Lunak *Platform*.

Tabel Prioritas Usulan Perangkat Lunak Platform

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi/ Utilitas/ Database)	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
<i>Windows Server</i>	Sistem Operasi berbasis windows yang pemanfaatannya mendukung <i>enterprise-level management, data storage, applications, and communications.</i>	Sistem Operasi	<i>Windows Server</i>	<i>Trialware, SaaS atau volume licensing</i>	Tahunan
<i>Net Framework</i>	Sebuah perangkat lunak kerangka kerja yang berjalan terutama pada sistem operasi <i>Microsoft Windows</i>	Sistem Utilitas	<i>Framework Class Library</i>	<i>Licensing</i>	<i>Free</i>
<i>XAMPP</i>	Perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kumpulan dari beberapa program untuk mengkonfigurasi pengaturan database pada <i>phpmyadmin.</i>	Sistem Database	<i>Database Management</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
<i>Android Studio</i>	<i>Integrated Development Environment</i> untuk sistem operasi <i>Android</i> , yang dibangun di atas perangkat lunak <i>JetBrains IntelliJ IDEA</i> dan didesain khusus untuk pengembangan <i>Android.</i>	Sistem Utilitas	Pemrograman	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi/ Utilitas/ Database)	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
MariaDB	<i>relational database management system (DBMS) open source</i> yang merupakan pengganti <i>drop-in</i> yang kompatibel.	Sistem Database	Database Management	Open Source	Free
<i>Adobe Premiere Pro</i>	sebuah program penyunting video berbasis <i>non-linier</i> dari <i>Adobe Systems</i> .	Sistem Utilitas	Perangkat Lunak Design	Purchase / Trial	Free Trial
<i>Lightwork</i>	<i>Software</i> editor untuk mengedit Video berbasis open source yang memiliki fitur lengkap untuk mendukung proses editing video grafis	Sistem Utilitas	Perangkat Lunak Design	Open Source	Free
<i>Blender</i>	Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, model cetak 3D, aplikasi 3D interaktif dan permainan video	Sistem Utilitas	Perangkat Lunak Design	Open Source	Free
<i>Adobe Photoshop</i>	Perangkat lunak editor citra buatan <i>Adobe Systems</i> yang dikhususkan untuk pengeditan foto/gambar dan pembuatan efek	Sistem Utilitas	Perangkat Lunak Design	Purchase / Trial	Free Trial

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi/ Utilitas/ Database)	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
<i>GIMP</i>	Perangkat lunak editor citra yang dikhususkan untuk proses editing foto atau gambar dan pembuatan efek berbasis <i>open source</i>	Sistem Utilitas	Perangkat Lunak <i>Design</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free Trial</i>
WHM dan CPANEL	Perangkat lunak berbayar untuk mengelola <i>domain</i> dan <i>hosting</i>	Sistem Utilitas	<i>Hosting management</i>	<i>Purchase / Trial</i>	Tahunan
<i>Microsoft Office</i>	Perangkat lunak paket aplikasi perkantoran	Sistem Utilitas	Aplikasi Perkantoran	<i>Purchase / Trial</i>	Free Trial
<i>Visual Studio Code</i>	Perangkat lunak penyunting <i>source code</i> , menyediakan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, merefaktor kode, dan Git	Sistem Utilitas	Pemrograman	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
<i>Winbox</i>	Perangkat lunak untuk mengatur jaringan internal	Sistem Utilitas	<i>Networking</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
<i>Foxit Reader</i>	Aplikasi pembaca, pencari, dan pencetak dokumen PDF multilingual. Perangkat lunak ini memungkinkan penggunaanya untuk mendesain form PDF yang interaktif, memasukkan gambar, menambah jaringan, menambahkan keterangan pada PDF, mengirim PDF, dan lain sebagainya	Sistem Utilitas	Aplikasi Perkantoran	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi/ Utilitas/ Database)	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
<i>CorelDraw</i>	Perangkat lunak untuk editor grafis vector.	Sistem Utilitas	Perangkat Lunak Design	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>
<i>SPSS</i>	Singkatan dari <i>Statistical Package for the Social Sciences</i> , merupakan program komputer yang dipakai untuk analisis statistika.	Sistem Utilitas	Aplikasi Statistik	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>
<i>FileZilla</i>	Dikenal dengan sebutan <i>FileZilla Client</i> , adalah salah satu software FTP yang mendukung FTP, SFTP, dan FTPS	Sistem Utilitas	<i>Hosting management</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
<i>Proxmox</i>	Merupakan sebuah platform virtualisasi open source untuk menjalankan aplikasi dan mesin virtual	Sistem Utilitas	<i>Server management</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
<i>Zimbra</i>	Aplikasi <i>mailing</i> yang memunculkan sebuah antarmuka pemrograman aplikasi SOAP untuk semua fungsi dan juga merupakan sebuah IMAP dan POP3 server	Sistem Utilitas	<i>Mailing management</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
<i>Kinemaster Pro</i>	Perangkat lunak ponsel pintar yang khusus digunakan untuk keperluan pengeditan video	Sistem Utilitas	Perangkat Lunak Design	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi/ Utilitas/ Database)	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
<i>OBS Studio</i>	Perangkat lunak untuk perekaman dan streaming langsung, transmisi data terutama dilakukan melalui <i>Real Time Messaging Protocol (RTMP)</i> dan dapat dikirim ke tujuan pendukung RTMP mana pun, termasuk banyak preset untuk situs <i>web streaming</i> seperti <i>YouTube, Twitch, Instagram, dan Facebook</i>	Sistem Utilitas	<i>Video Streamer</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
<i>Audacity Pro</i>	Aplikasi editor audio digital, pengguna bisa mengoreksi berkas suara tertentu, atau sekedar menambahkan berbagai efek yang disediakan. Selain itu, pengguna juga dapat berkreasi dengan suara yang dimiliki sendiri	Sistem Utilitas	<i>Audio Editor</i>	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>
<i>Zoom</i>	Perangkat lunak telekonferensi, dengan fitur konferensi video grup, berbagi layar, plugin, ekstensi browser, dan kemampuan untuk merekam rapat dan membuatnya secara otomatis ditranskripsi	Sistem Utilitas	Telekonferensi	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi/ Utilitas/ Database)	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
<i>Xsplit</i>	Aplikasi <i>streaming</i> langsung dan aplikasi <i>video-mixing</i> yang sebagian besar digunakan untuk menangkap <i>gameplay</i> untuk <i>streaming</i> langsung atau keperluan perekaman video	Sistem Utilitas	<i>Video Streamer</i>	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>
<i>ArcGIS</i>	Paket perangkat lunak yang terdiri dari produk perangkat lunak sistem informasi geografis, meliputi perangkat lunak berbasis <i>Windows</i> yaitu <i>ArcReader</i> yang memungkinkan pengguna menampilkan peta yang dibuat menggunakan produk <i>ArcGIS</i> lainnya	Sistem Utilitas	<i>GIS</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
<i>Zabbix</i>	perangkat lunak pemantauan beragam komponen TI, termasuk jaringan, <i>server</i> , mesin virtual, dan layanan <i>cloud</i> . Menyediakan metrik - metrik pemantauan, antara lain pemanfaatan jaringan, beban <i>CPU</i> , dan konsumsi ruang <i>disk</i> .	Sistem Utilitas	<i>Network Monitoring</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi/ Utilitas/ Database)	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
<i>Wireshark</i>	Aplikasi penganalisa lalu lintas jaringan, digunakan untuk pemecahan masalah jaringan, analisis, perangkat lunak dan pengembangan protokol komunikasi.	Sistem Utilitas	<i>Network Monitoring</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
<i>KeePassX</i>	Perangkat lunak manajemen akun.	Sistem Utilitas	<i>Account Management</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
<i>MacOS 11</i>	Sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan disediakan untuk komputer <i>Macintosh</i>	Sistem Operasi	<i>MacOS</i>	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>
<i>Ubuntu 20.04 LTS</i>	Sistem Operasi berbasis <i>Linux Debian</i> yang ditawarkan dalam tiga edisi resmi: <i>Ubuntu Desktop</i> untuk komputer pribadi, <i>Ubuntu Server</i> untuk <i>server</i> dan <i>cloud computing</i> , dan <i>Ubuntu Core</i> untuk <i>IoT</i> , perangkat kecil dan robot.	Sistem Operasi	<i>Linux</i>	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>
<i>Canva Pro</i>	<i>Platform</i> desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan.	Sistem Utilitas	Perangkat Lunak <i>Design</i>	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>



Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis (Sistem Operasi/ Utilitas/ Database)	Jenis Lisensi	Validitas Lisensi Perangkat Lunak
<i>Google Drive Premium</i>	Layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data di server mereka, mensinkronisasi data di perangkat yang berbeda, dan saling berbagi berkas.	Sistem Utilitas	Aplikasi Perkantoran	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>
<i>Trello</i>	Aplikasi ini dapat digunakan untuk tujuan pribadi dan bisnis termasuk manajemen real estat, manajemen proyek perangkat lunak, papan buletin sekolah, perencanaan pelajaran, akuntansi, desain web, permainan, dan manajemen kasus kantor hukum.	Sistem Utilitas	Aplikasi Manajemen	<i>Purchase / Trial</i>	<i>Free Trial</i>
<i>ViPlex Express</i>	Merupakan aplikasi untuk pemutaran video, terutama dengan monitor besar seperti <i>LED</i> , <i>NEC</i> , dan <i>Videotron</i> .	Sistem Utilitas	Perangkat Multimedia	<i>Open Source</i>	<i>Free</i>

### 3.6.8 Peta Rencana Perangkat Periferal Lainnya

Pada peta rencana perangkat periferal lainnya merupakan usulan perangkat yang diberikan oleh perangkat daerah berdasarkan hasil survei maupun penyampaian langsung pada saat pelaksanaan *forum discussion group* (FGD) Usulan dan Peta Rencana SPBE. Detail usulan yang diberikan oleh masing-masing PD dapat dilihat pada Tabel Peta Rencana Perangkat Periferal.

Tabel Peta Rencana Perangkat Periferal

Kode PD	Nama PD	Perangkat Keras		
		Nama Perangkat	Detail	Tahun
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Smart TV di atas 60 InCh atau Videotron	<i>Ultra Narrow Bezel Seamless Video Wall Smart Advertising Display</i>	2024 -2027
10	Badan Pendapatan Daerah	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023

Kode PD	Nama PD	Perangkat Keras		
		Nama Perangkat	Detail	Tahun
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023
13	Inspektorat Daerah	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Scanner	Media Pemindai Gambar	2023
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	LED <i>video wall</i> TV Monitor 80 inch	untuk presentasi di ruang rapat	2023
20	Dinas Pendidikan	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023

Kode PD	Nama PD	Perangkat Keras		
		Nama Perangkat	Detail	Tahun
22	Dinas Lingkungan Hidup	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023
24	Dinas Perhubungan	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2023
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2024

Kode PD	Nama PD	Perangkat Keras		
		Nama Perangkat	Detail	Tahun
33	Kecamatan Kartoharjo	LCD + Proyektor, sound system	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2024
34	Puskesmas Manguharjo	Proyektor + LCD	No. Produk Penyedia InFocus in-116xa Projector HDMI WXGA 1280x800 3800L Proyektor in 116xa Type/Model Infocus in 116xa	2024

### 3.6.9 Peta Rencana Komputasi Awan

Peta Rencana usulan terkait dengan penggunaan komputasi awan yang dapat diterapkan pada seluruh PD yang ada di Pemerintah Kota Madiun yaitu dengan menerapkan penyimpanan pada *Cloud*, *Google Drive* yang dibuat dengan akun resmi dinas dan beberapa penggunaan *Cloud* berlisensi lainnya. Tujuan penggunaan Komputasi awan yaitu untuk mempermudah dalam penyimpanan data yang dapat diakses secara realtime dan kapan saja apabila dibutuhkan secara cepat. Peta Rencana realisasi penggunaan komputasi awan dengan menggunakan *cloud* dapat dilakukan secara berkala mulai tahun 2023-2027.

### 3.7 Peta Rencana Keamanan SPBE

Mengacu pada peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang didalamnya secara spesifik membahas mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Pembahasan prioritas peta rencana terkait arsitektur keamanan terdiri dari keamanan SPBE, keamanan teknik, perangkat keamanan, penerapan keamanan SPBE, dan SOP keamanan SPBE. Penjelasan prioritas peta rencana arsitektur keamanan SPBE secara singkat dijelaskan pada sub bab dibawah ini.

#### 3.7.6 Tahap Perencanaan Keamanan SPBE

Sebagaimana pelaksanaan keamanan SPBE ini telah mengacu kepada Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara No.10 Tahun 2019 dan ISO 27001; 2013. Pada tahap perencanaan, prioritas peta rencana pada keamanan SPBE dilaksanakan peningkatan kesadaran keamanan pada lingkup Pemerintah Kota Madiun. Edukasi kesadaran atau yang sering kali dikenal dengan *awareness*. Edukasi kesadaran dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan Keamanan SPBE bagi setiap individu. Dengan dilakukannya edukasi kesadaran, diharapkan dapat mengurangi ancaman yang berasal dari internal organisasi, seperti halnya memberikan password kepada orang yang tidak berwenang. Beberapa contoh kegiatan edukasi kesadaran Keamanan SPBE pada Tabel Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE.

Tabel Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

No	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE
1	Sosialisasi Kesadaran Keamanan Informasi Data	Memberikan edukasi kesadaran pada seluruh PD di Kota Madiun terkait dengan Keamanan Data	2022
2	Sosialisasi Keamanan Hak Akses	Memberikan edukasi kesadaran pada lingkup Pemerintah Kota Madiun terkait dengan Keamanan Hak Akses	2022
3	Sosialisasi Pedoman Pembuatan Password dan Penggantian	Memberikan edukasi kesadaran pada lingkup Pemerintah Kota Madiun terkait dengan pedoman pembuatan password dan penggantian	2022
4	Pelatihan Standar Keamanan	Memberikan edukasi kesadaran pada lingkup Pemerintah Kota Madiun terkait dengan standar keamanan	2022
5	Melakukan reminder penggantian <i>password</i> secara berkala	Melakukan reminder secara berkala pada ruang lingkup Pemerintah Kota Madiun terkait dengan penggantian <i>password</i>	2022

Peningkatan kesadaran keamanan dapat dilakukan secara rutin untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko keamanan. Misalnya saja sosialisasi untuk penggantian *password* secara berkala dan sosialisasi terkait kebijakan keamanan yang berlaku pada Pemerintah Kota Madiun.

Selain pelaksanaan edukasi kesadaran, tahapan pertama yang dilakukan dalam hal perencanaan adalah menentukan ruang lingkup. Penentuan ruang lingkup untuk menentukan fokus atau arah kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga nantinya dapat terbentuk rencana strategis dan solusi pengembangan yang fokus pada penyelesaian masalah. Adapun usulan kategori keamanan yang dapat diterapkan pada Pemerintah Kota Madiun ditampilkan pada Tabel Usulan Keamanan SPBE.

Tabel Usulan Keamanan SPBE

No	Kategori Keamanan	Aspek Keamanan	Usulan Kegiatan	Tahun		
1	Bagian Umum	Keamanan Sumber Daya Teknologi Informasi	Pengadaan Antivirus Terpusat	2024		
			Pembuatan Standar Antivirus	2023		
			Pembuatan Standar Pemindaian <i>Computer (Daily Scanning)</i>	2023		
			Pengadaan CCTV Di Ruang Publik	2023		
			Pembuatan Prosedur Pengawasan CCTV	2023		
		Keamanan Akses kontrol	Pembuatan Daftar DNS Atau IP Yang Diperbolehkan	2023		
			Pembuatan Standar Hak User ( <i>User Access Right</i> )	2023		
			Pembuatan Pembagian Hak User	2023		
			Pembuatan Standar Kata Sandi	2023		
			Pembuatan Frekuensi Pengubahan Kata Sandi	2023		
		Keamanan Sumber daya manusia	Prosedur Penambahan/Penggantian/Penghapusan Hak Akses	2023		
			Pendayagunaan SDM untuk bidang keamanan informasi	2023-2027		
			Peningkatan kompetensi SDM bidang keamanan informasi	2023-2027		
		2	Keamanan Data dan Informasi	<i>Confidentiality</i> (kerahasiaan)	Pembatasan akses untuk kategori data dan informasi tertentu	2023
				<i>Integrity</i> (keutuhan)	Menerapkan proses enkripsi dan dekripsi	2023
<i>Availability</i> (ketersediaan akses)	Didukung dengan DRC atau layanan manual jika layanan online mengalami kegagalan			2023		



No	Kategori Keamanan	Aspek Keamanan	Usulan Kegiatan	Tahun
		<i>Authentication</i> (keaslian)	Melakukan verifikasi manual sebagai langkah verifikasi akhir	2023
		Keamanan Data dan Informasi	Pembuatan Standar klasifikasi data dan informasi	2023
			Pembuatan pelabelan data dan informasi	2023
			Pembuatan Kebijakan keamanan informasi	2023
3	<b>Keamanan Aplikasi SPBE</b>	keamanan Perangkat Informasi / Aplikasi	Penerapan <i>Public Key Infrastructure</i> (PKI)	2023
			Pembuatan Standard <i>Public Key Infrastructure</i> (PKI)	2023
			Prosedur Pemadaman/memutus/mengaktifkan/ menyalakan Aplikasi	2023
4	<b>Keamanan Sistem Penghubung</b>	Keamanan Surat Elektronik	Pembuatan Prosedur <i>Digital Signature</i>	2023
			Keamanan Komunikasi	Implementasi <i>Encryption Techniques</i>
		Kebijakan Komunikasi		2023
		Prosedur Berkomunikasi yang Aman		2023
5	<b>Keamanan Jaringan Intra</b>	Keamanan Jaringan	Pembuatan Kebijakan Jaringan ( <i>Network Policy</i> )	2023
			Pembuatan Kebijakan Pengiriman Informasi	2023
			Pembuatan Prosedur Pengiriman Informasi	2023
6	<b>Keamanan Pusat Data (Ruang Server)</b>	Keamanan Pusat Data	Penyesuaian Ruang <i>Server</i> dengan Standar Keamanan dengan mempertimbangkan Aspek Keamanan	2023
			Penyewaan DRC ( <i>Disaster Recovery Center</i> ) sebagai <i>backup server</i>	2023

No	Kategori Keamanan	Aspek Keamanan	Usulan Kegiatan	Tahun
			Penerapan <i>Demilitarized Zone</i> (DMZ) pada <i>server</i> yang dimiliki	2023
			Pembuatan Prosedur Perawatan Rutin Perangkat UPS	2023
			Penerapan Teknologi <i>Face recognize</i>	2023
			Implementasi ruang situs dan tata letak ( <i>site space and layout</i> )	2023
			Implementasi Infrastruktur Pengkabelan	2023
			Implementasi <i>Tired Reliability</i>	2023
			Prosedur Akses Pusat Data	2023
			Prosedur menambah/mengurangi perangkat pada <i>server</i> di ruang <i>server</i>	2023
			Prosedur <i>remote server</i>	2023
			Prosedur Perawatan <i>Server</i>	2023
			Prosedur Insiden Manajemen	2023

### 3.7.7 Tahap Implementasi Keamanan SPBE

Pada tahap implementasi terbagi menjadi tiga kriteria, yaitu Standar Keamanan, Penanganan Insiden, dan Peningkatan Keamanan. Dimana standar teknis merupakan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan setiap kegiatan keamanan SPBE. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan inventarisir ulang standar keamanan yang sudah dimiliki masing masing perangkat daerah, Berikut daftar standar keamanan yang dapat dijadikan acuan dalam kebutuhan standar keamanan oleh Pemerintah Kota Madiun. Berikut daftar standar keamanan yang dapat dijadikan acuan dalam kebutuhan standar keamanan oleh Pemerintah Kota Madiun seperti pada Tabel Standar Keamanan yang diterapkan.

Tabel Standar Keamanan yang diterapkan

Nama Standar Keamanan	Tanggal Mulai Penerapan
Peraturan BSSN 4/2021	Tahun 2021
ISO 27001: 2013	Tahun 2021 ( <i>Audit Surveillance</i> 2022 Februari)
Pembuatan Standar Kata Sandi	Sudah diterapkan berupa figura bagaimana kata sandi yang baik
Pembuatan Standar Klasifikasi Data dan Informasi	Sudah diterapkan dengan adanya ppid
Pembuatan Pedoman Pencatatan Insiden ( <i>log book</i> )	Sudah diterapkan dan memiliki formulir untuk dokumentasi insiden
SOP Akses ke Ruang Pusat Data	Sudah diterapkan
SOP Audit Internal	Belum diterapkan
SOP <i>Backup</i> dan <i>Restore</i>	Sudah diterapkan
SOP Keamanan Infrastruktur TIK	Sudah diterapkan
SOP Keamanan Kabel	Sudah diterapkan
SOP Media yang Dapat Dilepas ( <i>Removable Media</i> )	Sudah diterapkan
SOP Pelabelan Informasi	Sudah diterapkan
SOP Pembuangan Media	Belum diterapkan
SOP Pemeliharaan Server	Sudah diterapkan
SOP Pengelolaan Risiko	Sudah diterapkan
SOP Penanganan Aset	Sudah diterapkan
SOP Penanganan Insiden	Sudah diterapkan
SOP Pengelolaan Perangkat Hilang	Sudah diterapkan
SOP Pemisahan Lingkungan Pengembangan dan pengujian	Belum diterapkan
SOP Manajemen Kapasitas	Sudah diterapkan
SOP Pengelolaan Akses Server	Sudah diterapkan
SOP Pengelolaan Hak Akses	Sudah diterapkan
SOP Pengelolaan <i>Password</i>	Sudah diterapkan
SOP Pengelolaan Perubahan	Sudah diterapkan
SOP Penilaian dan Penanganan Risiko	Sudah diterapkan
SOP Penilaian Kejadian Keamanan Informasi	Sudah diterapkan
SOP Penilaian Kerentanan Teknis	Belum diterapkan
SOP Penilaian Uji Tuntas Pemasok	Belum diterapkan
SOP Perawatan Peralatan TI	Sudah diterapkan
SOP Permintaan Hak Akses	Sudah diterapkan
SOP Pertukaran Data dan Informasi	Belum diterapkan

Nama Standar Keamanan	Tanggal Mulai Penerapan
SOP Tanggap Insiden Kelanjutan Bisnis	Belum diterapkan
SOP Tinjauan Manajemen	Belum diterapkan
SOP Transfer Media Fisik	Sudah diterapkan
SOP Untuk Bekerja di Area yang aman	Belum diterapkan
SOP Perawatan Genset	Sudah diterapkan
SOP Pemadaman Listrik	Sudah diterapkan
SOP Pengelolaan Akses Non Fisik ( <i>Logic</i> )	Belum diterapkan
SOP Perawatan Rutin Perangkat UPS	Sudah diterapkan
SOP Pengawasan CCTV	Belum diterapkan
SOP Penanganan Insiden dan Ketidaksesuaian	Sudah diterapkan

### 3.7.8 Tahap Evaluasi Keamanan SPBE

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 adalah audit yang dilakukan terhadap Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE. Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE diamanatkan kepada BPPT dan Audit Keamanan SPBE diamanatkan kepada BSSN. Audit dilakukan dalam bentuk Audit Internal dan Audit Eksternal. Audit eksternal adalah Audit yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK (LATIK) Pemerintah dan Swasta Terakreditasi, sedangkan Audit Internal adalah audit yang dilakukan oleh pegawai IPPD yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atau Sekretaris Utama Instansi. Dalam peningkatan Kelaikan Keamanan SPBE, Pemerintah Kota Madiun telah melakukan kegiatan seperti Audit Internal dan Eksternal, dimana secara perangkat audit sudah ditentukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sedangkan Indeks KAMI dapat dilakukan sebagai bentuk penilaian mandiri untuk melihat kesiapan infrastruktur Pemerintah Kota Madiun juga telah melakukan sertifikasi ISO 27001:2013. Secara singkat usulan Kelaikan Keamanan SPBE dapat dilihat pada Tabel Usulan SOP Jaringan.

Tabel Usulan SOP Jaringan

Nama Standar Keamanan	Tanggal Mulai Penerapan
SOP Audit Internal	Belum diterapkan
SOP Pembuangan Media	Belum diterapkan
SOP Pemisahan Lingkungan Pengembangan dan pengujian	Belum diterapkan
SOP Penilaian Kerentanan Teknis	Belum diterapkan
SOP Penilaian Uji Tuntas Pemasok	Belum diterapkan
SOP Pertukaran Data dan Informasi	Belum diterapkan
SOP Tanggap Insiden Kelanjutan Bisnis	Belum diterapkan
SOP Tinjauan Manajemen	Belum diterapkan
SOP Untuk Bekerja di Area yang aman	Belum diterapkan
SOP Pengelolaan Akses Non Fisik (Logic)	Belum diterapkan
SOP Pengawasan CCTV	Belum diterapkan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan bahwa terkait dengan Audit SPBE perlu direncanakan setidaknya 2 tahun sekali untuk Audit Eksternal dan Audit Internal dilakukan dalam 1 tahun sekali. Bentuk tindak lanjut dapat dilakukan dengan penerapan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur menggunakan Tools Audit BPPT/BRIN melalui <https://audit-infrastruktur-aplikasi.bppt.go.id/webaudit-v2/> dan melakukan *Surveillance* ISO 27001:2013 yang harus dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu 2 tahun sejak didapatkannya Sertifikat ISO 27001:2013. Kegiatan *Surveilans* merupakan bentuk sederhana dari proses sertifikasi ISO 27001, dimana proses pengecekan dilakukan secara acak oleh pihak auditor untuk memastikan setiap kebijakan dan tahapan dilaksanakan sesuai ketentuan ruang lingkup ISO 27001.

Tabel Rekomendasi Kegiatan Audit SPBE

No	Audit SPBE	Aktivitas	Standar/ Framework	Tahun Pelaksanaan
1	Surveillance ISO Ke-2	Melakukan Audit ISO tahap 1 (Audit Sertifikasi)	ISO 27001:2013	2023
		Stage 1 (Dokumen Kebijakan dan SOP)		
		Stage 2 (Pengecekan Lapangan)		

No	Audit SPBE	Aktivitas	Standar/ Framework	Tahun Pelaksanaan
2	Resertifikasi ISO 27001	Melakukan Audit ISO Tahap 2 (Resertifikasi) untuk update pada versi yang terbaru ISO 27001:2022	Update ISO 27001:2013 ke ISO 27001:2022	2023
3	Audit Aplikasi	Melakukan Audit Aplikasi Umum dilakukan oleh BPPT sebagai Lembaga Audit TIK (LATIK) Pemerintah, sedangkan Audit Aplikasi Khusus dilakukan oleh Lembaga Audit TIK Swasta Terakreditasi	Tools Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE BPPT / BRIN	2023, 2025, 2027
4	Audit Infrastruktur	Melakukan Audit internal terkait Infrastruktur Kota Madiun menggunakan Tools BPPT/BRIN	Tools Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE BPPT/BRIN	2023, 2025, 2027

### 3.7.9 Tahap Tindak Lanjut Keamanan SPBE

Proses tindak lanjut sangat berkaitan dengan ketidaksesuaian tingkat penanganan insiden, dimana kesiapan penanganan dinilai berdasarkan tiga level, tinggi sedang dan rendah. Tindak lanjut adalah tindakan korektif untuk memastikan perbaikan pada temuan sudah dilaksanakan atau tidak. Dalam Kerangka Kerja Keamanan Informasi ISO (*Information Security Management System*), tahapan tindak lanjut merupakan tahapan akhir sebelum nantinya kembali pada siklus pertama yaitu perencanaan. Bentuk identifikasi kerentanan keamanan SPBE yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada Tabel Peningkatan Keamanan SPBE. Bentuk identifikasi keamanan dilakukan untuk menemukan celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak pihak tidak bertanggung jawab mendapatkan informasi atau tindakan merugikan lainnya.

Tabel Peningkatan Keamanan SPBE

Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE
<i>Configuration Management</i>	<i>Configuration management</i> dibutuhkan untuk mencatat setiap aset TIK yang terhubung dengan internet. Sehingga lebih mudah dalam pendataan aset dan IP yang digunakan	Selalu aktif dilaksanakan
Update Patch server secara berkala	Proses pembaharuan <i>patch</i> untuk memastikan mendapatkan fitur dan kondisi terbaru dari server	Harus meminta permit dulu untuk melaksanakan update patch
Memperbaharui lisensi perangkat keras dan lunak berkala	Proses pembaharuan lisensi perangkat untuk mendapatkan fitur terbaru	Sudah dilaksanakan
Implementasi DRC	DRC digunakan sebagai cadangan server untuk meminimalisir <i>downtime</i> jika terjadi insiden	Sudah dilaksanakan
Penerapan Proses Enkripsi dan Dekripsi	Proses enkripsi dan dekripsi untuk memastikan data atau password tetap aman ketika melakukan komunikasi	Sudah dilaksanakan
Menerapkan metode Verifikasi Data	Tahapan verifikasi untuk memastikan data yang masuk merupakan data yang sudah sesuai	Sudah dilaksanakan
Implementasi tanda tangan digital	Untuk mempermudah proses layanan elektronik dan mencegah terjadinya penggunaan tanda tangan tanpa izin	Sudah TTE
Pemanfaatan CCTV di ruang publik	Memantau lokasi lokasi publik yang dirasa berpotensi terjadi insiden atau pada akses akses utama	Sudah ada pada ruang publik dan titik kerawanan

<b>Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE</b>	<b>Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE</b>	<b>Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE</b>
Peningkatan kompetensi SDM dalam bidang Keamanan Informasi	Peningkatan kompetensi SDM untuk memastikan personil terkait tetap <i>update</i> dengan kondisi terkini	Dilaksanakan pada bulan maret 2021 untuk <i>training</i> keamanan informasi
Peremajaan Perangkat TIK	Untuk mengurangi risiko terjadinya kerusakan perangkat, terutama pada perangkat yang sudah berusia lebih dari 5 tahun.	Bertahap dilaksanakan

Berdasarkan Standar SNI ISO-IEC 27001: 2013 pada klausul 10 terkait Tindak Lanjut untuk proses tindak lanjut yang berkaitan dengan ketidaksesuaian tingkat penanganan insiden, dimana kesiapan penanganan dinilai berdasarkan tiga level, tinggi sedang dan rendah. Tindak lanjut adalah tindakan korektif untuk memastikan perbaikan pada temuan sudah dilaksanakan atau tidak. Dalam konsep kerangka kerja keamanan informasi, tahapan tindak lanjut merupakan tahapan akhir sebelum nantinya kembali pada siklus pertama yaitu perencanaan. Dalam pembahasan terkait Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif yang didapatkan beberapa tindakan yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan tindakan terhadap ketidaksesuaian dengan mengambil tindakan untuk mengendalikan dan mengoreksi terjadinya ketidaksesuaian serta menangani konsekuensi yang terjadi.
2. Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan/mengeliminasi penyebab ketidaksesuaian yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian yang terulang kembali dan di tempat lain dengan melakukan Reviu ketidaksesuaian, Menentukan penyebab ketidaksesuaian, dan Menentukan ketidaksesuaian yang serupa atau potensi terjadinya kembali.
3. Melaksanakan tindakan pencegahan dalam bentuk apapun yang diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian.



4. Mereviu efektivitas tindakan korektif apapun yang diambil
5. Membuat perubahan pada Sistem Manajemen Keamanan Informasi apabila diperlukan.

Sedangkan dalam perbaikan berkelanjutan bertujuan sebagai tindakan yang dilakukan oleh Instansi untuk selalu melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian, kecukupan, dan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap penerapan SPBE dapat melalui *penetration testing* dan *vulnerability assessment* pada data dan informasi, aplikasi dan infrastruktur yang ada pada lingkup Pemerintahan Kota Madiun yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya peretasan dan kehilangan data. Penanganan insiden Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (3) huruf d dilaksanakan paling sedikit melalui:

1. Mengidentifikasi sumber serangan keamanan.
2. Menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya.
3. Memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi.
4. Mendokumentasi bukti insiden yang terjadi.
5. Memitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE.

Seperti dapat dilihat pada Tabel Rekomendasi Penanganan Insiden Keamanan SPBE insiden yang terjadi dicatat hingga pada tahap kematangan penanganan insiden Keamanan SPBE dan tanggal kegiatan.

Tabel Rekomendasi Penanganan Insiden Keamanan SPBE

Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Penangan Insiden Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Ketengangan Insiden Keamanan
Terjadinya serangan pada server	Berisikan pedoman jika terjadi serangan pada server, seperti misalnya <i>malware</i> , <i>hacker</i> dan lainnya	<b>Sedang</b> (tergantung pada kesiapan Pemerintah Kota Madiun)	Sesuai terjadinya insiden	Jarang terjadi namun tergolong <i>critical incident</i>
Penanganan terjadinya pemadaman	Berisikan pedoman jika terjadi pemadaman listrik	<b>Tinggi</b> (tergantung pada kesiapan Pemerintah Kota Madiun)	Sesuai terjadinya insiden	Biasanya ada surat dan selalu prepare
Penanganan kegagalan UPS	Berisikan pedoman jika terjadi kegagalan UPS	<b>Tinggi</b> (tergantung pada kesiapan Pemerintah Kota Madiun)	Sesuai terjadinya insiden	Jumlah UPS ada 3 dan paralel
Penanganan kerusakan infrastruktur	Berisikan pedoman jika terjadi kerusakan infrastruktur	<b>Tinggi</b> (tergantung pada kesiapan Pemerintah Kota Madiun)	Sesuai terjadinya insiden	Rusak langsung ganti
Penanganan Insiden dan Ketidaksesuaian	Berisikan pedoman jika terjadi insiden dan ketidaksesuaian	<b>Tinggi</b> (tergantung pada kesiapan Pemerintah Kota Madiun)	Sesuai terjadinya insiden	Sudah dilakukan penanganan berdasarkan dengan prosedur insiden

<b>Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE</b>	<b>Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE</b>	<b>Nilai Kematangan Penangan Insiden Keamanan SPBE</b>	<b>Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE</b>	<b>Ketengangan Insiden Keamanan</b>
Penanganan Kehilangan Aset atau Data	Berisikan pedoman jika terjadi kehilangan aset atau data	Rendah (tergantung pada kesiapan Pemerintah Pemerintah Kota Madiun)	Sesuai terjadinya insiden	Masih belum mengalami dan belum ada acuan serta ukuran

3.8 Peta Rencana Audit SPBE

Berdasarkan Hasil Penilaian SPBE tahun 2021 didapatkan bahwa Aspek Audit TIK yang mendapat nilai 2,00 dengan predikat “Cukup”. Secara keseluruhan penerapan pada Aspek pelaksanaan Audit TIK yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun yaitu pelaksanaan audit keamanan SPBE. Pada Aspek pelaksanaan Audit TIK ini dapat terlihat adanya pelaksanaan audit keamanan SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkot Madiun. Pelaksanaan audit keamanan pada Pemkot Madiun dibuktikan dengan pelaksanaan internal audit untuk keamanan SPBE yang sesuai dengan sertifikat ISO 27001. Namun disisi lain terdapat kelemahan yaitu pelaksanaan audit infrastruktur dan pelaksanaan audit aplikasi SPBE dimana kegiatan audit ini belum dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti pada Renstra. Audit SPBE dapat dikelompokkan menjadi Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur Pemerintah Daerah SPBE dan Audit Keamanan yang secara rinci telah dijelaskan pada Tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan Audit TIK berdasarkan kategori Audit TIK SPBE

No	Audit SPBE	Aktivitas	Standar/ Framework	Tahun
1	<b>Audit Infrastruktur SPBE</b>	a. Penyiapan Tim Audit	Tools Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE BPPT/BRIN dan ISO 27001 : 2022	2023, 2025, 2027
		b. <i>Quick assessment</i>		
		c. Penyiapan rencana audit Infrastruktur SPBE		
		d. Penyepakatan rencana audit Infrastruktur SPBE		
		e. Penyiapan protokol audit Infrastruktur SPBE		
		f. Penetapan parameter acuan yang akan dilakukan audit Infrastruktur SPBE		
		g. Pertemuan pembukaan kegiatan audit Infrastruktur SPBE		
		h. Pelaksanaan lapangan audit Infrastruktur SPBE		

No	Audit SPBE	Aktivitas	Standar/ Framework	Tahun
		i. Pertemuan penutupan kegiatan audit Infrastruktur SPBE j. Analisa data audit Infrastruktur SPBE k. Pengelolaan data audit Infrastruktur SPBE l. Penyusunan laporan audit Infrastruktur SPBE m. <i>Proof-read</i> laporan audit Infrastruktur SPBE n. Penyerahan laporan audit Infrastruktur SPBE o. Evaluasi aktivitas audit Infrastruktur SPBE		
2	<b>Audit Aplikasi SPBE</b>	a. Penyiapan tim audit aplikasi SPBE b. <i>Quick assessment</i> c. Penyiapan rencana audit aplikasi SPBE d. Penyepakatan rencana audit aplikasi SPBE e. Penyiapan protokol audit aplikasi SPBE f. Penetapan parameter acuan yang akan dilakukan audit aplikasi SPBE g. Pertemuan pembukaan kegiatan audit aplikasi SPBE h. Pelaksanaan lapangan audit aplikasi SPBE i. Pertemuan penutupan kegiatan audit aplikasi SPBE j. Analisa data audit aplikasi SPBE k. Pengelolaan data audit aplikasi SPBE l. Penyusunan laporan audit aplikasi SPBE	Tools Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE BPPT/BRIN  Dan  ISO 27001: 2022	2023, 2025, 2027

No	Audit SPBE	Aktivitas	Standar/ Framework	Tahun
		m. Proof-read laporan audit aplikasi SPBE		
		n. Penyerahan laporan audit aplikasi SPBE		
		o. Evaluasi aktivitas audit aplikasi SPBE		
3	<b>Audit Keamanan SPBE</b>	a. Permintaan pelaksanaan kegiatan Audit Keamanan SPBE	Tools Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE BPPT/ BRIN Dan ISO 27001 : 2022	2023, 2025, 2027
		b. Penugasan Tim Audit Keamanan SPBE		
		c. Perencanaan Kegiatan Audit Keamanan SPBE		
		d. <i>Surveillance</i> ISO Ke-2		
		e. Resertifikasi ISO 27001		

## **BAB IV**

### **RENCANA ANGGARAN**

Pada Bab ini akan membahas terkait perencanaan anggaran mulai dari pengadaan dalam penyelenggara dan SDM SPBE, aplikasi dan anggaran paket pekerjaan.

#### 4.1 Rencana Anggaran Penyelenggara dan SDM SPBE

Rencana anggaran Penyelenggara SDM SPBE merupakan kisaran rincian anggaran dalam pemenuhan dan penyelenggaraan SDM yang diusulkan. Kisaran anggaran ini diperoleh berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan. Tujuan pemberian kisaran anggaran ini agar dapat memberikan tunjangan terkait SDM usulan dan membantu proses manajemen pada masing-masing Pemerintah Kota Madiun. Anggaran tertulis dalam dokumen ini bisa disesuaikan Kembali dengan kompleksitas kebutuhan dan manajemen dari setiap PD Kisaran Biaya Pengadaan SDM Penyelenggara SPBE.

##### 4.1.1 Rencana Anggaran Pengadaan SDM Penyelenggara SPBE

Rencana anggaran pengadaan SDM adalah anggaran dalam penggajian terkait pengadaan SDM yang diusulkan. Penentuan gaji pada penyelenggara SDM SPBE disini dibagi berdasarkan pengalaman kerjanya, yaitu *Entry Level* (berkontribusi dan berpengalaman kurang dari 3 tahun pada bidang tertentu), *Experienced* (berpengalaman 3-5 tahun pada bidang tertentu), *Senior* (berpengalaman lebih dari 5 tahun pada bidang tertentu). Detail dari kisaran rincian anggaran dapat dilihat pada Tabel Rencana Anggaran Pengadaan SDM Penyelenggara SPBE.

Tabel Rencana Anggaran Pengadaan SDM Penyelenggara SPBE

No	Kompetensi	Job Level		
		Entry Level	Experienced	Senior
1	Operator User Sistem	Rp3,852,342	Rp4,078,846	Rp5,485,518
2	Programmer	Rp4,804,681	Rp6,002,875	Rp6,002,875
3	Admin Website	Rp3,021,329	Rp3,635,049	Rp4,185,717
4	Admin Database	Rp3,088,769	Rp4,012,100	Rp4,524,008

No	Kompetensi	Job Level		
		Entry Level	Experienced	Senior
5	Analisis dan Desain Sistem	Rp6,158,207	Rp7,634,429	Rp8,509,205
6	Teknisi Komputer	Rp3,048,012	Rp4,041,548	Rp4,225,637
7	Service/Help Desk	Rp4,147,070	Rp6,000,000	Rp7,000,000
8	Admin Jaringan	Rp3,048,012	Rp4,041,548	Rp4,225,637
9	Administrator Keamanan TI	Rp10,000,000	Rp12,000,000	Rp15,000,000

Sumber: <https://gajimu.com/>

#### 4.1.2 Rencana Anggaran Pengembangan Kompetensi SDM SPBE

Rencana anggaran pengembangan kompetensi SDM SPBE merupakan acuan dalam perencanaan anggaran untuk pengembangan kompetensi SDM SPBE baik yang dimiliki maupun yang diusulkan. Bentuk pengembangan kompetensi SDM SPBE yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan dan sertifikasi. Tujuannya pengembangan kompetensi ini adalah guna menunjang tugas dari teknisi dalam melakukan operasional TIK.

##### a) Rencana Anggaran Pelatihan

Rencana anggaran biaya pelatihan pada Tabel Rencana dan Anggaran Pelatihan di bawah ini, dapat menjadi acuan untuk pengadaan pada masing-masing teknisi. Detail kisaran anggaran didapatkan pada beberapa Lembaga penyedia pelatihan.

Tabel Rencana dan Anggaran Pelatihan

Pelatihan	Kisaran Harga Pelatihan	Sumber
Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Rp8.000.000	itgid.org
Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Rp12.000.000	itgid.org
Manajemen Proyek (PMP)	Rp6.500.000	pmexcellent.com
Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Rp4.950.000	trainingcenter.co.id
Enterprise Architecture (TOGAF)	Rp11.000.000	itgid.org
Business Process Re-Engineering	Rp3.900.000	e-trainingonline.com
Business Process Management	Rp3.900.000	trainingcenter.co.id
Analisis dan Software Testing	Rp799.000	expertindo-training.com



Pelatihan	Kisaran Harga Pelatihan	Sumber
Programmer (OCA, OCP)	Rp2.000.000	reed.co.uk
Desain Basis Data ( <i>Database</i> ) ( <i>Online</i> )	Rp799.000	udemy.com
<i>Big Data Analyst</i> ( <i>Online</i> )	Rp279.000	udemy.com
Administrasi Basis Data (MCDBA)	Rp981.376- Rp5.153.533	newhorizons.com
Integrasi Data	Rp799.000	udemy.com
Desain Jaringan Komputer (CCDA) ( <i>Online</i> )	Rp279.000	udemy.com
Administrasi Jaringan Komputer (CCNA <i>Routing and Switching</i> )	Rp429.000	skillacademy.com
<i>Service Desk</i> (CompTIA A+) ( <i>Online</i> )	Rp279.000	udemy.com
Teknisi Komputer (CompTIA ITF+) ( <i>Online</i> )	Rp5.692.134	udemy.com
GIS ( <i>Geographic Information System</i> )	Rp42.798.000	esri.com
<i>Artificial Intelligence</i> (AI)	Rp1.599.000	towardsdatascience.com
Teknis Keamanan Informasi (CCNA <i>Security</i> )	Rp11.412.800	netcampus.co.id
Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	Rp12.000.000	itgid.org
Desainer Multimedia	Rp6.500.000	indo-asia.com
Desainer Grafis	Rp2.150.000	netcampus.co.id
IoT ( <i>Online</i> )	Rp799.000	udemy.com
<i>Cloud Computing</i> (AWS) ( <i>Online</i> )	Rp359.436	digitalcloud.training
ERP Analisis	Rp18.545.800	indo-asia.com
<i>Web Content Management Social Media</i> ( <i>Online</i> )	Rp799.000	udemy.com
<i>Data Center Technical Support</i> (CCNA <i>Data Center</i> )	Rp4.279.800	netcampus.co.id
IT <i>Disaster Recovery</i>	Rp9.000.000	itgid.org

b) Kisaran Biaya Sertifikasi

Kisaran biaya sertifikasi pada Tabel Kisaran Biaya Sertifikasi di bawah ini, dapat menjadi acuan untuk pengadaan pada masing-masing teknisi. Detail kisaran anggaran didapatkan pada beberapa Lembaga penyedia sertifikasi.

Tabel Kisaran Biaya Sertifikasi

Sertifikasi	Kisaran Harga Sertifikasi	Sumber
Tata Kelola dan Manajemen TI (ITIL, COBIT)	Rp6.900.000	itgid.org
Evaluasi dan Audit SI (CISA)	Rp8.500.000	itgid.org
Manajemen Proyek (PMP)	Rp7.917.630	pmexcellent.com
Manajemen Investasi Teknologi Informasi (ITAM)	Rp4.950.000	itamorg.com
<i>Enterprise Architecture</i> (TOGAF)	Rp10.500.000	itgid.org
<i>Business Process Re-Engineering</i>	Rp5.450.000	bpm institute.org
<i>Business Process Management</i>	Rp5.750.000	bpm institute.org
Analisis dan <i>Software Testing</i>	Rp3.595.750	iccp.org
Programmer (OCA, OCP)	Rp 3.530.450	blogs.oracle.com
Desain Basis Data ( <i>Database</i> )	Rp 3.530.450	education.oracle.com
Big Data Analyst	Rp3.000.000	theproductcompany.com
Administrasi Basis Data (MCDDBA)	Rp1.711.920	newhorizons.com
Integrasi Data	Rp2.000.000	talend.com
Desain Jaringan Komputer (CCDA)	Rp279.000	cbt nuggets.com
Administrasi Jaringan Komputer (CCNA Routing and Switching)	Rp5.150.000	cbt nuggets.com
Service Desk (CompTIA A+)	Rp9.258.634	comptia.org
Teknisi Komputer (CompTIA ITF+)	Rp5.692.134	comptia.org
GIS (Geographic Information System)	Rp5.000.000	esri.com
Artificial Intelligence (AI)	Rp7.846.300	towardsdatascience.com
Teknis Keamanan Informasi (CCNA Security)	Rp4.636.450	cbt nuggets.com
Manajemen Keamanan Informasi (KAMI, ISO 27001, CISM, CISSP)	Rp12.000.000	itgid.org
Desainer Multimedia	Rp6.500.000	indo-asia.com
Desainer Grafis	Rp2.150.000	netcampus.co.id
IoT	Rp2.000.000	docs.microsoft.com
Cloud Computing (AWS)	Rp 286.220	digitalcloud.training
ERP Analisis	Rp799.000	indo-asia.com
Data Center Technical Support (CCNA Data Center)	Rp4.279.800	cbt nuggets.com
IT Disaster Recovery	Rp9.000.000	itgid.org

#### 4.2 Rencana Anggaran Manajemen SPBE

Rencana anggaran manajemen ini didapat dengan melakukan benchmark dari beberapa vendor konsultan TI. Manajemen SPBE disini dilakukan dengan pendampingan penyiapan dokumen kebutuhan manajemen dana pemberian bimtek terhadap SDM terkait. Kisaran harga ini berlaku untuk pelaksanaan manajemen di satu PD. Harga dapat bertambah tergantung dari lingkup pelaksanaan manajemen tersebut. Detail anggaran dapat dilihat pada Tabel Rencana Anggaran Biaya Manajemen SPBE berikut.

**Tabel Rencana Anggaran Biaya Manajemen SPBE**

Manajemen SPBE	Kisaran Anggaran
Manajemen Risiko	100 – 150 jt
Manajemen Keamanan Informasi	150 – 175 jt
Manajemen Data	150 – 175 jt
Manajemen Aset TIK	100 – 150 jt
Manajemen SDM	100 – 150 jt
Manajemen Pengetahuan	100 – 150 jt
Manajemen Perubahan	100 – 150 jt
Manajemen Layanan SPBE	150 – 175 jt

#### 4.3 Rencana Anggaran Pembuatan SOP Layanan SPBE

Rencana anggaran dalam pembuatan SOP didasarkan pada seberapa kompleks alur proses bisnis yang akan direncanakan. Umumnya anggaran dalam pembuatan SOP berkisar di angka 36 sampai 50 juta. Kisaran anggaran ini didapatkan dari *benchmark* beberapa vendor penyedia jasa konsultasi IT. Kisaran anggaran ini untuk, penyusunan form, jumlah *user* pengguna aplikasi, berapa kali proses pelaksanaan sosialisasi SOP dan jumlah SOP pelengkapanya. Penentuan kisaran SOP terbagi menjadi 3 yaitu kompleksitas sedang rendah dan tinggi. Penjelasannya seperti di bawah ini:

- Untuk alur proses bisnis dengan kompleksitas rendah, maka anggarannya berkisar antara 36-40 juta. Dengan penentuan indikatornya yaitu SOP layanan yang dibuat tidak lebih dari 2 SOP pendukung.
- Untuk alur proses bisnis dengan kompleksitas sedang, maka anggarannya berkisar antara 40-45 juta. Dengan penentuan indikatornya yaitu SOP layanan yang dibuat tidak lebih dari 3 SOP pendukung.

- Untuk alur proses bisnis dengan kompleksitas tinggi, maka anggarannya berkisar antara 45-50 juta. Dengan penentuan indikatornya yaitu SOP layanan yang dibuat tidak lebih dari 4 SOP pendukung,
- karena SOP ini pendukung layanan yang didukung oleh aplikasi dengan memiliki beberapa modul dan beberapa alur yang berbeda namun tetap dalam satu layanan SPBE.

#### 4.4 Rencana Anggaran Arsitektur Aplikasi SPBE

Rencana anggaran arsitektur aplikasi SPBE yang dibahas pada sub bab ini merupakan perkiraan anggaran, di mana dalam dokumen ini bersifat prediksi dan dibuat dengan metode perbandingan dengan harga saat ini (*benchmark*) sehingga tentu secara fleksibel dapat berubah menyesuaikan standar harga pada tahun berjalan. Aktivitas ini menghasilkan daftar perkiraan biaya untuk setiap aplikasi yang direkomendasikan. Hasil prakiraan diperoleh dari hasil analisis dengan sembilan indikator perhitungan, yaitu:

- a) Potensi integrasi dengan PD lain. Jika terdapat potensi integrasi dengan OPD lain maka diberi nilai 2, jika tidak maka diberi nilai 1.
- b) Jumlah tabel database. Jika jumlah tabel lebih dari 50 maka dikatakan kompleks dan diberikan nilai 2, sedangkan jika kurang dari 50 tabel diberikan nilai 1.
- c) Jumlah aplikasi yang terintegrasi. Jika terdapat minimal 3 aplikasi yang terintegrasi maka diberikan nilai 2, sedangkan jika integrasi kurang dari 3 diberikan nilai 1.
- d) Jumlah kelompok user. Jika kelompok user lebih dari 4 maka dikatakan kompleks dan diberikan nilai 2, sedangkan jika kurang dari 4 kelompok user maka diberikan nilai 1.
- e) Jumlah fitur. Jika terdapat sekurang-kurangnya 10 fitur maka diberikan nilai 2, sedangkan jika sebaliknya maka diberikan nilai 1.
- f) Jumlah pengguna. Jika pengguna berjumlah lebih dari sama dengan 200 maka diberikan nilai 2, jika pengguna kurang dari 200 maka diberikan nilai 1.
- g) Besar data per transaksi. Jika terdapat tautan file data yang dilampirkan maka diberikan nilai 2, jika sebaliknya maka diberikan nilai 1.

- h) Panjang alur proses bisnis. Jika proses bisnis usulan SI/ pengembangan SI eksisting lebih dari 4 langkah maka diberikan nilai 2, jika kurang dari 4 langkah diberikan nilai 1.
- i) Konsistensi *maintenance*. Jika aplikasi yang diusulkan perlu untuk dilakukan pengembangan berkala, misal dalam kurun waktu satu (1) tahun sekali dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap aplikasi tersebut, maka diberikan nilai 2. Sedangkan jika tidak diperlukan pengembangan berkala diberikan nilai 1.

Penentuan nilai kompleksitas dari sebuah aplikasi ini dikelompokkan menjadi 4 tipe berdasarkan kompleksitas pembangunan aplikasi, diantaranya sebagai berikut :

- Pengembangan minor: pengembangan yang hanya memerlukan penambahan sedikit fitur, seperti penambahan hak akses, dan update data yang pengembangannya dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Aplikasi usulan menggunakan aplikasi dari pusat juga termasuk dalam kategori ini. Untuk kategori pengembangan minor tidak membutuhkan biaya Rp 0.
- Dasar: Halaman dengan informasi statis dan biayanya sekitar 75 – 100 juta.
- Kompleksitas Sedang: Halaman dengan informasi statis, beberapa unit fungsional dan API, juga integrasi pihak ketiga. Biaya aplikasi berbasis web di tingkat kompleksitas sedang sekitar 101 – 175 juta.
- Sangat Kompleks: Semua fitur dari “Kompleksitas Sedang”, ditambah aktivitas multi pengguna, *high user load*, dan statistik khusus. Biayanya bisa mencapai 176 – 300 juta.

Sehingga, hasil perhitungan *benchmark* dan *range* anggaran dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel Perhitungan Aplikasi

Skor	Kompleksitas	Rentang Harga
0	Pengembangan minor	0
1 - 16	Kompleksitas Dasar	75 - 100 juta
32 - 64	Kompleksitas Sedang	101 - 175 juta
128 - 256	Sangat Kompleks	176 - 300 juta

Aplikasi rentang harga 0 diberikan jika pengembangan aplikasi minor, yaitu pengembangan yang hanya memerlukan penambahan sedikit fitur, seperti penambahan hak akses, dan update data yang pengembangannya dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Aplikasi Rentang harga 0 juga berlaku untuk usulan menggunakan aplikasi dari pusat. Kisaran anggaran untuk masing-masing aplikasi yang diusulkan akan disajikan pada Tabel Rencana Anggaran Aplikasi.

Tabel Rencana Anggaran Aplikasi

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
1	Bagian Organisasi	E-SOP	Aplikasi sebagai media dalam proses Penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan Alur pekerjaan masing-masing Subkoordinator/Eselon IV	75-100 juta
2	Bagian Organisasi	Aplikasi SUKMA	Satu Aplikasi yang dapat disebarakan kepada masyarakat guna untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah Kota Madiun. Dapat dibuatkan modul ( <i>page</i> ) tiap OPD sesuai kebutuhan masing-masing, akan tetapi seluruh data SKM Pemerintah Daerah akan terkumpul dalam satu aplikasi tersebut. Tiap OPD juga memiliki akses sebagai admin untuk melihat data SKM yang telah masuk untuk selanjutnya akan dilaksanakan analisis dan menghasilkan Nilai IKM.	0
3	Bagian Hukum	Pengembangan JDIH	JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat. Pengembangan aplikasi JDIH dapat dilakukan dengan menambahkan fitur yang memungkinkan dapat melakukan pelayanan koreksi produk hukum daerah secara <i>online</i> , Perangkat daerah yang mengajukan koreksi produk hukum tidak perlu lagi datang secara langsung ke Bagian Hukum, tetapi pengajuan koreksi Rancangan produk hukum dengan mengirimkan <i>soft copy</i> file melalui aplikasi untuk kemudian dilakukan koreksi secara berjenjang oleh korektor dan menerima kembali hasil tanpa banyak menghabiskan waktu dan tenaga sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu dikembangkan juga fitur Registrasi Penomoran dan Pengiriman Produk Hukum secara <i>online</i>	75-100 juta

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
4	Bagian Hukum	Aplikasi Bantuan Hukum dan HAM ( <a href="https://sidbankum.bphn.go.id/">https://sidbankum.bphn.go.id/</a> )	Aplikasi yang memfasilitasi permohonan bantuan hukum serta permasalahan HAM secara gratis kepada masyarakat kurang mampu, serta proses Perjanjian Kerjasama, Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan di bidang hukum yang dapat diproses secara <i>online</i> . Selain itu juga menampilkan dashboard data-data berkaitan dengan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan beserta progress penanganan. Semua data akan terekam di aplikasi ini sehingga akan mudah melakukan pengelolaan data	0
5	Bagian Hukum	Pengembangan Website Bagian Hukum	<i>Website</i> sebagai sarana informasi dapat dikembangkan lagi dengan memberikan informasi terkait pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan keluarga sadar hukum. Dapat juga dipublikasi materi terkait pembinaan keluarga sadar hukum tersebut.	0
6	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	e-BUMD	Sistem aplikasi yang berisi data-data dan Informasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan digunakan sebagai proses pendaftaran seleksi BUMD serta proses pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0
7	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Sistem Informasi Pengelolaan Hibah	Untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan bantuan hibah tempat ibadah, serta transparansi data dalam pengelolaan dana hibah	75-100 juta
8	Bagian Umum	Aplikasi Pelayanan Internal Sekretariat Daerah	Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan dalam proses peminjaman/penggunaan kendaraan dinas, serta digunakan untuk memudahkan proses permintaan penyediaan jamuan makan dan minum rapat. Menampilkan data terkait ketersediaan kendaraan dinas dan juga menampilkan menu jamuan yang dapat disediakan.	75-100 juta



No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
9	Bagian Umum	Website Bagian Umum	Website penyebaran informasi terkait Sekretariat Daerah Bagian Umum, yaitu berupa profil, laporan, berita, kontak, dan informasi lainnya.	0
10	Bagian Pemerintahan	Sistem Informasi Kerja Sama Daerah	Sistem informasi untuk mengelola data kerjasama daerah untuk memudahkan dalam evaluasi pelaksanaan kerja sama serta memudahkan perangkat daerah yang akan mengajukan kerja sama.	75-100 juta
11	Bagian Pemerintahan	Aplikasi Kewilayahan	Aplikasi pemetaan wilayah yang berfungsi untuk mengelola pemetaan batas wilayah antar kelurahan, kecamatan, dan daerah. Aplikasi berbasis WEBGIS dan berisikan informasi mengenai batas wilayah tersebut.	75-100 juta
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Kebencanaan	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) merupakan Unit teknis yang memiliki peran yang strategis serta sangat teknis dalam penanggulangan bencana termasuk di Kota Madiun. Salah satu fungsinya adalah sebagai pusat Data dan Informasi Kebencanaan; Fungsi Pusat Data dan Informasi Kebencanaan adalah sebagai penerima, pengolah, dan pendistribusi informasi. Dalam rangka mengoperasikan mengoptimalkan pencatatan peristiwa bencana perlu dicatat sesuai dengan ciri-ciri setiap peristiwa bencana yang datanya diperlukan untuk membuat hubungan antar variabel dalam mengembangkan statistik runtun waktu, seperti, tren jangka panjang dari dampak bencana. Dampak bencana yang dihimpun ke dalam database adalah dampak korban jiwa dan nominal kerugian harta benda. Untuk mengakomodir hal tersebut maka dibuatlah Sistem Informasi Kebencanaan berbasis WEB yang dapat diakses oleh semua orang dan operator piket Pusdalops BPBD Kota Madiun.	75-100 juta

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengembangan Website BPBD	Menambahkan fitur yang dapat mengisi formulir dan mengupload berkas pengajuan pelayanan Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, sehingga publik tidak harus datang ke kantor	0
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Sistem informasi yang bertujuan untuk keperluan Pengolahan Data Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam, meliputi seluruh tahap pelaksanaan sampai dengan Laporan Akhir proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi	75-100 juta
15	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Aplikasi penyusunan dokumen perencanaan OPD (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja)	Untuk memberikan data dan informasi terkait data kinerja dan anggaran mengenai sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	75-100 juta
16	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Website BAPEDALITBANG	Memanfaatkan website Bapedalitbang untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	0
17	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Aplikasi Pengendalian dan Informasi Pembangunan	Memantau Perencanaan penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja) di seluruh OPD	75-100 juta
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Aplikasi E-KAK	Aplikasi tindak lanjut dari e-kak untuk melihat APBD. Aplikasi yg dapat memfasilitasi pembahasan rdp apbd pada DPRD antara eksekutif dan legislatif	0

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi verifikasi anggaran dan Laporan Keuangan secara terintegrasi	Aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses verifikasi data anggaran dan digunakan untuk pengumpulan data hasil kegiatan dan laporan pertanggungjawaban Anggaran	75-100 juta
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Penyimpanan Berkas untuk Laporan dan SPJ	Belum ada aplikasi untuk upload bukti dukung seperti saat SPJ, sehingga masih berupa dokumen fisik yang disimpan pada OPD. sehingga Ketika BPK meminta bukti selalu datang ke OPD (seharusnya dapat dilihat melalui aplikasi)	75-100 juta
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengembangan SIM GAJI	Mengembangkan aplikasi SIM Gaji dari aplikasi Desktop menjadi Website agar mudah diakses, serta menambahkan modul untuk mengelola proses permohonan dan penerbitan SKPP secara online	75-100 juta
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	E-Retribusi Daerah	Aplikasi pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD). aplikasi e-retribusi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efisien waktu, meminimalisir kesalahan pencatatan data, serta meminimalisir kesalahan transaksi pembayaran ketika melakukan pembayaran retribusi PKD.	75-100 juta
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Pengguna /Penyewa Kekayaan Daerah	Daftar pengguna/penyewa Kekayaan Daerah (ruko, sawah, bangunan gedung , gudang dll) masih di simpan secara manual baik Data pribadi maupun kelengkapan administrasinya. Dengan adanya aplikasi ini harapannya data dapat tersimpan secara online maupun proses pengguna atau penyewaan juga dapat dilakukan secara <i>online</i> .	75-100 juta

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Aplikasi Penerimaan Dan Pengeluaran Barang Habis Pakai	Penerimaan dan pengeluaran habis pakai masih dilaporkan secara manual oleh masing masing OPD. Harapannya dengan adanya aplikasi pelaporan ini dapat dilakukan secara online untuk mempermudah prosesnya	75-100 juta
25	Badan Pendapatan Daerah	Pengembangan SIMPADAMA	Mengembangkan SIMPADAMA sebagai Sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah yang dapat membantu mengolah seluruh data pendapatan asli daerah (PAD) . Dikembangkan dengan mengintegrasikan seluruh data yang termasuk pendapatan daerah lainnya (Selain pajak daerah), seperti retribusi, dan pendapatan daerah lainnya	0
26	Badan Pendapatan Daerah	Sistem Informasi PBB	Mengembangkan sistem informasi terkait PBB untuk mendukung seluruh pelayanan yang berkaitan dengan PBB agar lebih efektif dan efisien secara pelayanan maupun data. Aplikasi ini juga dibuat untuk mempermudah dan sebagai panduan bagi masyarakat untuk cara cek pajak PBB secara <i>online</i> , untuk mengetahui status pembayaran, status piutang, informasi SPPT, tempat pembayaran, cek status berkas, saran dan masukan atau pengaduan wajib pajak langsung masuk ke pejabat terkait sehingga penanganan pengaduan lebih cepat sehingga meningkatkan kepuasan pelayanan masyarakat.	0
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Legalisir dan Keabsahan <i>Online</i>	Aplikasi yang dapat memudahkan dalam pelayanan legalisir secara <i>online</i> . Masyarakat dapat mengupload berkas tanpa harus datang ke kantor dan akan terdapat informasi terkait status permohonan legalisir.	75-100 juta

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Pengembangan ASN	Aplikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi pengembangan kompetensi SDM yang bertujuan untuk mengelola perencanaan pengembangan kompetensi SDM Pemerintah Daerah. Aplikasi ini berfungsi sebagai penyebaran informasi dan pengumpulan data terkait pengembangan kompetensi pegawai, seperti pelaksanaan Bimtek, Seminar, Workshop, Sertifikasi, dsb yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi SDM.	75-100 juta
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Seleksi Terbuka	Aplikasi Selter digunakan untuk pendaftaran seleksi terbuka JPTP yang hasil seleksi bisa terintegrasi dengan SIK (Pejabat terpilih terinput di SIK melalui aplikasi Selter)	75-100 juta
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Permohonan/Perizinan/Pengajuan Kepegawaian	Aplikasi yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan/perizinan secara online terkait urusan kepegawaian, termasuk Aplikasi Pindah Antar Wilayah (PAW) atau Mutasi antar Pemda	75-100 juta
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengembangan Website Bangkesbangpol	Mengembangkan <i>website</i> Bangkesbangpol sebagai media dalam mengedukasi masyarakat terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai sejarah kebangsaan	0

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SIORMAS (Sistem Informasi Pendataan Ormas)	Aplikasi untuk mengelola data Organisasi Masyarakat yang ada di Kota Madiun, Dengan aplikasi ini, publik dapat melakukan pendaftaran ORMAS secara <i>online</i> . Aplikasi ini juga berfungsi untuk mendata ORMAS serta kegiatan ORMAS sehingga kegiatan ORMAS dapat terpantau.	75-100 juta
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Aplikasi Mitigasi Konflik	Sistem peringatan dini untuk mencegah terjadinya konflik di daerah Kota Madiun. Sistem yang dapat menghimpun data laporan kegiatan, kejadian dan kasus yang berhubungan dengan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya serta keamanan, ketentraman dan ketertiban dari seluruh Kecamatan di Kota Madiun, sehingga dengan data tersebut dapat disampaikan informasi mengenai potensi konflik di daerah Kota Madiun kepada masyarakat. Dapat diintegrasikan dengan <i>Website</i> Bangkesbangpol terkait Berita Peringatan Konflik.	75-100 juta
34	Inspektorat Daerah	Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Daerah Kota Madiun (SINAWASDA Kota Madiun)	Aplikasi untuk pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang dimandatkan kepada Inspektorat Kota Madiun. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai media pengolahan data hasil pengawasan untuk memudahkan penyajian informasi	75-100 juta

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
35	Sekretariat DPRD	E –risalah (Sistem Pengelola Rapat)	Sistem informasi yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi terkait bahan materi Rapat, dan juga dapat digunakan sebagai pencatatan hasil rapat sehingga dapat dibaca kembali oleh pihak yang berkepentingan. Disini Seluruh OPD berperan menjadi admin sehingga bahan dan hasil rapat dapat di share kepada orang yang berkepentingan saja melalui email maupun grup media sosial yang digunakan.	75-100 juta
36	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Aplikasi Pemadanan NIK Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID)	Aplikasi Integrasi data NIK Dukcapil dan NIK peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang dapat memadankan dengan cepat ribuan database NIK peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) dengan data NIK dari Dukcapil. Saat ini masih manual di cek satu-satu.	75-100 juta
37	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	E-SIP - Surat Izin Praktek	Sistem Informasi untuk memudahkan pelayanan publik di bidang kesehatan, seperti memberikan rekomendasi perizinan, dan penerbitan sertifikasi.	75-100 juta
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Aplikasi Layanan Publik PUPR	Sistem Informasi untuk memudahkan pelayanan publik PUPR, seperti memberikan rekomendasi penurunan trotoar, rekomendasi kelayakan fungsi bangunan, dsb	101-175 juta
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIMTARUBANG (Sistem Informasi Tata Ruang dan Bangunan)	Sistem Informasi yang digunakan sebagai media konsultasi dan verifikasi terkait perencanaan pembangunan dan tata ruang di Kota Madiun, serta menampilkan pemetaan yang memuat data / informasi perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan bangunan di Kota Madiun Maksud dikembangkannya aplikasi ini adalah dalam rangka penyebarluasan informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kepada masyarakat luas.	75-100 juta

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIBIMA Konstruksi ( <a href="https://sibima.pu.go.id/">https://sibima.pu.go.id/</a> )	Sistem layanan publik yang berfungsi untuk melayani masyarakat jasa konstruksi di seluruh Indonesia dalam rangka capacity building bidang jasa konstruksi. Bentuk layanan publik yg disediakan antara lain: -Layanan informasi jasa konstruksi; -Layanan konsultasi tentang pembinaan jasa konstruksi; -Layanan <i>distance learning</i> SIBIMA Konstruksi.	0
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Sumber Daya Air	Aplikasi yang dapat memetakan Sumber Daya Air (embung, waduk, bendungan, irigasi, dan pos hujan, sungai, sumber air bersih, dan air limbah,dsb) di Kota Madiun dengan berbasis geografis/GIS dan menampilkan data-data yang terkait. Serta memberikan informasi wujud pelestarian sumber daya air.	75-100 juta
42	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman	Sistem informasi yang berfungsi untuk mengelola data Prasarana, Sarana dan Utilitas Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum dan Permukiman di wilayah Kota Madiun yang mencakup data kecamatan, data pengembang, dan data lain yang berkaitan. Selain berisi database dapat juga ditampilkan dalam bentuk infografis agar lebih mudah melihat data secara keseluruhan.	75-100 juta



No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
43	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Aplikasi Identifikasi dan Pengelola Data Pemukiman	Aplikasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi permukiman yang dikategorikan menjadi permukiman kumuh maupun permukiman bersih dan digunakan sebagai pengelolaan data permukiman kumuh menjadi suatu informasi yang informatif. Pada aplikasi ini juga akan ditampilkan pemetaan data permukiman kumuh Kota Madiun berbasis WEBGIS, serta menampilkan informasi terkait pencegahan dan program peningkatan kualitas permukiman kumuh.	75-100 juta
44	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Puskesmas <i>Mobile</i>	Puskesmas dibangun dengan tujuan untuk memudahkan warga atau fakir miskin untuk mendapatkan perlindungan sosial serta lepas dari kemiskinan. Diperlukan Pembuatan Aplikasi Puskesmas berbasis <i>mobile</i> secara mandiri dan terintegrasi dengan Puskesmas Pusat.	75-100 juta
45	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi SIKSDROID	Aplikasi SIKSDROID merupakan aplikasi SIKS-NG dalam versi mobile. Diperlukan pembuatan aplikasi SIKSDROID untuk aplikasi mobile dikarenakan data verifikasi lebih lengkap dan lebih mudah dalam proses verifikasi data di lapangan. Aplikasi ini seperti SIKSDROID dari pusat yang saat ini sudah dinonaktifkan. Diperlukan Pembuatann Aplikasi SIKSDROID secara mandiri dan terintegrasi dengan SIKS-NG milik Pusat.	75-100 juta
46	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi Laporan Kebencanaan dan Penyaluran Bantuan Bencana	Aplikasi Laporan Kebencanaan dan Penyaluran Bantuan Bencana digunakan untuk pendataan korban bencana alam serta informasi penyaluran bantuan bencana.	75-100 juta

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
47	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi Layanan Publik Dinsos P3A	Sistem informasi yang digunakan untuk memudahkan pelayanan publik Dinas Sosial P3A dalam penerbitan surat rekomendasi.	101-175 juta
48	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aplikasi Rehabilitasi Sosial	Aplikasi pendataan dan pelaporan adanya disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar, gelandangan pengemis dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya, serta sebagai proses pelayanan terkait tindakan rehabilitasi sosial seperti saat pemberian bantuan dan pemrosesan dokumen pendukungnya.	75-100 juta
49	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SI ORSOS	Aplikasi yang berfungsi untuk pendaftaran maupun pendaftaran ulang serta untuk pendataan ORSOS/Yayasan beserta kegiatannya.	75-100 juta
50	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Pengembangan SI-CAKER	Aplikasi diperuntukkan untuk pelayanan perselisihan hubungan industrial para pihak (Perusahaan Pengusaha dengan pekerja buruh). Aplikasi ini akan menjadi jembatan guna mendukung saling keterbukaan dalam penyelesaian masalah dan bisa menjadi rujukan untuk proses selanjutnya. Selain itu dapat juga ditambahkan informasi ketenagakerjaan Kota Madiun seperti data UMR, serikat pekerja, dasar hukum yang berlaku).	75-100 juta

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
51	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Pengembangan E-Kami	<p>Pengembangan aplikasi E-Kami dengan menambahkan modul sebagai aplikasi yang berfungsi untuk mengelola segala urusan terkait Koperasi, UMKM dan usaha Mikro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memudahkan proses pendaftaran dan verifikasi Koperasi, UMKM dan usaha Mikro.</li> <li>- Memudah pencatatan aktivitas kegiatan Koperasi, UMKM dan usaha Mikro.</li> <li>- Memudahkan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual produk Koperasi, UMKM dan usaha Mikro.</li> <li>- Memudahkan pengenalan serta pemasaran produk yang dikelola oleh Koperasi, UMKM dan usaha Mikro.</li> <li>- Monitoring dan evaluasi penilaian Koperasi, UMKM dan usaha Mikro.</li> <li>- Informasi pelatihan atau workshop terkait Koperasi, UMKM dan usaha Mikro</li> <li>- Proses perizinan atau penerbitan surat terkait Koperasi, UMKM dan usaha Mikro</li> <li>- Menampilkan data transaksi penjualan produk IKM</li> </ul>	75-100 juta
52	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Sistem Informasi Layanan Produktivitas Terkini (SIPRONI)	<p>Aplikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara cepat kebutuhan peningkatan produktivitas setiap sektor usaha maupun secara individu sehingga dapat mengetahui gambaran kondisi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki</p>	0

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
53	Dinas Pendidikan	Pengembangan Aplikasi LI	Mengembangkan aplikasi LI yang dapat diakses oleh siswa dan guru, serta sebagai aplikasi pengelolaan administrasi sekolah (PAUD,TK,SD, SMP, SMU, SMK, MI, MTs, MA, dll.). Pengelolaan yang dilakukan mulai dari pendataan (siswa, mata pelajaran, jadwal pelajaran, dll.), operasional kegiatan belajar mengajar seperti mengunggah file materi dan tugas serta pengembangan kurikulum sekolah. Aplikasi LI juga perlu dikembangkan agar terintegrasi dengan aplikasi DAPODIK.	75-100 juta
54	Dinas Pendidikan	Aplikasi Manajemen Tenaga Kependidikan	Aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data Tenaga Kependidikan serta memberikan informasi terkait pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan seperti adanya Bimtek, Seminar, Workshop, Sertifikasi, dsb yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi Tenaga Kependidikan. Dengan aplikasi ini dapat diketahui kegiatan pengembangan kompetensi apa saja yang telah diikuti oleh Tenaga Kependidikan, prestasi yang telah diraih, dsb.	75-100 juta
55	Dinas Pendidikan	Sistem Informasi Lembaga Pendidikan Non Formal	Aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan proses pendaftaran akreditasi lembaga pendidikan non formal serta sebagai aplikasi untuk mengelola dan pendataan lembaga pendidikan non formal yang ada di Kota Madiun.	75-100 juta
56	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	SIM IKAN	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola seluruh informasi, data dan pelayanan berkaitan dengan perikanan, seperti Sewa Sarana Prasarana Pasar Ikan, pemrosesan Rekomendasi Pelayanan Kredit Petani Ikan , Pembelian Benih Ikan, pemrosesan Rekomendasi Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan , dan pemrosesan Bantuan Benih Ikan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan ikan.	75-100 juta

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
57	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	SIM TANI	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola seluruh informasi, data dan pelayanan berkaitan dengan pertanian, seperti Permohonan Bantuan Pestisida Pertanian, Surat Pengantar Pencairan Dana BLM PUAP Ke Bank, Rekomendasi Kredit Usaha Tani , Pengajuan Klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Verifikasi dan Validasi Rencana Definitif kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Distribusi Pupuk Bersubsidi , dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pertanian.	75-100 juta
58	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	SIM HEWAN	Aplikasi yang digunakan untuk mengelola seluruh informasi dan data maupun proses pelayanan berkaitan dengan Hewan, seperti Penerbitan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan), pemrosesan Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Tani Ternak pemrosesan dokumen Rekomendasi Kredit Ternak, pemrosesan dokumen Rekomendasi Surat Ijin Praktek Dokter Hewan, Fasilitas Rumah Potong Hewan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan hewan dan kebutuhan ternak.	75-100 juta
59	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Aplikasi Ketahanan dan Kerawanan Pangan	Aplikasi yang berfungsi menginformasikan data panel harga pangan sebagai bagian dari analisis proyeksi ketersediaan dan harga pangan sehingga dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang kuat bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan. Aplikasi ini juga berguna untuk memetakan Ketahanan dan Kerawanan Pangan tingkat Kelurahan Kota Madiun dengan menampilkan geografis wilayah tahan dan rentan rawan pangan dengan dua gradasi warna yaitu merah dan hijau.	75-100 juta

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
60	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Aplikasi Manajemen Kepegawaian Non ASN Internal DKPP	Digunakan untuk memajemen kepegawaian Non ASN internal Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.	75-100 juta
61	Dinas Lingkungan Hidup	Pengembangan Aplikasi SILAPING	<p>"Mengembangkan aplikasi SILAPLING sebagai berikut:</p> <p>#Untuk Pelayanan Pelaporan Lingkungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditambahkan modul formulir untuk pelaporan lingkungan untuk masyarakat umum (tidak hanya perusahaan)</li> <li>- Dikembangkan dengan menambahkan fitur status pelaporan dan tindakan apa yang dilakukan serta progress pelaksanaannya.</li> <li>- Dikembangkan dengan menambahkan page yang dapat diakses masyarakat secara publik (tidak perlu login) untuk melihat informasi dan data terkait pelaporan yang sudah ditindaklanjuti.</li> </ul> <p>#Penambahan Modul Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan informasi dan pemesanan pasokan bibit tanaman yang dapat digunakan oleh masyarakat serta memantau perkembangan penanaman pohon yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan pemberdayaan masyarakat menuju kelurahan bersih dan lestari.</li> <li>- Seluruh pelayanan surat persetujuan dan rekomendasi terkait lingkungan dapat diurus menggunakan aplikasi SILAPLING"</li> <li>- Seluruh pelayanan surat persetujuan dan rekomendasi terkait lingkungan dapat diurus menggunakan aplikasi SILAPLING</li> </ul>	75-100 juta

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
62	Dinas Lingkungan Hidup	Aplikasi Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	<p># Aplikasi layanan pengelolaan sampah dan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga hingga ke TPST pemerintah secara lengkap, meliputi seluruh penggiat pengelola sampah, yaitu tukang sampah, usaha daur ulang hingga akademik maupun aktivis persampahan, pengangkutan sampah di jalan jalan protokol dan pedestrian, pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke tempat pemrosesan akhir, pengangkutan sampah dari tempat sampah pemilah dan tempat pembuangan sampah liar sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses berbagai informasi terkait pengangkutan dan pengelolaan sampah.</p> <p># Aplikasi ini juga berfungsi untuk memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah secara online.</p> <p># Aplikasi ini dilengkapi GPS Tracking yang memungkinkan proses pengangkutan dan pembuangan limbah B3 akan secara realtime dapat terpantau keberadaannya sampai ke lokasi pembuangan akhir.</p>	75-100 juta
63	Dinas Lingkungan Hidup	Pengembangan Website DLH	Mengembangkan website DLH dengan menambahkan modul yang berisikan informasi terkait Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	0

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
64	Dinas Perhubungan	Aplikasi E-Hub	<p>Aplikasi pelayanan perizinan/pemberian rekomendasi dari Dinas Perhubungan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi penyelenggaraan perlengkapan jalan, bangunan dan/atau fasilitas selain perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan</li> <li>- Rekomendasi izin penggunaan badan dan bahu jalan selain untuk kepentingan lalu lintas</li> <li>- Rekomendasi izin dan pendirian badan usaha / Lembaga pendidikan dan latihan mengemudi dsb</li> <li>- Menampilkan infografis terkait data kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap harinya melalui integrasi data dengan kepolisian, serta memberikan informasi kondisi lalu lintas secara real time</li> </ul>	75-100 juta
65	Dinas Perhubungan	Sistem Informasi Pelayanan Angkutan Umum dan Pelajar	<p>Aplikasi untuk pendataan angkutan umum (untuk umum maupun angkutan pelajar) dan urusan terkait ruang fasilitas angkutan umum (terminal dan halte) di Kota Madiun. Memberikan informasi operasional (jadwal dan lintasan trayek), serta posisi angkutan secara <i>real time</i> menggunakan GPS.</p>	101-175 juta
66	Dinas Perhubungan	Pengembangan E-Kir	<p>Penambahan Fitur untuk Upload berkas persyaratan Uji Kir</p>	0
67	Dinas Komunikasi dan Informatika	Satu Data Kota Madiun	<p>Aplikasi untuk mengolah dan mempublikasikan data-data pemerintahan agar seluruh data dapat terpusat ke dalam satu platform</p>	101-175 juta



No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
68	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi Manajemen Aplikasi	Aplikasi yang berfungsi untuk mendata dan menampilkan seluruh aplikasi yang dimiliki oleh seluruh OPD di Kota Madiun untuk memudahkan dalam pencatatan perkembangan aplikasi seperti perubahan aplikasi, status pengembangan aplikasi, permasalahan aplikasi, integrasi aplikasi, dsb.	75-100 juta
69	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi SDM TIK Kota Madiun	Aplikasi mengelola data dan pengembangan sumber daya TIK di pemerintahan Kota Madiun. Pada aplikasi ini juga dilakukan monitoring terhadap kinerja SDM TIK mengenai pengembangan aplikasi, pelaksanaan manajemen dan keamanan TIK, dsb.	75-100 juta
70	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan WEBGIS DPMPTSP	Aplikasi berbasis Web GIS yang memberikan informasi terkait peta persebaran perizinan terbit per lokasi. Pengembangan dilakukan dengan penyempurnaan peta zonasi	0
71	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengembangan MASS Madiun	Pengembangan MASS Madiun dengan penambahan modul terkait <i>Chatbot</i> sebagai media berkomunikasi dengan <i>public</i>	0

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
72	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Aplikasi Pelayanan Publik Disbudparpora (E- Disbudpora)	<p>Membuat aplikasi yang mencakup seluruh informasi publik dan pelayanan publik Disbudparpora</p> <p># Menampilkan daftar Pariwisata, Kebudayaan, Kesenian, Sejarah, Museum, dan Cagar Budaya yang dimiliki Kota Madiun beserta informasinya beserta persebarannya dalam bentuk Web GIS</p> <p># Mengakomodir pelayanan manual menjadi online, diantaranya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sewa Tempat Rekreasi dan Olahraga (menampilkan jadwal yang tersedia dan sekaligus transaksi secara online)</li> <li>- Registrasi Nomor Induk Kesenian</li> <li>- Perpanjangan Nomor Induk Kesenian</li> <li>- Perizinan Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian</li> <li>- Penerbitan Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri</li> <li>- Penerbitan Nomor Registrasi Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat</li> <li>- Perizinan Membawa Cagar Budaya Keluar Kota Dalam Satu Provinsi</li> <li>- Pemberian Perizinan Usaha Perfilman Di Bidang Pembuatan Film, Penedaran Film, Penjualan Film, Penyewaan Film (VCD,DVD), Pertunjukan Film Keliling, Penayangan Film Melalui Media Elektronik dan Tempat Hiburan</li> <li>- Perizinan usaha Terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing</li> </ul>	101-175 juta

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
73	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Sistem Informasi Kepemudaan Kota Madiun	Sistem informasi untuk mendata data kepemudaan dari bermacam aspek untuk kepentingan data daerah dan BPS. Berfungsi juga untuk memfasilitasi Wirausaha Muda, atlet dan pemuda yang berprestasi lainnya, serta memberikan informasi terkait adanya pelatihan dan pendampingan.	75-100 juta
74	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan iMadiun	iMadiun merupakan aplikasi Perpustakaan Digital iMadiun. Pengembangan dilakukan dengan Integrasi data NIK dengan iMadiun untuk memeriksa keabsahan user. Dikembangkan juga untuk mendata pustakawan dan perpustakaan yang ada di Kota Madiun serta sebagai media untuk menyampaikan informasi terkait pelatihan dan pembinaan pustakawan	0
75	Dinas Perdagangan	Pengembangan BUMU	Bumu adalah sebuah aplikasi pencatatan buku tamu. Seluruh OPD di Kota Madiun dapat turut menggunakan aplikasi ini agar pencatatan tamu tidak secara manual.	0
76	Dinas Perdagangan	Ina Export	Pelaku ekspor dapat menggunakan aplikasi ini untuk mempromosikan produk-produk unggulan mereka. - Menciptakan ekosistem dagang yang kondusif karena pengguna diverifikasi terlebih dahulu oleh Kemendag saat mendaftar sebagai anggota. - Menyediakan fasilitas etalase virtual sehingga pelaku usaha ekspor dapat menampilkan produk unggulan mereka, lengkap dengan informasi dan spesifikasinya untuk membantu buyer memilih produk.	0

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki media komunikasi langsung daring berbasis fitur <i>chat</i> yang membantu mempercepat terjadinya kontak antara pelaku usaha ekspor dengan buyer potensial.</li> <li>- Menyediakan fitur inquiry dan rencana kegiatan penjajakan kesepakatan bisnis(business matching)yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk aktif mencari peluang ekspor. Aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai sarana berpromosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara digital.</li> </ul>	
77	Dinas Perdagangan	SIM PASAR	Pembelian barang di pasar bisa melalui expedisi (marketplace khusus untuk pasar); Pengelolaan penghimpunan/ pendataan informasi terkait pengelolaan pasar (kelas, retribusi, jenis bangunan);	101-175 juta
78	Dinas Perdagangan	SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok)	Aplikasi pendataan dan pemantauan pasar dan Harga serta stok/pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting)	0
79	Dinas Perdagangan	Aplikasi Perlindungan Konsumen	Aplikasi yang berfungsi sebagai pelaporan kasus sengketa konsumen dan proses penyelesaiannya. Aplikasi ini juga berfungsi untuk pendaftaran, pendataan dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat	75-100 juta
80	Dinas Perdagangan	SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi Legal)	Aplikasi yang berfungsi untuk pelaporan dan pengawasan ukuran, takaran, dan timbangan dalam bertransaksi perdagangan sehingga membantu meminimalisir kerugian yang diterima bagi konsumen dan pelaku usaha.	0

No	Nama OPD	Aplikasi pendukung Usulan	Deskripsi	Rentang Harga
81	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	SISKAMLING (Sistem Informasi Keamanan dan Ketertiban Lingkungan)	pengecekan alat pemadam kebakaran - aplikasi pelaporan dan pendataan terkait alat pemadam tabung ringan	75-100 juta
82	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	pengembangan SIM SATPOL PP	SIM SATPOL PP dikembangkan dengan menampilkan data rekapitulasi penanganan ringan seperti ODGJ, kebakaran yang bisa dilihat masyarakat	0
83	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	E-Aset	Digunakan untuk manajemen aset dan pengajuan pemeliharaan barang RSUD Kota Madiun	75-100 juta
84	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	E-Belanja BLUD	Digunakan manajemen dan pencatatan belanja keuangan	75-100 juta
85	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	<i>Telemedicine</i> RSUD Kota Madiun	Aplikasi yang digunakan untuk pelayanan konsultasi atau pemeriksaan pasien secara <i>online</i> pada RSUD Kota Madiun. Aplikasi ini juga digunakan menyajikan informasi terkait ketersediaan fasilitas rumah sakit, seperti kamar inap, ICU, UGD, ambulance di Rumah Sakit untuk masyarakat	75-100 juta
86	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	E- Monas (Mortalitas dan Natalitas)	Untuk pencatatan kematian dan kelahiran secara real time dan terintegrasi dengan data kependudukan	75-100 juta
87	Kecamatan Manguharjo	Aplikasi Mall Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan pelayanan dari Kecamatan dan Kelurahan agar masyarakat tidak lagi datang langsung ke kantor untuk urusan administrasi surat-menyurat. Setelah aplikasi ini berhasil diimplementasikan di Kecamatan Manguharjo, maka selanjutnya dapat juga diimplementasikan kepada seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun.	101-175 juta

#### 4.5 Rencana Anggaran Arsitektur Infrastruktur

Rencana dan anggaran infrastruktur SPBE disesuaikan dengan kebutuhan dari hasil analisis dan hasil usulan yang ada. Re

ncana dan anggaran terbagi menjadi anggaran pengadaan server dan pelengkap serta anggaran untuk pengadaan hardware. Lebih jelasnya dapat dilihat pada sub bab di bawah ini.

##### 4.5.1 Anggaran Server dan Pelengkap

Anggaran server didasarkan pada kebutuhan server yang ada di Pemerintah Kota Madiun untuk 5 tahun kedepan, Tabel Rencana Anggaran pengadaan Server, *firewall* dan perangkat pelengkap, menjelaskan rencana anggaran untuk pengadaan server, *firewall*, dan perangkat pendukung.

Tabel Rencana Anggaran pengadaan Server, *firewall* dan perangkat pelengkap

	Usulan	Spesifikasi	Harga per Usulan
1	DED Ruang Server	Melakukan perancangan DED Ruang Server yang bertujuan untuk mengetahui Bluprint Ruang server dan aspek yang sesuai dengan TIA 942 dan SNI Pusat Data	<b>Rp 185.000.000</b>
2	Manajemen dan Tatakelola Ruang Server	Menerapkan Manajemen dan Tatakelola pada Ruang Server yang saat ini telah digunakan dan memastikan sudah didukung dengan SOP Ruang Server yang telah sesuai	<b>Rp 200.000.000</b>
3	Pengadaan Perangkat Penyimpanan (NAS/SAN)	Melakukan Pengadaan Perangkat Keras Storage / Penyimpanan sebagai bentuk penerapan teknologi penyimpanan yang terbaru dan mempermudah akses melalui jaringan	<b>Rp 200.000.000</b>
4	Pengadaan Perangkat Keamanan ( <i>Firewall Server</i> )	Melakukan Pengadaan terkait perangkat Firewall untuk kebutuhan keamanan akses ke Server. Dengan spesifikasi CISCO CATALYST WS-C2960X-48TS-L	<b>Rp 73.439.400</b>
5	Melakukan Re-sertifikasi Penerapan Standar Keamanan ISO 27001:2021 pada Ruang Server ( <i>Data Center</i> ) Dinas Komunikasi	Melakukan Re-sertifikasi ISO 27001:2021	<b>Rp 100.000.000</b>

	Usulan	Spesifikasi	Harga per Usulan
	dan Informatika		
6	Melakukan Penerapan Standart Keamanan ISO 27001:2022 pada Ruang Server ( <i>Data Center</i> ) Dinas Komunikasi dan Informatika	Penerapan Standart ISO27001:2022 Dipergunakan untuk meningkatkan keamanan informasi Ruang Server Dinas Komunikasi dan Informatika	<b>Rp 200.000.000</b>

#### 4.5.2 Anggaran Hardware

Anggaran hardware merupakan kebutuhan perangkat yang digunakan yang terdiri atas rencana anggaran untuk pengadaan *printer*, PC, Laptop, Monitor, dan *Printer* dengan berbagai tipe. Kisaran anggaran ini didapatkan dari perbandingan e-katalog dan juga dari web resmi *brand* tersebut untuk harga dari perangkat hardware. Kisaran anggaran dapat dilihat pada Tabel Anggaran Kebutuhan *Hardware*.

Tabel Anggaran Kebutuhan Hardware

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
<b>PC</b>			
1	PC DESKTOP HP PAVILION TP01-0101D	"Type : PC HP SLIM Operating System : WIN 10 HOME Processor : Intel Core i7-9700F PROCESSOR (3.00 - 4.70 GHz, 12MB Cache) Memory (RAM) : 8GB DDR4 Graphics : NVIDIA GeForce GTX1660 Hard Drives : 256GB PCIe SSD + 2TB 7200rpm HDD Optical Drive : INTEGRATED Audio : HD AUDIO Networking : LAN + Wifi + Bluetooth I/O Connector : Front : 2 X USB 3.1 Gen1 Type A 1 X Front Combo Audio Jack Type : PC HP SLIM Operating System : WIN 10 HOME Processor : Intel Core i7-9700F PROCESSOR (3.00 - 4.70 GHz, 12MB Cache) Memory (RAM) : 8GB DDR4 Graphics : NVIDIA GeForce GTX1660 Hard Drives : 256GB PCIe SSD + 2TB 7200rpm HDD Optical Drive : INTEGRATED Audio : HD AUDIO Networking : LAN + Wifi + Bluetooth I/O	Rp18.455.000,00

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
		Connector : Front : 2 X USB 3.1 Gen1 Type A 1 X Front Combo Audio Jack"	
<b>Laptop</b>			
2	"ASUS A409FJ-EK751T "	"ASUS A409FJ-EK751T Processor Intel® Core™ i7-8565U 1.8 GHz Memory 4GB (onboard) + 4GB (DRAM DDR4) Hard Disk Storage PCIEG3x2 NVME 512GB M.2 SSD Display Size 14.0' Graphic NVIDIA® GeForce® MX230 Resolution 1920x1080 Optical Drive - Operating System Windows 10 Dimension (W x D x H) 32.5(W) x 21.6(D) x 2.29 (H) cm Est. Weight 1.65 KG Warranty 2 Year I/O Port "1x USB 3.1 Gen 1 Type A 1x USB 3.1 Gen1 Type-C " Audio - Camera VGA Web Camera (Fixed type) Interface - Wifi 802.11ac Bluetooth Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1 Power 32WHrs, 2S1P Battery 2-cell Li-ion"	Rp13.464.000
<b>Printer</b>			
3	Printer Inject All EPSON SC-T3130N	"Ink: Pigment Ink Function: Print Only Speed: CAD (A1) 34 detik Resolution: 2400 x 1200 dpi Max Print Size: A1/ 24" Power Consumption (Working /Sleep) : 28W / 1.6W Warranty: 3 Tahun Others: Wi-Fi & Wi-Fi Direct Built in LCD Panel Tinta Tahan Air & Hemat Listrik A4 cutsheet Tanpa kaki (No Stand) 2 inch paper core Garansi nasional = 3 Tahun Minimum ink droplet 3.5 pl Printhead PrecisionCore™ menggunakan elemen piezo. Kualitas gambar maksimal Type Tinta T40B Bk-C-M-Y Printer T-series mendukung standar keamanan berikut: – IEEE802.1X: LAN Standard – SNMPv3: Manajemen Perangkat Jaringan – Standar Enkripsi: TLS / SSL. HTTPs, IPsec menggunakan perangkat lunak : – Dasbor Epson Edge – Manajer Pengaturan EpsonNet – Admin Perangkat Epson"	Rp18.309.357
4	Printer Laser Colour Brother MFC-L3750CDW Print Scan Copy Fax Wireless	- Up to 24 pages per minute print speed - Automatic 2-sided print - 9.3cm color touchscreen - Wired and wireless network - 50 sheet Auto Document Feeder	Rp8.400.000



No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
		- Inbox toners - Bk: 1,000 pages, CMY: 1,000 pages	
5	Printer Dot Matrix Epson LX310	- Spesifikasi: high speed printing, cost effective - Print method: Impact dot matrix - number of pins: 9 pins - Operating system: Microsoft, Windows 2000/ XP/ Vista/ 7/8/8.1/10 - Memory buffer: 128 KB - Power consumption: Approx 27 W	Rp6.867.000
6	Printer Thermal EPSON TM-T82X TMT82X TMT 82X PORT USB / SERIAL - USB	- Printer Kasir Cetak Struk Thermal ( 80 mm ) - Koneksi Port USB / SERIAL / LAN ( Pilih Salah Satu ) - Port Cash Drawer RJ-11 - Print Speed 200mm/s - AUTO CUTTER - Garansi Pasti Resmi Epson 1 Tahun	Rp2.677.500
<b>LED TV</b>			
7	LED TV 32 Inch	•LED TV 32" •Digital TV DVB-T2, EWS •2HDMI input •YUV component input •USB input (Movie, MP3, Jpeg) •AV input •Audio output •SPDIF output (optical) •3D Picture Noise Reduction •8 Picture mode •Screen Standby Mode •Eco mode	Rp6.775.000
8	TV LED 50 INCH SAMSUNG 50AU9000 UHD 4K SMART TV 2021	- Screen size : 50 inch - Resolution : 4K UHD (3,840 x 2,160) - HDR 10+ : Yes - Object Tracking Sound : OTS Lite - Dolby Digital Plus : Yes - HDMI : 3 - USB : 2 - Audio Out : Optical - Sistem operasi : TIZEN OS - Aplikasi yang tersedia : YouTube, Netflix, Browser Web	Rp9.009.000
<b>Scanner</b>			
9	Scanner Plustek SmartOffice PS3140U - 40	- Kecepatan Scan: 40 lembar/menit (A4, GrayScale, 300 dpi), 30 lembar/menit (Color mode, 300 dpi, A4 Portrait) - Resolusi & Sensor: 600 dpi, CIS X2 (duplex)	Rp10.489.500

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
	Lembar/menit (F4/Folio)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas Kertas: 100 lembar</li> <li>- Uk. Kertas: Kartu Nama, KTP, A5, A4, Folio (F4), Legal, Letter</li> <li>- Batas Ideal Penggunaan: 4.000 Lembar/hari</li> <li>- Estimasi Umur: 100.000 lbr. (Pad), 300.000 lbr. (Roller)</li> <li>- Tombol Scan: 3 tombol</li> <li>- Interface &amp; Power: USB 2.0 x 1, USB 2.0 (Host) x 1 &amp; 24Vdc/1.25 A</li> <li>- Operating System: Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11. Mac OS 10.12.x - 12.x</li> </ul>	
<b>Perangkat Hardware Lainnya</b>			
10	Water Purifier Advance Reverse Osmosis Allegro C1 - Al C1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas Air Normal 4.2 liter</li> <li>- Kapasitas Air Panas 1.5 liter</li> <li>- Filter Plus Sediment Filter, Pre Carbon Filter, RO Membrane Filter, Inno Sense Filter</li> <li>- Voltage 220 V</li> <li>- Power 360W</li> <li>- Frequency 50 Hz</li> </ul>	Rp10.497.900
11	CPU SERVER	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Base : PowerEdge T40 Server</li> <li>- Chassis : 3.5inch Chassis up to 3 Cabled Hard Drives</li> <li>- Installed Processor : (1x) Intel Xeon E-2224G 3.5GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (71W)</li> <li>- Installed Memory : 16GB (2x8GB) ECC UDIMM 2666 MT/s</li> <li>- Max. Memory : Up to 64GB (4 DIMM Slots)</li> <li>- Internal Storage Controllers : Intel® VROC (Virtual RAID on CPU) software RAID</li> <li>- Drive Bays : Up to three 3.5 -inch cabled SATA drives</li> <li>- Installed Hard Drives : 1TB 7.2K Entry SATA 3.5in Cabled Hard Drive + 512GB SSD SATA 6Gbps 2.5in Cabled Hard Drive - Third Party Hardware*</li> <li>- Network : 1x1GbE port, LOM (LAN on Motherboard)</li> </ul>	Rp16.170.000

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installed Operating System : None</li> <li>- Supported Operating System : Microsoft Windows Server 2016 / 2019; Ubuntu Server 18.04 LTS; for</li> <li>- further information please visit on Dell.com/OSsupport</li> <li>- Internal Optical Drive : DVD+/-RW, SATA, Internal</li> <li>- Power Supply : Single, Cabled Power Supply, 300W</li> <li>- Accessories : Keyboard and Optical Mouse, USB; Power Cord</li> <li>- - Warranty : 3Yr Next Business Day Service</li> </ul>	
12	LCD PROJECTOR ACER BS-020P SVGA	LCD Projector ACER BS-020P SVGA - ACER Proyektor BS 020 P SVGA + PROJECTOR SCREEN 70" x 70"	Rp11.150.000
13	UPS APC EASY UPS BVX 1200VA 650W BVX1200LI-MS	<p>Technical Specifications :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max Configurable Power (Watts) : 650 Watts / 1.2kVA</li> <li>- Output Frequency (sync to mains) : 50/60 Hz +/- 1 Hz Sync to mains</li> <li>- Topology : Line interactive</li> <li>- Waveform type : Stepped approximation to a sine wave</li> <li>- Transfer Time : 6 ms typical : 10 ms maximum</li> <li>- Input frequency : 50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing</li> <li>- Input voltage range for main operations : 140 - 300 (230 V) VAC</li> <li>- Input Power Factor at Full Load : 0.51</li> <li>- Battery type : Lead-acid battery</li> <li>- Typical recharge time : 8 hour(s)</li> <li>- Nominal Battery Voltage : 12V</li> <li>- Expected Battery Life (years) : 1 – 2</li> <li>- Battery Volt-Amp-Hour Capacity : 108</li> <li>- Control panel : LED Status display with on line : on battery</li> <li>- Audible Alarm : Alarm when on battery : distinctive low battery alarm</li> <li>- Surge energy rating : 273 Joules</li> <li>- Physical Maximum (Height x Width x Depth) : 190MM x 140MM x 390MM</li> <li>- Physical Shipping (Height x Width x Depth) : 297MM x 235MM x 495MM</li> <li>- Physical Net Weight : 7.5KG</li> <li>- Physical Shipping Weight : 8.5KG</li> <li>- Protection Class : IP20</li> <li>- Operating Temperature : 0 - 40 °C</li> <li>- Standard warranty : 2 years repair or replace .</li> </ul>	Rp2.214.000

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
14	PANASONIC PESAWAT TELEPON - KX T7665	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Wire Non-polarity Digital Phone • 1 Line 16-Characters LCD Display • 8 CO / Programmable Keys with Red/Green LED</li> <li>• Extra Device Port • Half-duplex Speakerphone • Message Waiting / Ringing Light Speaker, Handset &amp; Ringer Volume Control. • Last Number Redial Key • Hold &amp; Transfer Keys</li> </ul>	Rp1.165.000
15	Schneider Electric PIENO 1 Gang Stop Kontak TV Soket	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wiring device mounting : Flush, Surface</li> <li>- average impedance : 75 Ohm</li> <li>- material : Polycarbonate grid plate, Polycarbonate surround</li> <li>- bandwidth : 5...860 Hz TV</li> <li>- connections terminals : IEC connection, Clamp terminal</li> <li>- width : 87 mm</li> <li>- height : 87 mm</li> <li>- depth : 27 mm</li> </ul>	Rp123.795
16	Samsung Monitor LED	AS-600	Rp2.371.000
17	Onesia Kiosk Mesin Antrian SQ-A	Mesin Antrian (Queue Machine), Digital Kiosk, Display Size 19 inch, IR Touch Screen, RAM 4GB, Storage 128GB SSD, Resolution Full HD, Windows Brightness nits, Dilengkapi dengan Printer (Cetak Kertas) Additional : Software Mesin Antrian (Windows)	Rp40.000.000
18	Polytron Speaker Portable Bluetooth Karaoke 12 INCH PTS 12KF25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Double Woofer 12 inch - Dual Power (AC &amp; Battery) - 5-Band User Equalizer + Preset EQ - Bluetooth Connection + Polytron Audio Connect - USB, SD Card/MMC, Aux, Line Input, 1 Mic Input, Keyboard &amp; Guitar Input, 2 Wireless Mic - FM Radio - Power Output: 85 WRMS - TIPE : PTS 2K25 /-FM - POWER INPUT MAIN UNIT - POWER SOURCE : 220V~ 50/60Hz - POWER INPUT MAIN UNIT - POWER CONSUMPTION : 40 W</li> </ul>	Rp3.375.000
19	Cartridge, Pigment Ink	P4000d Pigment Ink Black Cartridge, Black, Pigment Ink - fill level 78 ml	Rp5.644.350

No	Nama Perangkat	Spesifikasi	Kisaran Harga
20	Mesin Fotocopy Canon IR Advance	Mesin Fotocopy Canon IR Advance 6275 Recond Import (220v)	Rp29.398.950
21	HPF Webcam	Digital Noise Reduction: 2D, 3D DNR; Lens: FOV 90 degree; White Balance: Auto, Manual, VAR	Rp6.050.000
22	Goldwin Headset	Goldwin Headset Microphone GWHDSTMCP 200	Rp490.000

#### 4.6 Rencana Anggaran Arsitektur Keamanan SPBE

Rencana anggaran Keamanan SPBE disesuaikan dengan kebutuhan dari hasil analisis telah dilakukan. Informasi kisaran anggaran didapatkan dari beberapa perbandingan *e-commerce*. Penyusunan kebijakan ini menjadi satu kesatuan dengan pengadaan SOP pendukungnya. Kisaran rencana anggaran ini didapatkan dari *benchmark* beberapa vendor penyedia jasa konsultasi IT. Kisaran anggaran dapat dilihat pada Tabel Rencana Anggaran Keamanan SPBE.

Tabel Rencana Anggaran Keamanan SPBE

No	Perangkat	Spesifikasi	Harga per perangkat atau per paket
1	Kebijakan Keamanan Informasi	Konsultan Keamanan Informasi	Rp. 200.000.000
2	Pelatihan dan Pembekalan tentang Keamanan	Pelatihan atau pembekalan untuk SDM dalam rangka meningkatkan Keamanan SPBE	Rp. 50.000.000 s/d Rp. 150.000.000

#### 4.7 Rencana Anggaran Audit TIK

Rencana anggaran audit TIK pada sub bab ini didapatkan dari *benchmark* beberapa vendor penyedia jasa konsultasi IT. Kisaran anggaran dapat dilihat pada Tabel Rencana Anggaran Audit TIK.

Tabel Rencana Anggaran Audit TIK

<b>Audit TIK</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Kisaran Anggaran</b>
Audit Infrastruktur SPBE	Audit Server	200 – 250 jt
	Audit Jaringan	200 – 250 jt
Audit Aplikasi SPBE	Audit Aplikasi Khusus	200 – 250 jt
Audit Keamanan SPBE	Audit Keamanan Infrastruktur	200 – 250 jt
	Audit Keamanan Aplikasi Khusus	200 – 250 jt

#### 4.8 Rencana Anggaran Peta Rencana Perangkat Daerah (PD)

Rencana dan anggaran masing-masing PD disesuaikan dengan kebutuhan dari hasil analisis telah dilakukan . Rencana dan anggaran terbagi menjadi anggaran pembangunan aplikasi, pengadaan perangkat keras, jaringan intra pemerintah, audit TIK, pengadaan SDM, training, dan sertifikasi. Penjabaran lebih detail pada Lampiran Rencana Anggaran PD.

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
1	Bagian Organisasi	Pembangunan Aplikasi	Rp100,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp.100,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp.58.113.642	Rp.46.696.642	Rp.33.976.000	Rp.11.417.000	Rp.11.417.000	Rp.161.620.284
		Pengadaan SDM (Service/Help Desk, Operator/User Sistem, Teknisi Komputer)	Rp.4.147.070	Rp.6.900.354	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.11.047.424
		Training	Rp799.000	Rp279.000	Rp.0	Rp5.692.134	Rp.0	Rp.6.770.134
		Sertifikasi	Rp0	Rp9.258.634	Rp0	Rp.5.692.134	Rp0	Rp.14.950.768
		Jumlah						
2	Bagian Hukum	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp100,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp100,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp70,112,642	Rp56,674,642	Rp22,834,000	Rp22,834,000	Rp11,417,000	Rp183,872,284

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
		Pengadaan SDM (Service/Help Desk dan Teknisi Komputer)	Rp.0	Rp.0	Rp7.195.082	Rp.0	Rp.0	Rp7.195.082
		Training	Rp799.000	Rp.0	Rp279.000	Rp5.692.134	Rp.0	Rp.6.770.134
		Sertifikasi	Rp0	Rp0	Rp9.258.634	Rp.5.692.134	Rp0	Rp.14.950.768
Jumlah								<b>Rp.312.788.268</b>
3	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0
		Pengadaan SDM (Teknisi Komputer)	Rp3,048,012	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp3,048,012
		Training	Rp279.000	Rp799.000	Rp.0	Rp5.692.134	Rp.0	Rp.6.770.134
		Sertifikasi	Rp9.258.634	Rp0	Rp0	Rp.5.692.134	Rp0	Rp.14.950.768
Jumlah								<b>Rp.24.768.914</b>
4	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp100,000,000	Rp0	Rp0	Rp100,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp81,529,642	Rp69,530,642	Rp69,530,642	Rp22,834,000	Rp22,834,000	Rp266,258,926
		Pengadaan SDM (Service/Help Desk dan Admin Website)	Rp.0	Rp.0	Rp7.168.399	Rp.0	Rp.0	Rp7.168.399



Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
		<i>Training</i>	Rp.0	Rp5.692.134	Rp279.000	Rp799.000	Rp.0	Rp.6.770.134
		Sertifikasi	Rp0	Rp.5.692.134	Rp9.258.634	Rp0	Rp0	Rp.14.950.768
Jumlah								<b>Rp. 395.148.227</b>
5	Bagian Umum	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp100,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp.100,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp.315.594.852	Rp.303.954.531	Rp.303.954.531	Rp.291.955.531	Rp.280.538.531	Rp. 1.495.997.976
		Pengadaan SDM (Service/Help Desk, Operator/User Sistem, Teknisi Komputer)	Rp.4.147.070	Rp.6.069.341	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.10.216.411
		<i>Training</i>	Rp.0	Rp279.000	Rp5.692.134	Rp799.000	Rp.0	Rp.6.770.134
		Sertifikasi	Rp0	Rp9.258.634	Rp.5.692.134	Rp0	Rp0	Rp.14.950.768
		Jumlah						
6	Bagian Pemerintahan	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp0	Rp0	Rp200,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp70,335,963	Rp46,696,642	Rp46,696,642	Rp11,999,000	Rp11,999,000	Rp187,727,247
		Pengadaan SDM (Service/Help Desk, Operator/User Sistem, Teknisi Komputer, Admin Website)	Rp.7.999.412	Rp.3.048.012	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.11.047.424

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
		<i>Training</i>	Rp279.000	Rp.0	Rp5.692.134	Rp799.000	Rp.0	Rp.6.770.134
		Sertifikasi	Rp9.258.634	Rp.0	Rp.5.692.134	Rp0	Rp.0	Rp.14.950.768
Jumlah								<b>Rp. 420.495.573</b>
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp100,000,000	Rp0	Rp100,000,000	Rp0	Rp200,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC <i>Desktop Laptop Printer</i> )	Rp45,616,321	Rp35,056,321	Rp35,056,321	Rp23,416,000	Rp11,417,000	Rp150,561,963
		Pengadaan SDM	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0
		<i>Training</i>	Rp6.770.134	Rp11.669.769	Rp109.042.800	Rp.0	Rp23.412.800	Rp. 150.895.503
		Sertifikasi	Rp14.950.768	Rp14.808.390	Rp59.512.380	Rp16.636.450	Rp.0	Rp.105.907.988
Jumlah								<b>Rp. 607.365.454</b>
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pembangunan Aplikasi	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp200,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC <i>Desktop Laptop Printer</i> )	Rp140,448,605	Rp115,370,284	Rp104,810,284	Rp81,394,284	Rp81,394,284	Rp523,417,741
		Pengadaan SDM ( <i>Programmer, Teknisi Komputer, Admin Website, Service/Help Desk, Teknisi dan Admin Jaringan, Analis Sistem dan Desain, Admin Keamanan TI</i> )	Rp.10.874.022	Rp.10.283.851	Rp.16.158.207	Rp.0	Rp.0	Rp.34.268.068

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
		<i>Training</i>	Rp10.889.134	Rp7.776.612	Rp21.708.000	Rp109.042.800	Rp23.412.800	Rp. 172.829.346
		Sertifikasi	Rp76.431.264	Rp24.067.024	Rp22.929.000	Rp2.150.000	Rp16.636.450	Rp. 142.213.738
Jumlah								<b>Rp. 1.072.728.893</b>
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pembangunan Aplikasi	Rp200,000,000	Rp100,000,000	Rp200,000,000	Rp100,000,000	Rp.0	Rp 600,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp222,783,568	Rp199,144,247	Rp187,145,247	Rp187,145,247	Rp187,145,247	Rp983,363,556
		Pengadaan SDM	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0
		<i>Training</i>	Rp27.679.134	Rp12.468.769	Rp109.042.800	Rp4.398.000	Rp23.412.800	Rp. 177.001.503
		Sertifikasi	Rp37.879.768	Rp14.808.390	Rp65.192.830	Rp9.846.300	Rp16.636.450	Rp. 144.363.738
Jumlah								<b>Rp. 1.904.728.797</b>
10	Badan Pendapatan Daerah	Pembangunan Aplikasi	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp34,251,000	Rp21,977,000	Rp11,417,000	Rp11,417,000	Rp11,417,000	Rp90,479,000
		Pengadaan SDM (Programmer, Service/ Help Desk)	Rp.8.951.751	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.8.951.751
		<i>Training</i>	Rp28.199.134	Rp11.669.769	Rp109.042.800	Rp23.412.800	Rp4.677.000	Rp.177.001.503
		Sertifikasi	Rp28.621.134	Rp14.808.390	Rp59.512.380	Rp16.636.450	Rp22.635.384	Rp. 142.213.738
Jumlah								<b>Rp. 418.645.992</b>

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembangunan Aplikasi	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp200,000,000	Rp.0	Rp.0	Rp400,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0
		Pengadaan SDM (Admin Keamanan TI, Teknisi Komputer, Admin Website, Admin Database, Service/ Help Desk, Teknisi dan Admin Jaringan, Analis Sistem dan Desain)	Rp.16.069.341	Rp.7.235.839	Rp.9.206.219	Rp.0	Rp.0	Rp.32.511.399
		Training	Rp27.810.800	Rp13.007.370	Rp21.987.000	Rp109.042.800	Rp.0	Rp.171.847.970
		Sertifikasi	Rp24.018.334	Rp3.595.750	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.846.300	Rp.47.460.384
Jumlah							<b>Rp.651.819.753</b>	
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembangunan Aplikasi	Rp.0	Rp.0	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp.0	Rp200,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp.10.560.000	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.10.560.000
		Pengadaan SDM (Service/ Help Desk, Operator/ User Sistem, Teknisi Komputer, Admin Website)	Rp.7.999.412	Rp.6.069.341	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.11.047.424

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
		<i>Training</i>	Rp279.000	Rp.0	Rp5.692.134	Rp799.000	Rp.0	Rp.6.770.134
		Sertifikasi	Rp24.018.334	Rp3.595.750	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.846.300	Rp.47.460.384
Jumlah								<b>Rp.275.837.942</b>
13	Inspektorat Daerah	Pembangunan Aplikasi	Rp100,000,000	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp100,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp337,982,210	Rp314,701,568	Rp289,264,568	Rp278,704,568	Rp278,704,568	Rp1,499,357,482
		Pengadaan SDM (Service/Help Desk, Teknisi Komputer, Admin Website)	Rp.4.147.070	Rp.6.069.341	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.10.216.411
		<i>Training</i>	Rp.0	Rp279.000	Rp5.692.134	Rp799.000	Rp.0	Rp.6.770.134
		Sertifikasi	Rp24.018.334	Rp3.595.750	Rp11.500.000	Rp9.000.000	Rp7.846.300	Rp. 55.960.384
		Jumlah						
14	Sekretariat DPRD	Pembangunan Aplikasi	Rp100,000,000	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp100,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp129,119,568	Rp105,033,605	Rp105,033,605	Rp105,033,605	Rp105,033,605	Rp549,253,988
		Pengadaan SDM (Service/Help Desk, Teknisi Komputer, Operator/User Sistem)	Rp.4.147.070	Rp.6.900.354	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.11.047.424

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
		<i>Training</i>	Rp799.000	Rp279.000	Rp.0	Rp5.692.134	Rp.0	Rp.6.770.134
		Sertifikasi	Rp24.018.334	Rp3.595.750	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.846.300	Rp.47.460.384
Jumlah								<b>Rp.714.531.930</b>
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembangunan Aplikasi	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.100,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp 303,731,210	Rp222,061,926	Rp211,501,926	Rp199,502,926	Rp199,502,926	Rp.1,136,300,914
		Pengadaan SDM	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0
		<i>Training</i>	Rp28.478.134	Rp11.669.769	Rp109.042.800	Rp4.398.000	Rp23.412.800	Rp. 177.001.503
		Sertifikasi	Rp24.018.334	Rp3.595.750	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.846.300	Rp.47.460.384
Jumlah								<b>Rp. 1.460.762.801</b>
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Aplikasi	Rp175,000,000	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp.0	Rp.0	Rp375,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp211,948,568	Rp211,948,568	Rp200,531,568	Rp165,116,568	Rp165,116,568	Rp 954,661,840
		Pengadaan SDM (Service/Help Desk, Teknisi Komputer, Operator/User Sistem)	Rp.4.147.070	Rp.6.069.341	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.10.216.411
		<i>Training</i>	Rp.0	Rp279.000	Rp5.692.134	Rp799.000	Rp.0	Rp.6.770.134
		Sertifikasi	Rp24.018.334	Rp3.595.750	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.846.300	Rp.47.460.384
Jumlah								<b>Rp.1.394.108.769</b>

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Aplikasi	Rp100,000,000	Rp.0	Rp100,000,000	Rp.0	Rp.0	Rp200,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp.10.560.000	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.10.560.000
		Pengadaan SDM (Service/Help Desk, Teknisi Komputer, Operator/User Sistem)	Rp.4.147.070	Rp.6.069.341	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.11.047.424
		Training	Rp799.000	Rp279.000	Rp.0	Rp5.692.134	Rp.0	Rp.6.770.134
		Sertifikasi	Rp24.018.334	Rp3.595.750	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.846.300	Rp.47.460.384
		Jumlah						
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan Aplikasi	Rp200,000,000	Rp100,000,000	Rp175,000,000	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp.675,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp139,419,963	Rp139,419,963	Rp127,420,963	Rp127,420,963	Rp115,780,642	Rp.649,462,494
		Pengadaan SDM (Service/Help Desk, Operator/User Sistem)	Rp.7.999.412	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.7.999.412
		Training	Rp5.692.134	Rp799.000	Rp279.000	Rp.0	Rp.0	Rp.6.770.134
		Sertifikasi	Rp24.018.334	Rp3.595.750	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.846.300	Rp.47.460.384
		Jumlah						

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
19	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Pembangunan Aplikasi	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.200,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC <i>Desktop Laptop Printer</i> )	Rp69,530,642	Rp46,114,642	Rp46,114,642	Rp34,697,642	Rp34,697,642	Rp231,155,210
		Pengadaan SDM ( <i>Service/Help Desk, Teknisi Komputer</i> )	Rp.7.195.082	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.7.195.082
		<i>Training</i>	Rp799.000	Rp.0	Rp279.000	Rp5.692.134	Rp.0	Rp.6.770.134
		Sertifikasi	Rp24.018.334	Rp3.595.750	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.846.300	Rp.47.460.384
Jumlah							<b>Rp.492.580.810</b>	
20	Dinas Pendidikan	Pembangunan Aplikasi	Rp.0	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp.0	Rp.300,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC <i>Desktop Laptop Printer</i> )	Rp.10.560.000	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.10.560.000
		Pengadaan SDM ( <i>Programmer, Teknisi Komputer, Admin Database, Service/Help Desk, Teknisi dan Admin Jaringan, Analis Sistem dan Desain, Admin Keamanan TI</i> )	Rp.7.852.693	Rp.7.235.839	Rp.19.206.219	Rp.0	Rp.0	Rp.34.294.751



Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
		<i>Training</i>	Rp10.889.134	Rp7.776.612	Rp21.708.000	Rp109.042.800	Rp23.412.800	Rp.172.829.346
		Sertifikasi	Rp24.018.334	Rp3.595.750	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.846.300	Rp.47.460.384
Jumlah								<b>Rp.565.144.481</b>
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pembangunan Aplikasi	Rp.0	Rp200,000,000	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp.500,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp70,112,642	Rp70,112,642	Rp58,695,642	Rp58,695,642	Rp35,279,642	Rp292,896,210
		Pengadaan SDM (Service/Help Desk, Operator/User Sistem)	Rp.7.999.412	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.7.999.412
		<i>Training</i>	Rp5.692.134	Rp799.000	Rp279.000	Rp.0	Rp.0	Rp.6.770.134
		Sertifikasi	Rp24.018.334	Rp3.595.750	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.846.300	Rp.47.460.384
		Jumlah						
22	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Aplikasi	Rp.0	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp.0	Rp.0	Rp.200,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp151,060,284	Rp151,060,284	Rp138,339,642	Rp127,779,642	Rp127,779,642	Rp696,019,494
		Pengadaan SDM (Service/Help Desk, Teknisi Komputer)	Rp.7.195.082	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.7.195.082
		<i>Training</i>	Rp799.000	Rp.0	Rp279.000	Rp5.692.134	Rp.0	Rp.6.770.134

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
		Sertifikasi	Rp24.018.334	Rp3.595.750	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.846.300	Rp.47.460.384
Jumlah								<b>Rp.957.445.094</b>
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembangunan Aplikasi	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp117,749,963	Rp117,749,963	Rp117,749,963	Rp117,749,963	Rp94,469,321	Rp565,469,173
		Pengadaan SDM (Programmer, Admin Keamanan TI, Operator/User Sistem, Admin Database, Service/Help Desk, Teknisi dan Admin Jaringan, Analisis Sistem dan Desain)	Rp.18.657.023	Rp.7.235.839	Rp.9.206.219	Rp.0	Rp.0	Rp.35.099.081
		Training	Rp10.889.134	Rp23.412.800	Rp7.497.612	Rp21.987.000	Rp109.042.800	Rp.172.829.346
		Sertifikasi	Rp24.018.334	Rp3.595.750	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.846.300	Rp.47.460.384
		Jumlah						
24	Dinas Perhubungan	Pembangunan Aplikasi	Rp.0	Rp.0	Rp100,000,000	Rp175,000,000	Rp.0	Rp275,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp337,707,210	Rp327,147,210	Rp327,147,210	Rp327,147,210	Rp315,506,889	Rp1,634,655,729

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
		Pengadaan SDM (Programmer, Teknisi Komputer, Admin Database, Service/ Help Desk, Teknisi dan Admin Jaringan, Analis Sistem dan Desain, Admin Keamanan TI, Operator/ User Sistem)	Rp. 7.852.693	Rp.7.235.839	Rp.9.206.219	Rp.13.852.342	Rp.0	Rp.38.147.093
		Training	Rp10.889.134	Rp7.776.612	Rp21.708.000	Rp109.042.800	Rp23.412.800	Rp.172.829.346
		Sertifikasi	Rp24.018.334	Rp3.595.750	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.846.300	Rp.47.460.384
Jumlah								<b>Rp.2.168.092.552</b>
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembangunan Aplikasi	Rp.0	Rp275,000,000	Rp100,000,000	Rp.0	Rp.0	Rp375,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp279,146,926	Rp268,586,926	Rp257,169,926	Rp257,169,926	Rp257,169,926	Rp1,319,243,630
		Pengadaan SDM	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0
		Training	Rp27.679.134	Rp12.468.769	Rp109.042.800	Rp4.398.000	Rp23.412.800	Rp.177.001.503
		Sertifikasi	Rp24.018.334	Rp3.595.750	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.846.300	Rp.47.460.384
Jumlah								<b>Rp. 1.918.705.517</b>

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembangunan Aplikasi	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0
		Pengadaan Perangkat Keras (PC <i>Desktop Laptop Printer</i> )	Rp93,169,963	Rp93,169,963	Rp70,112,642	Rp70,112,642	Rp70,112,642	Rp396,677,852
		Pengadaan SDM ( <i>Programmer, Teknisi Komputer, Teknisi dan Admin Jaringan, Analis Sistem dan Desain, Admin Keamanan TI</i> )	Rp.0	Rp.7.852.693	Rp.9.206.219	Rp.10.000.000	Rp.0	Rp.27.058.912
		<i>Training</i>	Rp12.747.769	Rp10.090.134	Rp21.708.000	Rp109.042.800	Rp23.412.800	Rp.177.001.503
		Sertifikasi	Rp24.018.334	Rp3.595.750	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.846.300	Rp.47.460.384
		Jumlah						
27	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Pembangunan Aplikasi	Rp.0	Rp175,000,000	Rp100,000,000	Rp.0	Rp.0	Rp.275,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC <i>Desktop Laptop Printer</i> )	Rp70,112,642	Rp34,558,000	Rp23,998,000	Rp11,999,000	Rp11,999,000	Rp.152,666,642
		Pengadaan SDM ( <i>Service/Help Desk, Teknisi Komputer, Admin Website</i> )	Rp.4.147.070	Rp.6.069.341	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.10.216.411
		<i>Training</i>	Rp.0	Rp279.000	Rp5.692.134	Rp799.000	Rp.0	Rp.6.770.134
		Sertifikasi	Rp.0	Rp9.258.634	Rp.0	Rp5.692.134	Rp.0	Rp.14.950.768
		Jumlah						

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pembangunan Aplikasi	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp82,111,642	Rp82,111,642	Rp57,838,642	Rp47,278,642	Rp47,278,642	Rp316,619,210
		Pengadaan SDM	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0
		Training	Rp5.971.134	Rp799.000	Rp6.231.533	Rp1.158.436	Rp4.279.800	Rp.18.439.903
		Sertifikasi	Rp5.692.134	Rp9.258.634	Rp3.711.920	Rp.6.530.450	Rp.4.566.020	Rp.29.759.158
Jumlah							<b>Rp.364.818.271</b>	
29	Dinas Perdagangan	Pembangunan Aplikasi	Rp.0	Rp.0	Rp175,000,000	Rp100,000,000	Rp.0	Rp275,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp93,528,642	Rp93,528,642	Rp59,277,642	Rp47,637,321	Rp47,637,321	Rp341,609,568
		Pengadaan SDM (Service/Help Desk, Operator/User Sistem, Teknisi Komputer, Admin Website)	Rp.7.999.412	Rp.6.069.341	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.14.068.753
		Training	Rp21.708.000	Rp279.000	Rp.0	Rp5.692.134	Rp799.000	Rp.8.940.934
		Sertifikasi	Rp5.150.000	Rp8.500.000	Rp.9.279.000	Rp9.258.634	Rp5.692.134	Rp.37.879.768
Jumlah							<b>Rp. 677.499.023</b>	
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pembangunan Aplikasi	Rp.0	Rp100,000,000	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp100,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp.45.616.321	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.45.616.321

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
		Pengadaan SDM ( <i>Service/Help Desk</i> , Teknisi Komputer)	Rp.7.195.082	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.7.195.082
		<i>Training</i>	Rp.5.197.000	Rp.23.412.800	Rp.7.138.176	Rp.6.250.134	Rp.40.400.000	Rp.82.398.110
		Sertifikasi	Rp.13.376.750	Rp16.636.450	Rp.14.522.170	Rp.14.950.768	Rp.23.467.000	Rp.82.953.138
Jumlah								<b>Rp. 318.162.651</b>
31	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun	Pembangunan Aplikasi	Rp.0	Rp200,000,000	Rp100,000,000	Rp100,000,000	Rp.0	Rp400,000,000
		Pengadaan Perangkat Keras ( <i>PC Desktop</i> <i>Laptop Printer</i> )	Rp359,970,000	Rp359,970,000	Rp359,970,000	Rp359,970,000	Rp359,970,000	Rp.1.799.850.000
		Pengadaan SDM	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0
		<i>Training</i>	Rp28.609.800	Rp11.669.769	Rp109.042.800	Rp279.000	Rp5.692.134	Rp.155.293.503
		Sertifikasi	Rp24.018.334	Rp3.595.750	Rp3.000.000	Rp9.000.000	Rp7.846.300	Rp.47.460.384
Jumlah								<b>Rp. 2.402.603.887</b>
32	Kecamatan Manguharjo	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat Keras ( <i>PC Desktop</i> <i>Laptop Printer</i> )	Rp46,832,000	Rp46,832,000	Rp34,833,000	Rp34,833,001	Rp34,833,002	Rp198,163,003
		Pengadaan SDM ( <i>Service/Help Desk</i> , <i>Operator/User</i> <i>Sistem</i> )	Rp.7.999.412	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.7.999.412
		<i>Training</i>	Rp27.400.134	Rp1.078.000	Rp11.669.769	Rp109.042.800	Rp27.810.800	Rp. 177.001.503
		Sertifikasi	Rp.0	Rp9.258.634	Rp.0	Rp5.692.134	Rp.0	Rp. 14.950.768
Jumlah								<b>Rp. 398.914.686</b>

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
33	Kecamatan Kartoharjo	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp117,167,963	Rp117,167,963	Rp93,751,963	Rp70,917,963	Rp70,917,963	Rp469,923,815
		Pengadaan SDM (Service/Help Desk, Operator/User Sistem, Teknisi Komputer)	Rp.0	Rp.4.147.070	Rp.6.900.354	Rp.0	Rp.0	Rp.11.047.424
		Training	Rp799.000	Rp11.669.769	Rp279.000	Rp.0	Rp.5.692.134	Rp. 18.439.903
		Sertifikasi	Rp.14.522.170	Rp9.258.634	Rp5.692.134	Rp.0	Rp.22.929.000	Rp. 22.929.000
		Jumlah						
34	Puskesmas Manguharjo	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp165,028,605	Rp165,028,605	Rp141,114,284	Rp130,554,284	Rp118,555,284	Rp720,281,062
		Pengadaan SDM (Service/Help Desk, Operator/User Sistem)	Rp.7.999.412	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.7.999.412
		Training	Rp5.692.134	Rp799.000	Rp11.669.769	Rp4.398.000	Rp279.000	Rp. 22.837.903
		Sertifikasi	22.929.000	Rp5.692.134	Rp.0	Rp9.258.634	Rp.0	Rp. 37.879.768
		Jumlah						

Kode PD	Nama PD	Nama Kegiatan	Kisaran Anggaran					Total Anggaran
			2023	2024	2025	2026	2027	
35	Puskesmas Sukosari	Pembangunan Aplikasi	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
		Pengadaan Perangkat Keras (PC Desktop Laptop Printer)	Rp142,553,284	Rp142,553,284	Rp130,554,284	Rp130,554,284	Rp130,554,284	Rp676,769,420
		Pengadaan SDM (Operator / User Sistem, Teknisi Komputer)	Rp.6.900.354	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.6.900.354
		Training	Rp.279.000	Rp.799.000	Rp.11.669.769	Rp.0	Rp.5.692.134	Rp.18.439.903
		Sertifikasi	Rp9.258.634	Rp5.692.134	Rp.0	Rp.0	Rp.0	Rp.14.950.768
		Jumlah						

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**